



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005-2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Batam yang bersifat makro, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2005-2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
- BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.
- BAB IV : VISI DAN MISI.
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH.
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN.
- BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

RPJPD Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada RPJP Provinsi Kepulauan Riau dan RPJP Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Dalam hal akhir periode RPJPD dan belum tersusun RPJPD periode berikutnya, maka RPJPD Tahun 2005-2025 ini dapat menjadi dasar, khususnya pada program pembangunan RPJMD yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJPD untuk periode berikutnya.

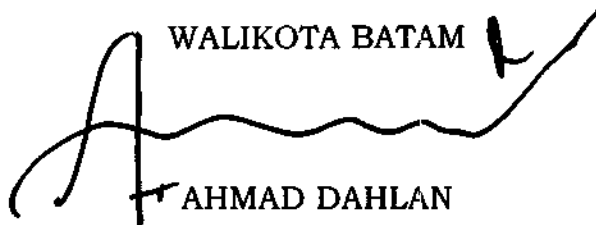
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

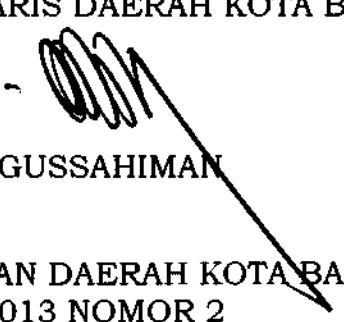
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 2

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA BATAM
Tahun 2005-2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
1.5 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	7
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	7
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	7
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi....	7
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	7
2.1.1.3 Topografi	8
2.1.1.4 Geologi	9
2.1.1.5 Hidrologi.....	10
2.1.1.6 Klimatologi	10
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana.....	10
2.1.3 Kondisi Demografi.....	11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	14
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.2.1.2 Keunggulan Sektor-Sektor Ekonomi	15
2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita.....	17
2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan	18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	19
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...	19
2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar	21
2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni	21
2.2.2.4 Kesempatan Kerja.....	22
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	23
2.2.3.1 Seni Budaya	23
2.2.3.2 Olah Raga.....	24
2.3 Aspek Pelayanan Umum	24
2.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib	24
2.3.2 Fokus Urusan Pelayanan Pilihan	45
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	51
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	51
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	53
2.4.3 Fokus Iklim Investasi.....	56
2.4.3.1 Proses Perizinan	56
2.4.3.2 Angka Kriminalitas	58

BAB III.	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	59
	3.1. Permasalahan dan Potensi Pembangunan	59
	3.2. Isu Strategis.....	71
BAB IV.	VISI DAN MISI	73
	4.1 Visi.....	73
	4.2 Misi	73
BAB V.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	77
	5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	77
	5.1.1.Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang .	77
	5.1.2.Arah Pembangunan Jangka Panjang	83
	5.2 Tahapan dan Prioritas.....	95
	5.2.1Tahapan Lima Tahun Pertama (2006-2011).....	96
	5.2.2Tahapan Lima Tahun Kedua (2011-2016).....	103
	5.2.3.Tahapan Lima Tahun Ketiga (2016-2021).....	113
	5.2.4.Tahapan Lima Tahun Keempat (2021-2025)	123
BAB VI.	KAIDAH PELAKSANAAN	133
BAB VII.	PENUTUP.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Perkembangan Penduduk Kota Batam Periode 2000-2012.....	12
Tabel II-2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam.....	16
Tabel II-3	Perkembangan Per Kapita PDRB dan Perkapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 2005-2011 Atas Dasar Harga Berlaku.....	17
Tabel II-4	Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2005-2011.....	20
Tabel II-5	Perbandingan Jumlah Wisman yang Berkunjung di Pulau Batam Menurut Kebangsaan Tahun 2009-2012	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Acuan, Pedoman dan Perhatian RPJPD Kota Batam	4
Gambar I-2	Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	5
Gambar II-1	Peta Kota Batam.....	8
Gambar II-2	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam.....	12
Gambar II-3	Jumlah Penduduk Kota Batam Per Kecamatan Tahun 2011.....	13
Gambar II-4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam.....	14
Gambar II-5	Proyeksi Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam (Atas Dasar Harga Berlaku)	18
Gambar II-6	Proyeksi Perkembangan IPM Kota Batam.....	21
Gambar II-7	Perubahan Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2005 dan 2012.....	37
Gambar II-8	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung melalui 3 Pintu Masuk	48
Gambar II-9	Perkembangan Rerata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan.....	52
Gambar II-10	Komposisi Rerata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam Tahun 2011	52
Gambar II-11	Perbandingan Komposisi Konsumsi di Kota Batam dan Tingkat Nasional Tahun 2011.....	53
Gambar II-12	Sistem Kelistrikan Kota Batam Saat ini	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien maka proses pembangunan perlu didasarkan pada suatu perencanaan. Sejalan dengan ditetapkan UU No 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kota Batam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam untuk kurun waktu 20 tahun ke depan.

Menurut amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dijelaskan bahwa RPJP Nasional merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, serta kebutuhan yang dirasakan secara internal Kota Batam, Pemerintah dan DPRD Kota Batam sepakat menyusun RPJPD Kota Batam 2005-2025 berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan RPJPD Kota Batam 2005-2025 dilakukan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah.
2. Seperti kita ketahui bersama, di samping Pemerintah Daerah Kota Batam sebagai penggerak utama pembangunan dan pengelolaan wilayah Kota Batam, juga terdapat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Batam yang mengemban amanah pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan, sehingga diperlukan sinergisitas pembangunan pada aspek sumber daya, proses maupun pemanfaatannya.
3. Penyusunan RPJPD ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Batam, namun RPJPD ini bukan hanya milik dan bukan hanya untuk panduan Pemerintah Daerah Kota Batam, tetapi RPJPD ini milik dan berlaku menjadi panduan seluruh unsur pembangunan dengan lokus dan fokus Kota Batam, termasuk pemerintah daerah, badan milik pemerintah, swasta, unsur organisasi masyarakat, serta pembinaan sosial ekonomi budaya yang beroperasi di Kota Batam.

4. RPJPD Kota Batam 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Batam yang nilai amarnya menjadi sangat diamanatkan dan hukumnya harus dijadikan rujukan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik institusi pemerintah maupun swasta.
5. RPJPD Kota Batam 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip partisipatif, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.

RPJPD Kota Batam Tahun 2005 – 2025 disusun dengan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dari atas-bawah (*top down*), serta bawah-atas (*bottom up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor – faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJPD Kota Batam Tahun 2005 - 2025 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang - undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

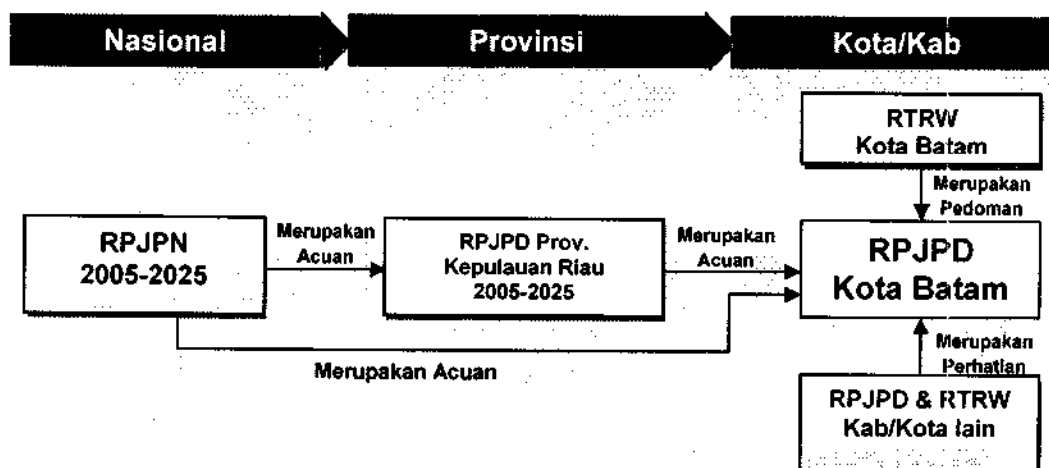
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA LAINNYA

Dokumen RPJPD Kota Batam 2005-2025 ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal terpenting dari penyusunan RPJPD adalah adanya dokumen perencanaan yang secara komprehensif dan nyata menampung aspirasi daerah. Dengan demikian diharapkan siapa pun yang akan menjadi Walikota Batam, dalam 20 tahun mendatang visi jangka panjang Kota Batam tetap tercapai.

Secara normatif substansial RPJPD Kota Batam disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, berpedoman pada RTRW Kota Batam, dan memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lain, dan visi misi dan program pembangunan Badan Pengusahaan Batam dan secara menyeluruh juga memperhatikan penataan lingkungan yang lebih lestari. Mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Sedangkan berpedoman pada RTRW Kota Batam dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dengan arah dan kebijakan RTRW.

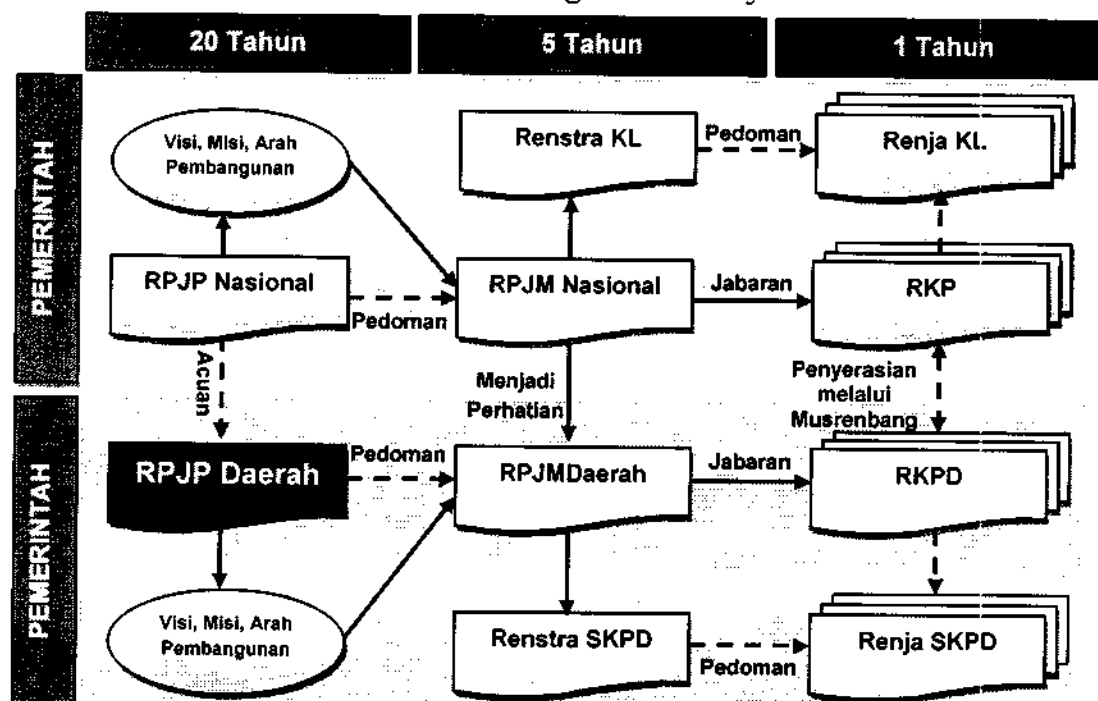
Gambar I-1
Acuan, Pedoman dan Perhatian RPJPD Kota Batam



Dokumen RPJPD memiliki arti strategis dalam kerangka perencanaan karena akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Selain itu, aspek perencanaan di daerah juga harus selalu terintegrasi dengan perencanaan di tingkat nasional.

Skema hubungan antara Dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional ataupun daerah dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

Gambar I-2
Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen
Rencana Pembangunan Lainnya



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 yang meliputi (i) latar belakang, (ii) dasar hukum penyusunan, (iii) hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana lainnya, (iv) sistematika penulisan, serta (v) maksud dan tujuan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah secara logis untuk dijadikan dasar-dasar analisis jangka panjang, yang meliputi (i) aspek geografi dan demografi, (ii) aspek kesejahteraan masyarakat, (iii) aspek pelayanan umum, serta (iv) aspek daya saing daerah.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan poin-poin penting permasalahan pembangunan Kota Batam dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis ini akan menjadi dasar utama

perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Batam 2005-2025.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menyajikan visi dan misi jangka panjang Kota Batam yang menggambarkan keadaan atau cita – cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam bab ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Batam berdasarkan setiap misi. Selain itu diuraikan juga diuraikan pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan, beserta prioritas masing-masing tahapan.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang menjelaskan kaedah umum pelaksanaan RPJPD yang mencakup penegasan tentang peranan RPJPD dalam pembangunan daerah.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai (i) landasan dan arah jangka panjang penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha Kota Batam dan pemangku kepentingan lainnya, serta (ii) sebagai acuan penyusunan RPJMD Kota Batam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJPD Kota Batam Tahun 2005 - 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Batam;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan badan;
- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; mengamanatkan adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan antar proponent terkait;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengotimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari Kerajaan Inggris telah melakukan "Barter" dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda.

Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Batam merupakan Kotamadya Administratif di Provinsi Riau, dimana Walikota diangkat dan ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Riau. Sebelum terbentuknya Kota Batam pada mulanya merupakan suatu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu.

Kota Batam sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang baru merupakan daerah otonom yang dibentuk bersama 7 kabupaten lainnya berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Berikut ini diuraikan aspek-aspek geografi dan demografi dari Kota Batam secara umum.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Batam seluas 426,563.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,8298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan:

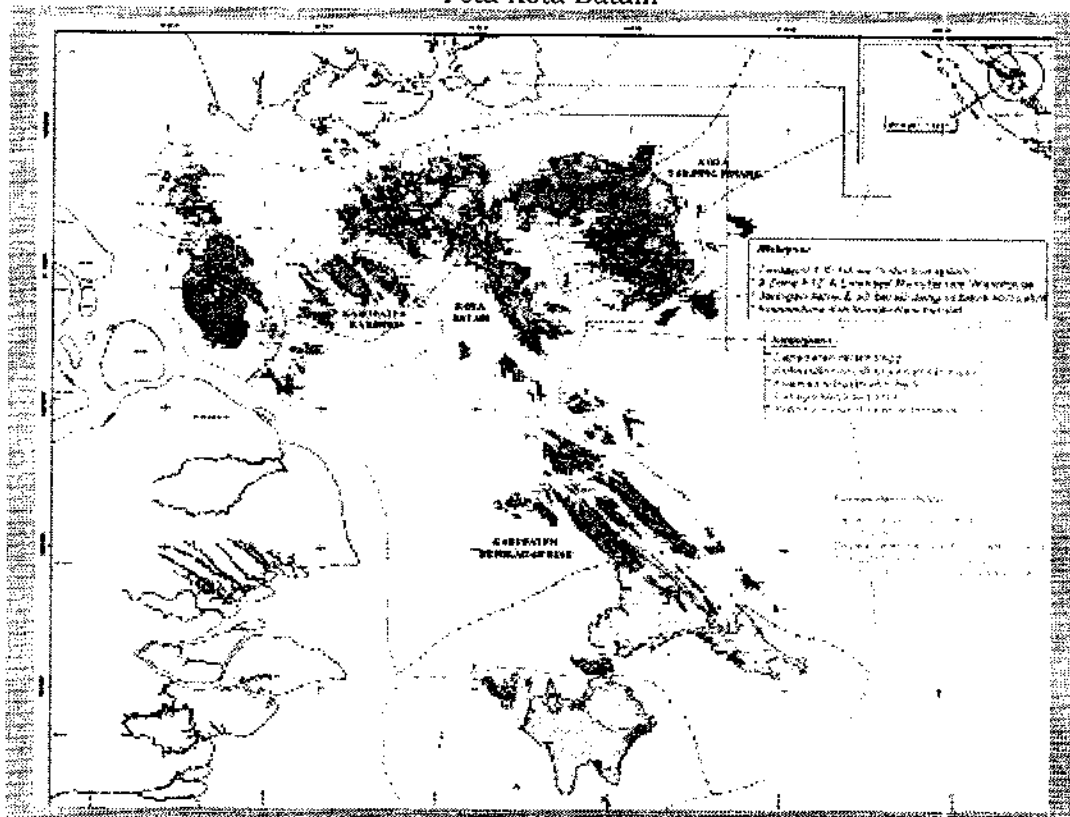
Sebelah Utara	: Singapura dan Malaysia
Sebelah Selatan	: Kabupaten Lingga
Sebelah Barat	: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
Sebelah Timur	: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Batam tahun 2004 – 2014, terletak antara

0° 25' 29 " - 1° 15' 00" Lintang Utara dan 103° 34' 35" - 104° 26' 04" Bujur Timur.

Gambar II-1
Peta Kota Batam



Sumber: Bappeda Kota Batam Tahun 2011

Batam dalam hal ini dapat diposisikan sebagai “pintu gerbang” Wilayah Barat Indonesia ke wilayah internasional.

Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Sisi positif letak strategis Kota Batam terlihat antara lain di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan yang menempatkan Singapura sebagai negara peringkat teratas penanam investasi di Kota Batam, sekaligus pengeksport dan juga pengimpor terbesar produk barang ke/dari Singapura.

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau dengan ketinggian antara 7 hingga 160 m dpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya, sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 m dpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan.

Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah, tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum.

Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temoyong 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m.

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan Pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan.

Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plaser bawah laut. Chab dan Bothe (1902), mengelompokkan stratigrafi Kepulauan Riau Lingga menjadi 5 satuan, dengan urutannya dari muda sampai tua adalah: *satuan endapan aluvial, batu pasir kuarsa, batuan metasedimen, batuan vulkanik dan granit*.

Berdasarkan interpretasi rekaman seismik, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti pola struktur Pulau Sumatera (Masduki, dkk. 1999). Karakteristik perairan laut Kota Batam memiliki cekungan, menjadikan perairan Kota Batam memiliki tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber dayaperikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (*coral-reef*) dan berbagai jenis ikan karang (*demersal*) maupun ikan hias (*ornamental fish*).

Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan-kelurusan berarah Timur Laut-Barat Daya, yang oleh Katili (1977) dimasukkan kedalam Lajur Karimata yang berada di sebelah Timur Lajur Timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di

garis katulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air-tanah dangkal (Anonim, 2006).

Wilayah Kota Batam merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di perairan laut dangkal yang sangat potensial untuk tumbuh-kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di Wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik (Anonim, 2006).

2.1.1.5. Hidrologi

Kota Batam hanya memiliki sedikit sungai yang dialiri air sepanjang tahun. Beberapa sungai bahkan kini sudah banyak yang tertimbun tanah urukan akibat pesatnya pembangunan di Batam. Secara Hidrologi Kota Batam tidak memiliki sungai yang besar akibat dari topografi dan jenis geologinya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat Kota Batam memperolehnya dari air permukaan yang berupa air sungai, mata air, waduk dan kolong. Di Kota Batam terdapat beberapa waduk atau DAM, yaitu Duriangkang, Mukakuning, Sekupang, Sei Ladi, Sei Baloi dan Nongsa.

2.1.1.6. Klimatologi

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2010 berkisar antara $21,1^{\circ}\text{C}$ - $24,4^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum berkisar antara $32,2^{\circ}\text{C}$ - $34,5^{\circ}\text{C}$, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2010 adalah $26,7^{\circ}\text{C}$ - $28,7^{\circ}\text{C}$. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2010 berkisar antara 1008,2 - 1019,9 MBS dengan tekanan minimum antara 1003,6 - 1007,6 MBS dan maksimum antara 1007,6 - 1017,4 MBS. Sementara kelembaban udara minimum di Kota Batam rata-rata berkisar antara 44 - 59 %, dan maksimum antara 97 - 100%. Kecepatan angin maksimum 14 - 23 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2010 adalah 193 hari dan banyaknya curah hujan setahun 2052,8 mm.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2004-2014, kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari:

- *Kawasan Rawan Banjir*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
- *Kawasan Rawan Longsor*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;

- *Kawasan Rawan Abrasi*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan
- *Kawasan Rawan Gerakan Tanah*, yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.
- *Kawasan Rawan Gelombang Pasang* yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang.

Di samping itu masih ada juga bencana yang terjadi setiap tahun yaitu bencana angin puting beliung yang melanda kawasan pesisir Kota Batam. Biasanya bencana ini berlangsung pada triwulan terakhir setiap tahunnya.

2.1.3. Kondisi Demografi

Penduduk Kota Batam memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, baik dari suku/etnis, latar belakang sosial ataupun agama. Hal ini karena migrasi masuk penduduk dari daerah lain ke Kota Batam sangat tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2005 berjumlah sebesar 685.787 jiwa, meningkat menjadi 1.235.651 jiwa pada tahun 2012.

Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika kependudukan Kota Batam sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola secara seksama karena masih tingginya rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Batam selama periode 2005-2012 mencapai 9,0% per tahun. Di samping itu pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi melalui tingkat kelahiran rata-rata mencapai 3,1% per tahun. Adapun perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam dalam periode 2005-2012 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-1
Perkembangan Penduduk Kota Batam
Periode 2005-2012

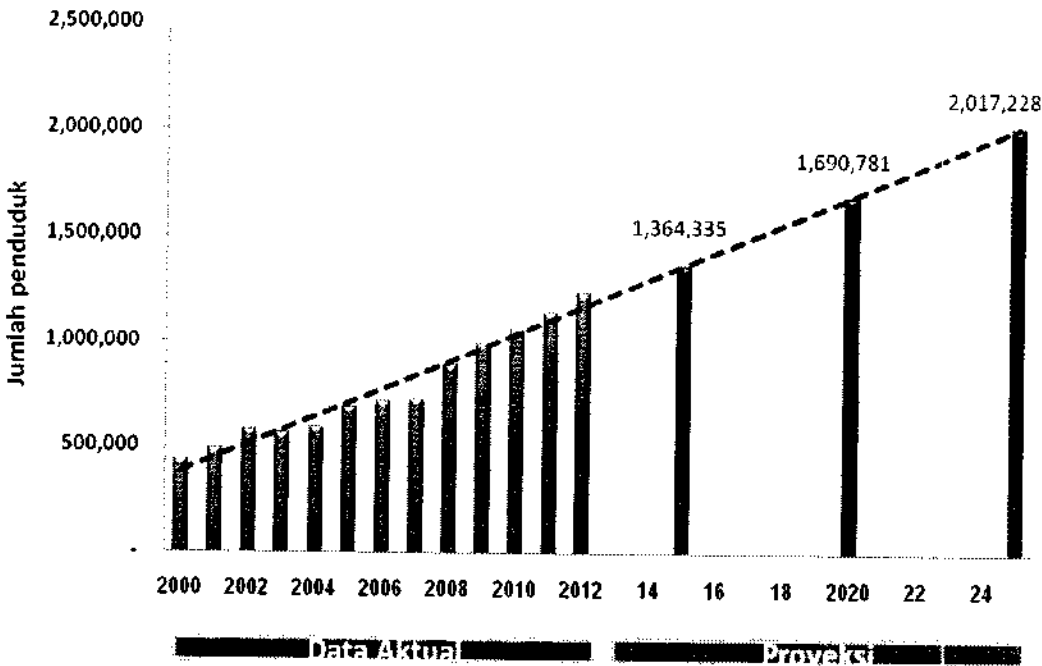
Tahun	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2005	685.787	13,8%
2006	713.960	3,9%
2007	724.315	1,4%
2008	892.469	18,8%
2009	992.095	10,0%
2010	1.056.701	6,9%
2011	1.137.894	7,7%
2012	1.235.651	8,0%

Sumber : BPS Kota Batam (Olahan)

Untuk mengatasi permasalahan kependudukan dalam hal migrasi, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam yang direvisi dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. Namun demikian pelaksanaan Perda ini tidak dapat berjalan secara optimal karena tidak didukung sepenuhnya dari daerah-daerah asal penduduk walaupun Perda ini sudah disosialisasikan di kab/kota di mana daerah asal migrasi.

Perkiraan perkembangan jumlah penduduk Kota Batam dengan menggunakan analisis *trend linear*, pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Batam diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 2 juta jiwa.

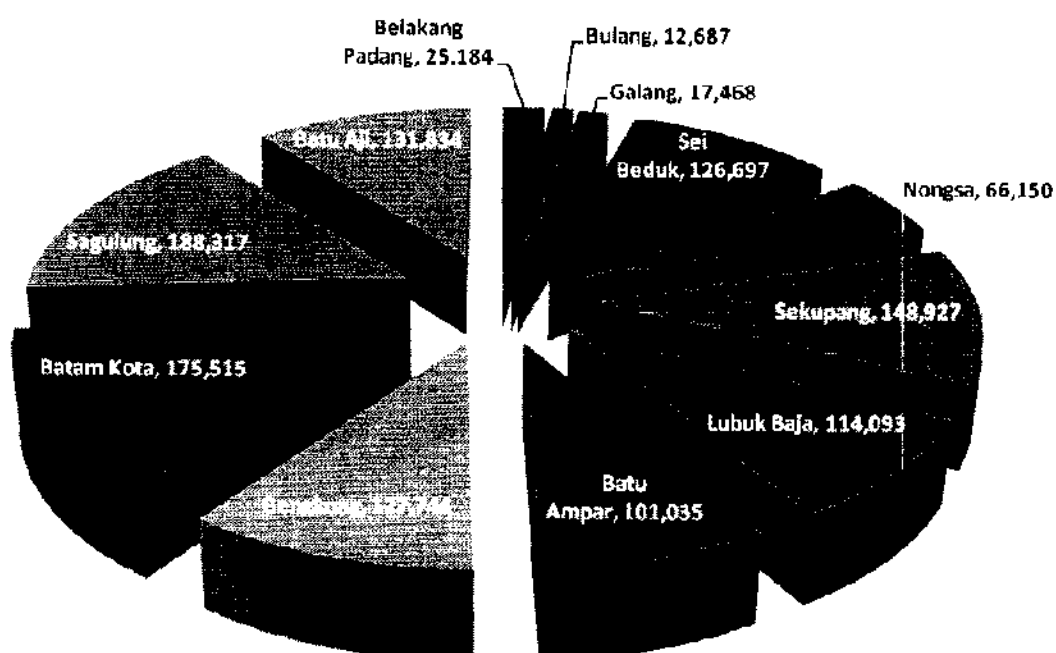
Gambar II-2
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam



Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian penduduk Kota Batam di masa datang merupakan aspek strategis, terutama dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas dan daya dukung lahan, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya. Ini perlu diantisipasi sejak dini agar terhindar dari efek negatif yang berpotensi muncul akibat bertambahnya jumlah penduduk yang ada.

Selain itu, permasalahan kependudukan di Kota Batam ialah penyebaran penduduk yang ada tidak merata. Konsentrasi penduduk terdapat di kecamatan yang berada di wilayah Pulau Batam. Migrasi masuk yang dominan dan lebih terkonsentrasi di Pulau Batam telah menyebabkan berbagai dampak sosial, ekonomi, tata ruang, dan lingkungan yang negatif. Pada sisi lain, pesatnya migrasi masuk juga menyebabkan terjadinya ketimpangan sebaran penduduk antara Pulau Batam dengan pulau-pulau di sekitarnya.

Gambar II-3
Jumlah Penduduk Kota Batam Per Kecamatan Tahun 2012



Urbanisasi tidak dengan sendirinya menempati wilayah perluasan perkotaan seperti pada umumnya kota-kota di daratan. Migrasi masuk yang tinggi tidak terlokasikan pada wilayah *hinterland*. Akibatnya pertumbuhan penduduk di wilayah *mainland* sangat tinggi akibat tambahan migrasi masuk dan urbanisasi, sedangkan wilayah *hinterland* bertambah hanya secara alamiah dan historis, tidak terinterpolasi.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat yang akan diuraikan dalam bagian ini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga Kota Batam.

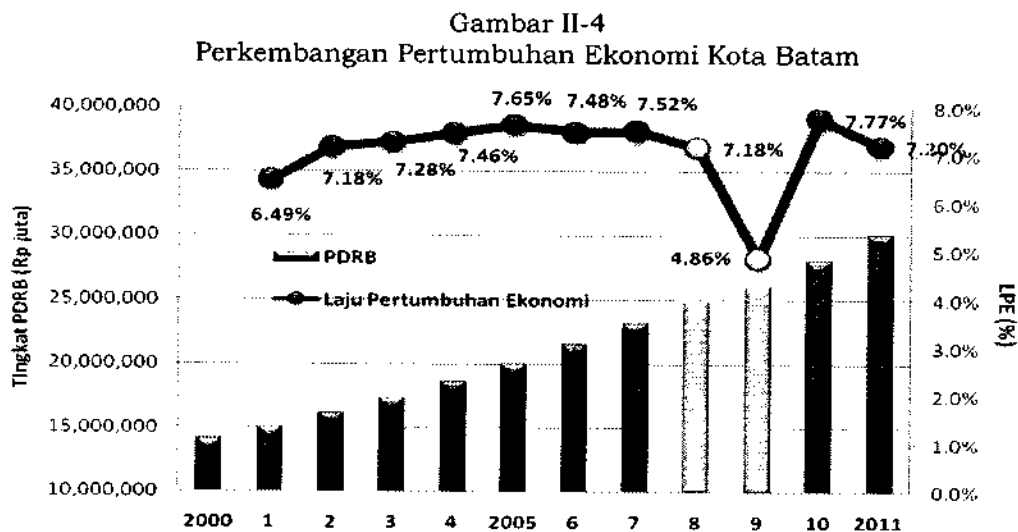
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Berikut ini diuraikan dinamika kondisi dan kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Batam menggunakan beberapa indikator utama ekonomi.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Batam dari tahun 2000 hingga tahun 2007 mengalami *trend* peningkatan yang relatif baik. Namun karena adanya pengaruh krisis finansial global pada 2008, hal ini berimbas pada perkembangan ekonomi sektoral Kota Batam, terutama pada kinerja industri manufaktur dan ekspor.

Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam mengalami sedikit perlambatan menjadi hanya sebesar 7,18% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7,52%. Perlambatan ini dampaknya dirasakan lebih besar di tahun 2009 dengan indikasi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang makin mengecil menjadi hanya sebesar 4,86%. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 7,77% tetapi pada tahun 2011 mengalami kontraksi sehingga terjadi perlambatan laju pertumbuhan yang hanya 7,20%.



Memburuknya kondisi keuangan global bahkan resesi yang dialami sebagian negara prinsipal menjadi determinan utama perlambatan kinerja industri manufaktur Kota Batam sehingga dampaknya dirasakan sampai tahun 2009. Efek tidak langsung dari perlambatan ekonomi yang terjadi secara global sangat dirasakan melalui jalur perdagangan dengan Singapura, Cina dan Malaysia. Melambatnya aktivitas ekspor dan impor luar negeri dipastikan sangat memukul kinerja sektor riil¹. Perlambatan kinerja industri di negara-negara maju khususnya Amerika Serikat (AS) berimplikasi pada turunnya permintaan barang-barang industri dari Kota Batam². Namun kinerja sektor industri secara umum masih relatif stabil dan diharapkan ke depan dengan semakin kondusifnya

¹ Bank Indonesia, *Laporan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV - 2008*.

² Bank Indonesia, *Laporan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I - 2011*.

perkembangan perekonomian global, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga akan menjadi lebih baik.

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Batam 7,20%, pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan meningkatnya kembali permintaan produk-produk industri yang dihasilkan oleh Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai ekspor yang cukup signifikan, tingkat inflasi yang relatif rendah dan nilai kredit perbankan yang disalurkan meningkat untuk modal usaha dan investasi sehingga diperkirakan secara optimis pertumbuhan ekonomi Kota Batam akan berada diantara 7,3-7,8%, dan pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Tantangan yang harus menjadi perhatian pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah kawasan ekonomi lainnya di Indonesia maupun di kawasan regional.

Di samping itu, berkenaan dengan tipologi perekonomian Kota Batam yang terbuka dan sangat dipengaruhi oleh gejolak eksternal maka tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah memperhatikan beberapa faktor eksternal kontemporer diantaranya, (i) pemulihan ekonomi global yang tidak berimbang, (ii) gejala perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang, dan (iii) perubahan iklim yang ekstrem dan dampaknya terhadap tingginya harga pangan akan sangat berpengaruh kepada perekonomian nasional dan ini berlaku juga bagi Kota Batam.

2.2.1.2. Keunggulan Sektor-Sektor Ekonomi

Keunggulan nilai tambah pembangunan di Kota Batam terletak pada pembangunan sektor industri. Kenyataan ini terlihat dari hasil perhitungan nilai tambah setiap sektor ekonomi di Batam dengan nilai tambah sektor yang sama baik terhadap Indonesia maupun Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun tertentu. Keunggulan relatif sektor industri merupakan modal dasar pembangunan Batam saat ini, dimana kontribusi sektor industri bagi perekonomian Kota Batam selama periode 2005-2011 berada di atas 60%. Gambaran distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2011 menurut lapangan usaha di Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,48	1,38	1,31	1,26	1,24	1,13	1,18
2	Pertambangan dan Penggalian	0,32	0,31	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
3	Industri Pengolahan	63,20	63,31	62,97	62,53	61,97	61,64	61,97
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,26	0,25	0,69	0,69	0,67	0,63	0,67
5	Bangunan	1,98	1,88	2,21	2,24	2,62	2,81	2,44
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	23,04	23,58	23,71	24,02	24,57	24,80	24,57
7	Pengangkutan & Komunikasi	2,94	2,83	2,76	3,17	3,17	3,10	3,06
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,47	5,18	4,91	4,68	4,60	4,48	4,44
9	Jasa - Jasa	1,31	1,27	1,28	1,28	1,29	1,25	1,21
	TOTAL PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Batam Dalam Angka (kompilasi)

Pada tahun 2005 kontribusi industri pengolahan berada di tingkat 63,20%, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 61,97% di tahun 2011. Penurunan ini juga salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat krisis global yang terjadi pada 2008 dan resesi ekonomi yang dialami oleh beberapa Negara Eropa pada kurun waktu 2010-2011. Krisis global ini mengakibatkan penurunan kontribusi industri terhadap struktur ekonomi Kota Batam, namun industri pengolahan tetap merupakan sektor terpenting atas perkembangan perekonomian Kota Batam.

Sektor usaha yang cukup memberikan kontribusi signifikan kedua, yaitu perdagangan, hotel dan restoran. Selama periode 2005-2011, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 23,04% pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 24,57% di tahun 2011. Berkenaan dengan adanya kecenderungan trend yang meningkat disektor ini, di masa depan diharapkan dapat menjadi salah satu sektor andalan yang dapat menggerakkan perekonomian Kota Batam secara berkelanjutan. Dalam hal ini subsektor perdagangan merupakan usaha yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di banding dengan subsektor hotel dan restoran.

Sektor ketiga yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian Kota Batam adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Namun, bila dilihat dari kecenderungannya selama periode 2005-2011, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan cenderung mengalami penurunan.

Hal yang patut menjadi perhatian penting ke depan sebagai tantangan adalah bahwa dominasi industri pengolahan Kota Batam ialah bahwa pada umumnya industri pengolahan ini berada di kawasan industri dan cenderung bersifat eksklusif. Selain itu juga, hasil produk dari industri pengolahan ini pada umumnya didistribusikan/dipasarkan di luar Kota Batam. Adanya tipologi seperti ini, maka peranan sektor industri pengolahan dalam memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian masyarakat lokal akan tidak terlalu besar sesuai dengan yang diharapkan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan di masa depan adalah bahwa sebagian besar tenaga kerja di sektor industri pengolahan

ini lebih banyak didatangkan dari luar Kota Batam, sehingga peranan tenaga kerja asli lokal relatif masih kecil. Selain itu sektor yang perlu diperbaiki keunggulannya adalah sektor jasa pemerintah karena terbilang masih rendah dibanding dengan sektor lain.

2.2.1.3. Pendapatan Per Kapita

Perkembangan per kapita PDRB dan per kapita Pendapatan Regional Kota Batam secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel II-3
Perkembangan Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 2005-2011 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Tahun	Per Kapita PDRB (Rupiah)	Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)
2005	42.044.333,20	30.721.002,78
2006	44.556.634,45	32.556.694,01
2007	47.388.251,09	33.836.279,69
2008	51.710.848,27	36.818.123,97
2009	46.266.613,81	36.909.167,95
2010	50.088.304,37	37.180.548,33
2011	53.026.089,63	39.096.135,88

Sumber : BPS, Batam Dalam Angka (kompilasi)

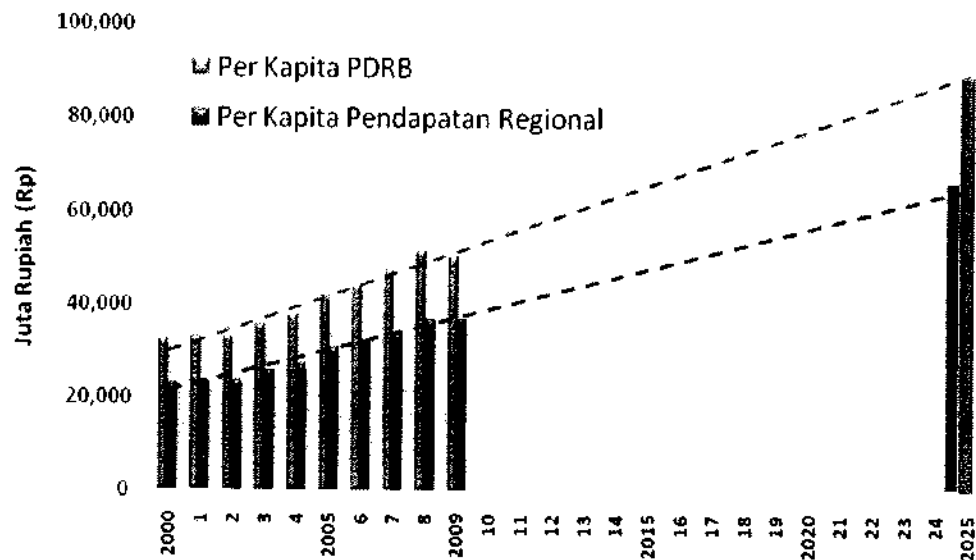
Pada tahun 2011 terjadi sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai per kapita PDRB Kota Batam pada tahun 2011 ialah sebesar Rp 53,0 juta. Sedangkan di tahun 2010 bisa mencapai Rp 50,0 juta. Kondisi ini disatu sisi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang masih relatif melambat, sehingga berdampak pada pertumbuhan PDRB Kota Batam menjadi relatif lebih kecil di satu sisi. Namun di sisi lain jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, sehingga perkapita PDRB menjadi menurun.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan secara nasional, per kapita PDRB Kota Batam pada tahun 2008 relatif lebih tinggi. Nilai per kapita PDRB Provinsi Kepri hanya mencapai Rp 37,06 juta dan di tingkat nasional berada pada kisaran Rp 21,7 juta. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat ekonomi Kota Batam dapat dikatakan lebih baik, bila dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan secara Nasional. Namun yang patut menjadi perhatian adalah indikator PDRB per kapita belum dapat mengindikasikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini terutama adanya kondisi faktual bahwa terdapat kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antara wilayah *mainland* dan *hinterland*.

Di sisi lain, relatif tingginya per kapita PDRB Kota Batam ini bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia masih tergolong rendah. Malaysia pada tahun 2008 telah memiliki nilai per kapita PDRB sebesar Rp 73,9 juta. Sedangkan Singapura memiliki per kapita PDRB yang sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 359,55 juta. Berdasarkan kecenderungan *trend* pertumbuhan per kapita PDRB selama periode 2005-2011, proyeksi masa depan per

kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam sampai tahun 2025 dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.

Gambar II-5
Proyeksi Perkembangan Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional
Kota Batam
(Atas Dasar Harga Berlaku)



2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan berbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan pada tingkat ekonominya, ketidakberdayaan dalam berusaha, keterisolasian dan ketidakmampuan mengemukakan aspirasi untuk mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan taraf hidup. Di samping itu masyarakat miskin juga pada umumnya ditandai dengan kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Ketidakberdayaan itu kemudian menumbuhkan “prilaku miskin” yang bermuara pada hilangnya kemampuan untuk berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat. Di samping itu kemiskinan juga disebabkan oleh karakteristik wilayah dan kondisi sosial masyarakat serta standar hidup.

Berpijak kepada gambaran kondisi kemiskinan yang ada, secara umum dapat diungkapkan bahwa penyebab kemiskinan di Kota Batam berkemungkinan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha
2. Keterbatasan akses terhadap faktor produksi
3. Rendahnya kepemilikan asset/kepemilikan terhadap asset tertentu
4. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan
5. Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi
6. Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial

Jika dilihat dari kondisi rumah tangga miskin di Kota Batam, umumnya ditemui pada rumah tangga yang hidup dari sektor perikanan (nelayan) yang sangat tergantung pada alam. Selain itu ditemui juga pada rumah tangga yang berasal dari kelompok buruh pabrik dan penduduk yang datang sebagai migrasi yang tidak mempunyai keterampilan serta masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan telah diupayakan selama ini. Selain itu, dengan adanya komitmen MDG's (*Millennium Development Goals*) dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan upaya untuk mengatasi permasalahan inipun menjadi lebih kuat.

Perkembangan penduduk miskin Kota Batam mengacu kepada secara makro berdasarkan hasil pendataan Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2010, jumlah penduduk miskin Kota Batam berjumlah 69.750 penduduk atau sekitar 7,26% dan ini lebih baik dari target MDG's yaitu sebesar 7,55%. Sedangkan tingkat kemiskinan mikro Kota Batam berdasarkan Data PPLS tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin di Kota Batam berjumlah 36.207 RTS dan pada tahun 2011 berjumlah 40.493 RTS atau sekitar 16,34% dan ini melampaui target MDG's sebesar 12,1% sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terkait erat dengan pembangunan kualitas manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, yang merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan mencakup seluruh siklus hidup manusia. Penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial, capaian kinerjanya antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan tolak ukur lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial adalah Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan kesempatan kerja penduduk.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah (1) umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, (2) berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta (3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi.

Gambaran perkembangan IPM Kota Batam beserta komponen-komponennya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II-4
Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam
Tahun 2005 - 2011

Tahun	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pengetahuan	Indeks Daya Beli	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	75,81	89,6	78,2	75,5
2006	75,91	89,67	78,5	75,7
2007	76,03	89,67	78,7	76,82
2008	76,17	89,67	79,1	77,28
2009	76,26	89,69	66,59	77,51
2010	76,35	89,89	67,16	77,80
2011	76,43	89,94	67,73	78,03

Sumber : BPS Kota Batam

Perkembangan IPM Kota Batam berdasarkan indeks komposit mengalami kenaikan dari 76,5 pada tahun 2005 menjadi 78,31 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Batam telah mengalami perbaikan selama ini. Untuk Indeks Daya Beli mengalami peningkatan dari 78,2 pada tahun 2005 menjadi 79,1 pada tahun 2008, setelah itu mengalami penurunan menjadi 67,73 pada tahun 2011. Pada rentang waktu terjadinya kenaikan harga BBM, kondisi ini mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok meningkat dan dampaknya sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun demikian fenomena ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Batam masih mampu bertahan ditengah-tengah kesulitan ekonomi.

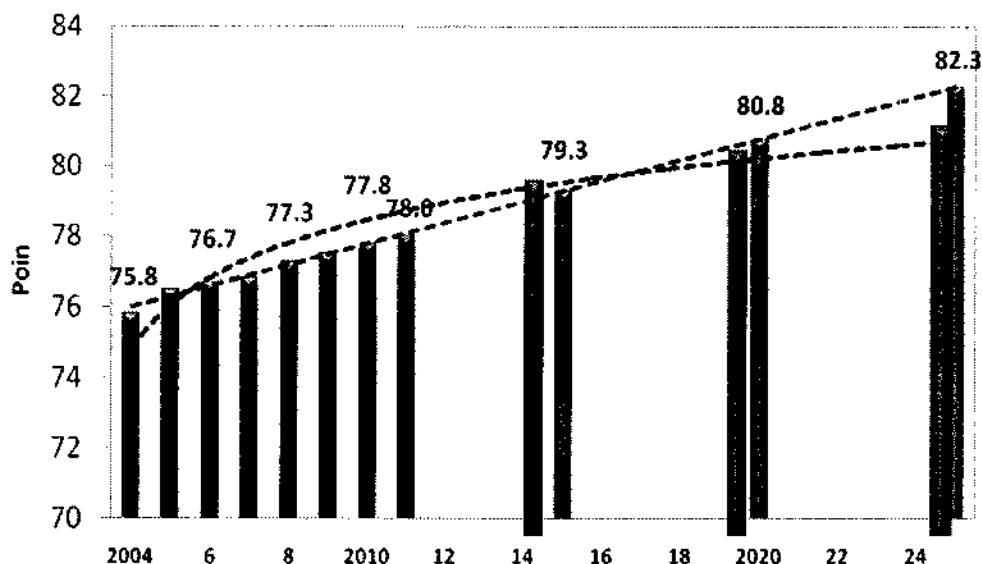
Sedangkan komponen lain seperti Indeks Harapan Hidup juga mengalami keadaan yang sama. Harapan hidup masyarakat Kota Batam terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai angka 76,43. Hal ini merupakan suatu indikasi semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat sebagai dampak dari semakin lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan. Disamping itu indeks pengetahuan mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu sebesar 89,6 menjadi 89,94 di tahun 2011.

Berkaitan dengan fakta diatas, jika dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional, IPM Kota Batam berada pada posisi tertinggi. Pada tahun 2011 IPM Indonesia baru mencapai 72,27 dan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,78, sedangkan IPM Kota Batam yang sebesar 78,03. Hal ini menggambarkan pembangunan dan kesejahteraan manusia di Kota Batam relatif lebih sejahtera.

Berdasarkan analisis *Trend Linear* perkembangan IPM Kota Batam hingga tahun 2025 diproyeksikan dapat mencapai angka 82,3. Namun yang patut diperhatikan bahwa IPM Kota Batam yang saat ini relatif telah tinggi, jika ingin ditingkatkan lebih lanjut maka membutuhkan usaha yang sangat besar. Oleh karena itu proyeksi linear peningkatan IPM harus disandingkan dengan proyeksi *non-*

linear dengan melihat kecenderungan kekuatan peningkatan IPMnya (tidak konstan). Melalui pendekatan ini, maka target pencapaian IPM Kota Batam pada tahun 2025 berada pada kisaran 80,8 - 82,3.

Gambar II-6
Proyeksi Perkembangan IPM Kota Batam



2.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APK di Kota Batam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu untuk APK SD/MI pada tahun 2005/2006 adalah 94% dan pada tahun 2010/2011 meningkat menjadi 109,45%. Untuk APK tingkat SLTP/MTs juga meningkat yaitu 79,95% pada tahun 2005/2006 dan meningkat menjadi 97,50% pada tahun 2010/2011. Sedangkan untuk tingkatan SLTA/MA pada tahun 2005/2006 yaitu sebesar 59,10% dan meningkat menjadi 65,12% pada tahun 2010/2011.

2.2.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Perkembangan APM di Kota Batam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu untuk APM SD/MI pada tahun 2005/2006 adalah 94% dan pada tahun 2010/2011 meningkat menjadi 98,68%. Untuk APM tingkat SLTP/MTs juga meningkat yaitu 79,95% pada tahun 2005/2006 dan meningkat menjadi 84,35% pada tahun 2010/2011. Sedangkan untuk tingkatan SLTA/MA pada tahun 2005/2006 yaitu sebesar 59,10% dan meningkat menjadi 59,75% pada tahun 2010/2011.

Berdasarkan fakta diatas APM Kota Batam disemua jenjang pendidikan belum mencapai target yang ditetapkan dalam indikator

APM MDG's yaitu 100%. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa Pemerintah Kota Batam harus memberi perhatian khusus terutama untuk APM ditingkat SLTA/MA.

2.2.2.4. Kesempatan Kerja

Pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat akan terus dibutuhkan sebagai upaya memfasilitasi bagi para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Banyaknya pencari kerja yang terdaftar tiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan lapangan kerja Kota Batam terus mengalami kenaikan.

Rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas menggambarkan perkembangan tenaga kerja yang memasuki lapangan kerja. Besarnya kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Batam pada tahun 2010 adalah sebesar 93% dan pada tahun 2011, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 91% sehingga hal ini tidak mencapai target MDG's, dimana rasio kesempatan kerja ini harus meningkat dari tahun ke tahun.

Penurunan rasio kesempatan kerja di Kota Batam ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah angkatan kerja/penduduk usia 15-64 tahun yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penanaman modal di Kota Batam. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tersebut sebagian besar dikarenakan tingginya tingkat migrasi dari luar Kota Batam yang tidak didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan lapangan kerja di Kota Batam.

Tingkat pengangguran di Kota Batam selama periode 2006-2010 secara persentase jumlah pengangguran pasca krisis ekonomi global telah mengalami penurunan, yaitu dari 6,69% pada tahun 2008 dan 7,95% pada tahun 2009, namun pada tahun 2010 menjadi 6,33%. Tingkat pengangguran Kota Batam pada Agustus 2010 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional pada bulan dan tahun yang sama, dimana angkanya diperkirakan mencapai 7,4%. Angka pengangguran Kota Batam seperti tersebut di atas (6,33%) tergolong relatif rendah karena berada pada tingkat pengangguran alamiah yang angkanya berkisar antara 7 – 8%.

Secara internal tantangan yang harus diperhatikan terhadap kesempatan kerja dan pengangguran pada tahun-tahun mendatang adalah situasi pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi dan meningkatnya rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal. Dalam kurun waktu tersebut angkatan kerja diperkirakan meningkat signifikan, maka dengan demikian kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar dapat menyediakan tambahan lapangan kerja yang memadai dan layak.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1. Seni Budaya

Kemajuan pembangunan Kota Batam harus tetap mempertahankan karakter dan budaya melayu. Sering kali kita melihat bahwa pembangunan identik dengan ukuran kuantitas dan fisik sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dikaitkan hanya dengan ukuran kesejahteraan. Apabila keberhasilan pembangunan hanya memperhatikan materi tanpa mempertimbangkan pembangunan moral maka hal ini akan menjadi kontraproduktif. Kondisi bahwa secara materi masyarakat semakin sejahtera namun mengalami degradasi moral bisa saja terjadi apabila masyarakat tersebut tidak memiliki karakter. Pembangunan yang hanya mengejar materi jika tidak ditata dengan baik justru dapat berdampak negatif terutama karena adanya kemungkinan terjadinya krisis identitas masyarakat terutama para generasi muda. Oleh karena itu membangun masyarakat dengan tetap mempertahankan budaya melayu sebagai karakter dasar untuk menciptakan pondasi masyarakat yang kuat.

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan golongan. Berpayungkan budaya melayu, perkembangan seni budaya di Kota Batam sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya.

Di dalam proses pembangunan Batam menuju daerah yang makmur secara ekonomi, Kota Batam harus tetap mempertahankan budaya dan tradisi Melayu yang luhur. Hal ini mengandung dua makna : pertama, menjaga agar pembangunan tetap berlandaskan moral dan nilai-nilai positif yang luhur dan kedua, mempertahankan ciri khas Batam sebagai daerah berbasis Budaya Melayu. Akhir kata pepatah "Tak akan hilang Melayu di tanah Melayu" tidak akan menjadi sekedar retorika.

Potensi seni dan budaya di Kota Batam yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai aset budaya daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Potensi Kesenian, yaitu : Teater Makyong, Teater Bangsawan dan tari Jogi serta Joged Dangkung
- b. Potensi Seni Rupa : berbagai aneka ukiran dan motif khas Melayu perlu dikembangkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembuatan batik, aksesoris rumah dan keperluan lain yang berkaitan dengan seni rupa. Batam memiliki banyak motif yang khas, sehingga perlu digali dan dikembangkan.
- c. Potensi Seni Sastra : Sastra lisan yang berkembang di tengah masyarakat seperti cerita rakyat, legenda dan lain-lain perlu digali dan dipublikasikan sehingga Batam memiliki identitas dan ciri khas. Berbagai cerita dan legenda tersebut harus diketahui oleh masyarakat Batam, khususnya generasi muda untuk menumbuhkan-kembangkan kecintaan pada Batam
- d. Potensi Budaya, yaitu : Mandi Safar, Cukur Rambut, Sunat Rasul, Musik Silat.
- e. Potensi Permainan Rakyat : Gasing

Potensi budaya sebagaimana tersebut diatas saat ini masih dipertahankan dan berkelanjutan ditampilkan oleh kelompok sanggar seni yang berjumlah 43 kelompok seni. Disamping itu juga dilakukan kegiatan pentas seni pada 20 lokasi dimana kegiatannya dilakukan sampai 50 kali dalam setahun. Selain itu, terdapat juga kampung/rumah adat dan beberapa objek wisata penting lainnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai destinasi wisata budaya Kota Batam antara lain di Pulau Galang, Pulau Bulang Lintang, Pulau Panjang dan Nongsa.

Tantangan ke depan yang harus diperhatikan dalam kehidupan budaya adalah adanya dampak arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itu sangat diperlukan ketahanan jati diri masyarakat Kota Batam dan juga sekaligus harus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing daerah, oleh karena itu membangun masyarakat Kota Batam dengan tetap mempertahankan budaya melayu sebagai karakter dasar sangat diperlukan untuk menciptakan pondasi masyarakat yang kuat. Pluralisasi masyarakat perlu tetap dijaga dalam tatanan kehidupan sosial, budaya dan kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, kondisi ini sangat diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif dalam berinvestasi di Kota Batam.

2.2.3.2. Olah Raga

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Kota Batam budaya olah raga telah berkembang secara meluas di kalangan masyarakat. Untuk fasilitas olahraga, hingga saat ini telah terdapat berbagai fasilitas lapangan olahraga yang tersebar pada 74 lokasi, lapangan golf terdapat 7 lokasi dan lapangan tenis sebanyak 14 lokasi. Sedangkan untuk potensi olah raga yang akan dijadikan olahraga unggulan di Kota Batam adalah sepak takraw. Di samping itu telah banyak event-event olah raga yang diselenggarakan oleh Kota Batam, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Tantangan pada tahun mendatang sebagai salah satu faktor yang sangat penting adalah harus menjadikan olah raga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Di samping itu, olah raga juga harus merupakan faktor untuk meningkatkan jati diri daerah dan membangun generasi muda sebagai tulang punggung masa depan daerah agar tercipta generasi yang berkualitas.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Pelayanan Wajib

A Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah dan keunggulan daya saing lokal. Ketersediaan SDM bermutu sangat menentukan kemampuan suatu daerah dalam memasuki era ekonomi pasar bebas, yang menuntut

kemampuan daya saing tinggi. Untuk itu, peran pendidikan sangat penting dan strategis dalam upaya melahirkan SDM berkualitas, yang ditandai oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki keterampilan teknis memadai.

Pendidikan terutama pada jenjang menengah dan tinggi mutlak diperlukan untuk mendukung pengembangan SDM dan tenaga kerja yang berdaya saing tangguh dalam menghadapi kompetisi yang ketat baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa pengaruh yang positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Terkait dengan kualitas pendidikan, beberapa indikator penting perlu dilihat yaitu: (1) rata-rata lama sekolah, (2) jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk, (3) tingkat keberaksaraan dan (4) jumlah dan kualitas guru.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Batam pada tahun 2005 adalah 10,70 dan pada tahun 2011 menjadi 10,78. Hal ini menandakan rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Batam adalah pada jenjang SMA/ sederajat kelas 1.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 dan 2011 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Kota Batam yang berumur 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2011 sebesar 16%, SLTA/ sederajat sebesar 58%, diploma dan sarjana sebesar 10%. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Batam adalah pada jenjang pendidikan setingkat SLTA/ sederajat dan ini cukup baik dan sudah di atas rata-rata nasional.

Indikator ketiga kualitas pendidikan adalah kemampuan keberaksaraan yang ditandai oleh kemampuan membaca dan menulis. Angka melek aksara merupakan hasil proporsi antara jumlah penduduk usia tertentu yang bias membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Perkembangan angka melek huruf di Kota Batam pada tahun 2005 sebesar 98,8% dan meningkat menjadi 98,97% pada tahun 2011, sehingga diperkirakan Kota Batam akan mencapai target MDG's pada tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Indikator keempat adalah guru berkualifikasi dan tersertifikasi. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru dari jenjang pra-sekolah sampai dengan sekolah menengah, termasuk sekolah keagamaan, minimal harus berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana. Pada Tahun Ajaran 2010/2011 jumlah guru di Kota Batam sebanyak 8.616 orang yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 1.140 orang, SD/ sederajat sebanyak 4.325 orang, SLTP/ sederajat sebanyak 1.653 orang dan SLTA/ sederajat

sebanyak 1.498 orang. Perihal kualifikasi guru menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah; (1) tamatan SLTA sebesar 20,5%, (2) tamatan D1, D2, dan D3 masing-masing sebesar 1,4%; 23,1% dan 6,92% (3) tamatan S1 sebesar 47,7%, (4) tamatan S2 sebesar 0,32%. Untuk jenjang pendidikan SLTP/ sederajat kualifikasi guru adalah; (1) tamatan SLTA sebesar 4,98%, (2) tamatan D1, D2, dan D3 masing-masing sebesar 0,93%; 1,59% dan 10,45% (3) tamatan S1 sebesar 81,13%, (4) tamatan S2 sebesar 0,93%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA/ sederajat kualifikasi guru adalah; (1) tamatan SLTA sebesar 1,3%, (2) tamatan D1, D2, dan D3 masing-masing sebesar 3,11%; 0,26% dan 10,05% (3) tamatan S1 sebesar 84,24%, (4) tamatan S2 sebesar 1,04%.

Berdasarkan fakta di atas terlihat bahwa kualifikasi guru berpendidikan S1 ke atas di Kota Batam sekitar 63% dan ini telah melampaui kualifikasi guru secara nasional yaitu sebesar 51%. Untuk itu ke depan perlu upaya percepatan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru serta upaya percepatan peningkatan profesionalisme guru harus tetap dilanjutkan melalui sertifikasi dan kompetensi guru.

Salah satu hal dasar dan menjadi faktor penting yang menunjang kemajuan di bidang pendidikan adalah tersedianya sarana ataupun fasilitas pendidikan, karena akses terhadap fasilitas tersebut memberikan pengaruh tersendiri terhadap tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Sampai tahun 2012, jumlah bangunan sekolah di Kota Batam sudah sebanyak 823 buah yang terdiri dari 310 gedung TK, 305 gedung sekolah tingkat dasar, 125 gedung sekolah tingkat menengah pertama dan 83 gedung sekolah tingkat menengah atas.

Dalam 20 tahun mendatang tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk wilayah *mainland* dan *hinterland*, dan antar jenis kelamin.

Tantangan pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, antara penduduk kaya dan miskin, serta antar wilayah sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan di Kota Batam secara menyeluruh serta meningkatkan daya saing daerah. Selain itu pembangunan pendidikan ditantang juga untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

B Kesehatan

Kualitas SDM disuatu daerah tidak hanya dilihat dari pendidikannya tapi juga ditunjukkan oleh kondisi kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Kalau dilihat dari beberapa indikator kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat di Kota Batam relatif lebih baik dan ini dapat dilihat dari indikator derajat kesehatan Kota Batam.

Pada tahun 2007 angka harapan hidup sebesar 70,62 tahun dan meningkat menjadi 70,86 tahun pada tahun 2011, angka kematian bayi tahun 2007 sebesar 7,2 per 1000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2011 menjadi 3,8 per 1000 kelahiran hidup dimana kondisi ini telah melampaui target MDG's sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu 78,6 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menunjukkan telah tercapainya target MDG's yang ditetapkan sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih tahun 2009 sebesar 77,34% sedangkan tahun 2011 sebesar 99,77% hampir mendekati target MDG's 100%.

Berdasarkan hasil pemantauan angka kematian balita Kota Batam sudah mencapai angka 4,24 per 1000 ini sudah melampaui target MDG's sebesar 32 per 1000. Sedangkan status gizi balita untuk prevalensi balita gizi buruk sebesar 5,4% tahun 2007 dan menurun menjadi 0,46% pada tahun 2011 dan ini melampaui target MDG's sebesar 3,46%, sedangkan untuk prevalensi balita gizi kurang sebesar 13% tahun 2007 dan menurun menjadi 2,57% pada tahun 2011 juga melampaui target MDG's sebesar 2,9%.

Kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Kota Batam saat ini masih perlu ditingkatkan, terutama yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang belum merata dan masih sangat terbatas. Untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) dari segi infrastruktur sudah cukup lengkap dalam memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, jangkauan pelayanan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) belum secara merata dapat melayani masyarakat.

Infrastruktur kesehatan di Kota Batam saat ini telah berdiri 14 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 6 RS Khusus. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah menjadi RSUD kelas B hingga saat ini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai antisipasi terhadap mahalanya biaya pengobatan di rumah sakit swasta yang kurang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu.

Selain pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersifat kuratif dan rehabilitatif masyarakat juga sangat membutuhkan sarana puskesmas yang lebih mengarah ke upaya preventif dan promotif. Puskesmas yang ada di Kota Batam sebanyak 15 unit, 50 puskesmas pembantu (pustu), 30 polindes dan 31 unit puskesmas keliling yang tersebar di daerah perkotaan dan *hinterland*.

Disamping itu, terdapat sarana kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta berupa balai pengobatan (BP) sebanyak 189 unit dan rumah bersalin (RB) sebanyak 65 unit. Namun keberadaan balai pengobatan dan rumah bersalin ini memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Mengingat jumlah penduduk Kota Batam saat ini relatif besar dan menyebar di daerah perkotaan dan *hinterland* dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada, maka peningkatan keberadaan puskesmas masih sangat dibutuhkan yang diiringi dengan penambahan fasilitas pendukung lainnya termasuk ketersediaan tenaga kesehatan.

Perihal penyakit yang berkembang pada saat ini, masih ditemui beberapa jenis penyakit seperti demam berdarah, malaria, diare, TBC dan filariasis, serta HIV. Penyakit HIV/AIDS merupakan prioritas utama dalam pengendalian penyakit yang menjadi bagian dalam komitmen MDG's, dan perkembangan penyakit beserta penyakit demam berdarah cenderung meningkat di masyarakat serta beberapa penyakit lainnya. Upaya yang telah dilakukan untuk demam berdarah antara lain dengan melakukan penyuluhan, gerakan pemberantasan sarang nyamuk, abatesasi. Sedangkan untuk pencegahan HIV/AIDS dilakukan pada golongan beresiko tinggi (*high risk*) berupa penyuluhan, konseling, kondomisasi, klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dan pendirian klinik *Voluntary Consulting Treatment (VCT)* serta sosialisasi *Prevention Mother To Child Treatment (PMTCT)* bagi tenaga kesehatan.

Sampai saat ini, upaya yang telah dilakukan tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena masih di temukan kasus, baik demam berdarah maupun HIV/AIDS, sehingga ke depan sangat diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat serta peningkatan kualitas, kuantitas dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk pengadaan obat-obatan, sistem informasi kesehatan.

Upaya Kesehatan yang Bersumber Masyarakat (UKBM) di Kota Batam berupa posyandu berjumlah 332 unit dengan klasifikasi posyandu pratama 8,73%, posyandu madya 61,45%, posyandu purnama-mandiri 29,82% dengan jumlah kader 2244 orang. Pembiayaan posyandu perlu terus dilakukan untuk meningkatkan klasifikasi posyandu menjadi posyandu purnama sebesar 90%. Demikian juga dengan tenaga kader yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan, mengingat fungsi posyandu sangat strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri meliputi penyuluhan, mendeteksi tumbuh kembang anak termasuk upaya perbaikan gizi balita, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemberian imunisasi dan lain-lainnya.

Tantangan yang akan dihadapi untuk 20 tahun ke depan di bidang kesehatan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat sosial ekonomi, dan gender, masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan pemerintah khususnya puskesmas belum bisa

memenuhi rasio pelayanan yakni 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk dimana saat ini masih melayani 65.000 penduduk.

Disamping itu tantangan yang dihadapi adalah pemerataan pelayanan kesehatan mengingat kondisi geografis wilayah Kota Batam dan perilaku kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya penyebaran penyakit menular, penyalahgunaan obat terlarang dan rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dalam menjangkau biaya kesehatan serta penyebaran tenaga medis yang sesuai dengan kebutuhan penduduk.

C Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

Dinamika dan tantangan kondisi lingkungan hidup Kota Batam antara lain adalah rusaknya kawasan tangkapan air (*catchment area*) sebagai akibat perubahan fungsi kawasan hutan konservasi/lindung menjadi kawasan budidaya, rusaknya kawasan hijau (*green area*), pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha hotel, terjadinya perambahan dan pembakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.

Selain daripada itu juga dihadapkan pada kondisi menurunnya habitat hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*), dan daerah pemijahan (*spawning ground*) bagi berbagai biota. Adanya buangan limbah industri dan limbah domestik secara langsung atau sembarangan ke media lingkungan juga telah mengakibatkan musnahnya atau menurunnya biota pesisir dan laut/perairan.

Bentuk kerusakan lingkungan lain yang nyata dan disaksikan oleh masyarakat Kota Batam adalah *cut and fill* untuk penyiapan lahan siap bangunan dan penimbunan, dimana dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak memenuhi aturan yang ditetapkan. Untuk itu sangat diperlukan penegakan hukum dan peningkatan intensitas pengawasan dalam pelaksanaan *cut and fill* agar memenuhi aturan.

Selain itu permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Batam adalah masalah sampah perkotaan dimana volume sampah mencapai 1.261.689 ton per tahun yang tidak diimbangi dengan pelayanan pengangkutan sampah sekitar 74,3%. Limbah B3 dari kegiatan industri dan pencemaran laut dan wilayah pesisir akibat tumpahan minyak merupakan fenomena lingkungan yang perlu mendapat

penanganan secara cepat dan tepat mengingat sampai saat ini limbah B3 terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pembangunan yang pesat termasuk permasalahan tumpahan minyak yang tidak dapat dielakkan mengingat letak geografis Kota Batam.

Dalam rangka mengurangi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kota Batam telah mengupayakan berbagai hal, antara lain memfasilitasi lahirnya kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif di semua sektor pembangunan. Upaya ini diantaranya telah melahirkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Disamping itu juga telah dibentuk Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Batam No. Kpts. 173/HK/X/2007.

Selain daripada itu upaya yang harus dilakukan di masa mendatang dalam mengantisipasi meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah mainland serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang baik, maka perlu ke depan dilakukan penanganan secara sistematis, terencana dengan baik dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dari semua *stake holder* yang melakukan aktivitas pembangunan di Kota Batam. Hal ini sangat penting mengingat keberlanjutan pembangunan jangka panjang akan dihadapkan berbagai tantangan antara lain adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing daerah Kota Batam.

D Pekerjaan Umum

Kondisi sarana dan prasarana dalam peningkatan perekonomian masyarakat saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya dapat mempengaruhi proses pembangunan di Kota Batam, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor sosial dan ekonomi serta mendukung pengembangan wilayah.

Kualitas sarana dan prasarana terutama jalan sebagai ujung tombak fasilitas sarana perekonomian dan sebagai fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kondisinya cukup memprihatinkan. Sampai akhir tahun 2011 sekitar 18% total panjang jalan mengalami kerusakan ringan hingga berat dari panjang jalan raya 1.089,46 Km, sehingga kondisi ini menjadi permasalahan yang cukup penting mengingat kondisi jalan yang memadai sangat diperlukan dalam proses distribusi bagi Kota Batam yang bergerak di sektor industri dan perdagangan.

Tantangan ke depan terhadap sarana dan prasarana jalan adalah mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap kualitas jalan yang berada di lingkungan permukiman, dimana sebagian besar jalan-jalan tersebut sampai saat ini belum ada serah terima kepada Pemerintah Kota Batam. Di samping itu peningkatan kualitas jalan sebagai akses distribusi barang dan jasa, akses dari kawasan industri ke pelabuhan, kawasan pariwisata dan sarana aksesibilitas pengembangan wilayah menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian dalam rangka menjamin daya saing daerah untuk mempertahankan Kota Batam sebagai daerah investasi dan destinasi wisata di Indonesia barat.

Permasalahan lain yang ditemui di bidang sarana dan prasarana juga terkait dengan kondisi pelantar beton dan abrasi air laut yang mengancam pantai di kawasan *hinterland* dan pesisir dimana belum mendapat penanganan optimal dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal penting lainnya terkait dengan permasalahan drainase kota terutama pada jalur-jalur jalan utama, jalan kolektor dan jalan lingkungan maupun pada kawasan pusat kota dan permukiman masih belum maksimal penanganannya, sehingga hal ini menyebabkan terdapat titik-titik banjir atau genangan air lebih kurang 37 kawasan rawan titik banjir. Kondisi ini menyebabkan terganggunya aksesibilitas yang berakibat kepada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Ke depan diperlukan perhatian pemerintah sehingga tercipta kondisi yang lebih baik.

Pengembangan di bidang prasarana waduk untuk memenuhi kebutuhan air masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, hal ini terlihat dari proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak baru mencapai 68,94% walaupun ini telah melampaui dari target MDG's. Di sisi lain ancaman terhadap kawasan tangkapan air untuk pengamanan waduk masih berlangsung yaitu adanya aktivitas perambahan hutan, aktivitas peternakan dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keberadaan waduk. Tantangan di masa datang adalah semakin meningkatnya permintaan pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan termasuk ancaman terhadap pencemaran kualitas air. Untuk itu peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu.

Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan mengalami kendala terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, disisi lain peran Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pengusahaan Batam belum optimal dalam pembangunan sarana dan prasarana.

E Penataan Ruang

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batam, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 dijadikan sebagai acuan oleh semua *stake holder* yang melaksanakan pembangunan di Kota Batam baik dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut telah mengalokasikan peruntukan kawasan budidaya dan kawasan lindung secara proporsional berdasarkan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pemerintah kota memiliki alat kontrol dalam pemanfaatan ruang.

Penataan ruang kawasan budidaya telah memperhatikan pertumbuhan berbagai sektor pembangunan dalam kurun waktu satu dekade ke depan khususnya untuk kawasan-kawasan yang cepat tumbuh seperti kawasan permukiman, industri dan jasa. Sedangkan untuk pemantapan kawasan lindung kota dilakukan melalui penataan ulang status hutan lindung dan hutan wisata alam serta menetapkan kawasan hutan lindung baru. Dengan demikian tetap diperoleh persediaan kawasan hutan lindung yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan di Kota Batam.

Disamping itu, dalam sinkronisasi penataan ruang kota perlu segera ditindaklanjuti. Konsistensi pemanfaatan ruang merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani, mengingat Kota Batam memiliki berbagai keterbatasan antara lain persediaan air bersih dan sumber daya alam. Untuk menjaga agar sumber daya yang tersedia dapat menjamin kebutuhan hidup, maka masyarakat memiliki peran memantau dan memberikan pertimbangan, sehingga efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang bagi kepentingan masyarakat dapat terwujud.

F Perencanaan Pembangunan

Esensi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus disusun secara partisipatif dan mengoptimalkan kepentingan masyarakat. Hal ini juga sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa tujuan sistem penyusunan perencanaan pembangunan nasional adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi & sinergi antar daerah, antarruang, antarmasa, antarfungsi pemerintah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk itu perencanaan ke depan harus merupakan perencanaan partisipatif sehingga diperoleh hasil perencanaan pembangunan yang memenuhi kriteria stabil, solid, kompeten, akuntabel, bertanggungjawab, efisien dan logis serta memiliki dasar

pemikiran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata kepentingan pihak eksekutif atau legislatif.

G Perumahan

Perkembangan Kota Batam yang begitu pesat dengan segala daya tariknya mengakibatkan migrasi ke kota ini semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan perumahan sebagai tempat tinggal. Meningkatnya pembangunan kompleks perumahan dan pemukiman di Kota Batam mengidentifikasikan besarnya kebutuhan penduduk akan perumahan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang perumahan adalah masih adanya sampai saat ini bangunan-bangunan perumahan yang berada diluar kawasan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Kota Batam tahun 2004-2014, dimana perumahan-perumahan dibangun secara illegal dikawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga tidak didukung oleh sistem administrasi pertanahan. Pada umumnya rumah-rumah tersebut (*illegal housing*) dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tentunya tidak layak ditinjau dari aspek sosial maupun lingkungan.

Selain itu, timbulnya permukiman bermasalah ini antara lain diakibatkan oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat, usaha swasta dan pemerintah untuk peningkatan penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Dampak dari berkembangnya permukiman ini menjadikan Kota Batam mengalami kesemerawutan, rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban serta banjir pada beberapa wilayah.

Pemerintah Kota Batam dan didukung oleh instansi terkait lainnya telah mengembangkan pendekatan perumahan murah yang layak khususnya dalam bentuk rumah susun, dimana sampai saat ini telah terbangun sekitar 60 *twin block* atau berjumlah 5.552 unit dengan berbagai ragam tipe dengan kapasitas hunian 22.200.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan agar terwujud Kota Batam tanpa permukiman bermasalah maka harus melakukan reformasi yang berkaitan dengan perizinan, perpajakan, retribusi sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Hal lain juga yang harus dilakukan adalah melalui subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu melalui penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah dengan memberikan fasilitas kredit perumahan.

H Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan asset bangsa yang perlu diberikan ruang untuk melakukan pengembangan diri sehingga memiliki daya

saing dan kompetensi di berbagai bidang pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan semakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang meluas di kalangan masyarakat. Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penyiapan sarana dan prasarana kepemudaan di samping fungsi pembinaan organisasi kepemudaan. Hal ini secara bertahap terus dilakukan pembinaan menuju kemandirian melalui pelatihan kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan.

Dalam hal olah raga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dapat terwujud dengan pelibatan semua pihak. Peran pemerintah menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan, pembinaan yang berkelanjutan khususnya olah raga prestasi. Pemerintah juga mendorong agar *stake holder* lain secara aktif dapat mendukung perkembangan dunia olah raga untuk mengejar prestasi. Keterbatasan yang dihadapi dalam bidang olah raga adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kepemudaan. Di samping itu juga belum maksimalnya peran, fungsi dan pembinaan organisasi kepemudaan serta usaha-usaha yang mengarah kepada kemajuan dan pencapaian prestasi dibidang olahraga.

I Penanaman Modal

Perkembangan dunia investasi di Kota Batam terus meningkat dari tahun 2000 hingga tahun 2011. Investasi asing dalam bentuk PMA mendominasi struktur investasi di Batam sepanjang selang waktu 2000-2012. Dari analisa korelatif untuk PMA disimpulkan bahwa aktivitas investasi di Batam sangat tergantung dengan tingkat pertumbuhan investasi di Singapura dibandingkan daripada pengaruh tingkat investasi di Indonesia. Rencana investasi PMA dari tahun ke tahun meningkat nilai investasinya, dimana pada tahun 2000 sekitar 138,89 juta USS dan pada tahun 2012 menjadi 551,46 juta USS.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kemudahan berinvestasi, maka telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Batam guna memberikan percepatan pelayanan perizinan tepat waktu, yang didukung dengan sarana dan prasarana *Information Technology (IT)*.

Pada tahun 2012 pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam berjumlah 1102 perizinan dari berbagai jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam. Sedangkan perizinan yang dilakukan oleh BP Batam adalah perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap.

J Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keberpihakan pemerintah terhadap Koperasi dan UKM masih sangat diperlukan, agar Koperasi dan UKM mampu menjadi pelaku ekonomi yang utama dan mampu meningkatkan daya

saing, sehingga dapat memberikan perluasan kesempatan kerja. UKM hingga saat ini terbukti dapat menjadi pondasi perekonomian. Hal ini terlihat ketika krisis ekonomi terjadi. Perekonomian tetap berjalan karena masyarakat melakukan shifting/perpindahan usaha dan mempunyai kemampuan adaptif terhadap iklim dan mekanisme pasar yang berlaku.

Pengembangan UKM merupakan faktor penting mengingat besarnya ketergantungan pekerja di Kota Batam terhadap pengusaha besar di sektor industri. Apabila terjadi relokasi industri keluar dari Batam atau terjadi pelarian modal (*capital outflow*) dari pengusaha besar, maka Batam akan menghadapi masalah pengangguran yang pelik terlebih jika mereka tidak mampu mengembangkan usaha sendiri. Di sinilah letak pentingnya UKM, disamping potensi ekonominya, daya tahan UKM terhadap krisis juga terlihat dari kapasitasnya sebagai alternatif bidang usaha rakyat di dalam menghadapi krisis.

Persoalan utama di dalam mengembangkan usaha kecil menengah antara lain adalah masalah modal. Kemitraan antara pemerintah dan pengusaha kecil menengah mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan modal ini. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah kemampuan wirausaha. Tanpa kemampuan wirausaha, maka pengembangan usaha kecil menengah hanya akan menjadi pemborosan karena kemungkinan pengusaha menjadi tidak efisien dan merugi akan membesar.

Di samping UKM, bentuk usaha ekonomi yang juga perlu diperhatikan adalah koperasi. Pemberdayaan koperasi penting untuk menciptakan keadilan dalam menjalankan roda perekonomian. Koperasi memberikan hak yang sama kepada setiap anggota sesuai dengan jasa dan aktivitasnya di Koperasi. Bentuk keberpihakan Pemerintah Kota Batam dalam mendukung sisi pendanaan adalah penyiapan dana bergulir melalui APBD Kota Batam, dimana sampai tahun 2012 telah disalurkan dana sebesar 24,645 milyar rupiah.

K Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan kependudukan Kota Batam antara lain tingginya tingkat pertumbuhan penduduk pertahun di Kota Batam sebagai akibat tingginya arus migrasi yang masuk ke Batam dan adanya *trend* kenaikan tingkat kelahiran bayi. Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam yang direvisi dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Batam. Dalam Perda ini antara lain mengatur persyaratan orang untuk bisa masuk ke Batam.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Batam telah mengembangkan SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan membangun *Database* Kependudukan Kota Batam. Dari sisi pelayanan, penerapan program SIAK juga bertujuan

untuk memantapkan kualitas pelayanan dasar di bidang pemerintahan, yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah. Program ini telah diimplementasikan secara *online* pada 12 kecamatan. Pada tahun 2012 KTP SIAK ini mulai diganti dengan sistem e-KTP sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk Kota Batam ditargetkan sebanyak 707.430 jiwa hingga akhir Desember 2012 telah terealisasi 571.313.

Pada tahun-tahun mendatang tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki dari berbagai parameter kependudukan adalah menurunnya angka kelahiran, meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Disamping itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara daerah *mainland* dan *hinterland*.

Dalam hal catatan sipil, partisipasi masyarakat yang aktif melaporkan status sipil yang dicatatkan hanya sebagian besar pada sisi kelahiran dimana pada tahun 2011 kelahiran tercatat sebesar 28.961 jiwa. Sedangkan untuk status kematian yang dilaporkan oleh masyarakat cukup memprihatinkan dimana hanya tercatat sebanyak 165 jiwa. Status sipil lainnya yaitu perkawinan dan perceraian pada 2011 masing - masing sebanyak 2.064 pasang dan 59 kasus.

Tantangan ke depan dibidang catatan sipil adalah memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan perubahan status sipil sehingga perhitungan data penduduk menjadi lebih akurat dalam proses pembangunan Kota Batam baik di bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.

L Ketenagakerjaan

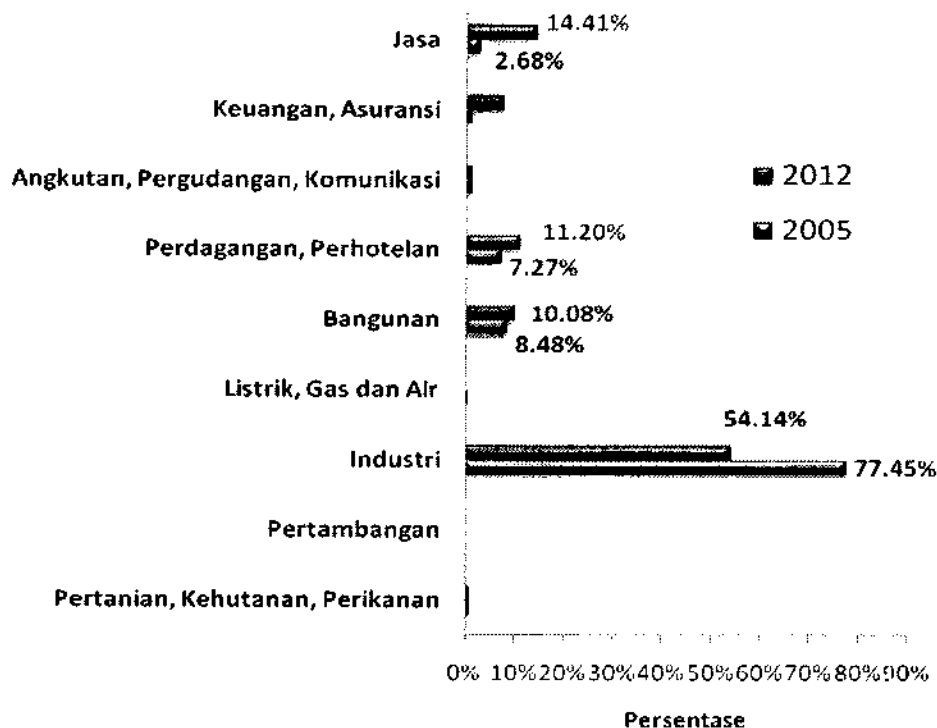
Pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja di Kota Batam sebesar 224.379 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 336.562 jiwa. Sedangkan jumlah perusahaan yang terdaftar menurut sektor ekonomi pada Tahun 2005 berjumlah sebesar 2.568 perusahaan dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 5.328 perusahaan. Umumnya didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri.

Komposisi ketenagakerjaan di Kota Batam sangat didominasi oleh sektor industri. Namun bila dilihat selama periode 2005-2012, proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor industri cenderung mengalami penurunan. Bila pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor industri sebesar

77.45% dari keseluruhan tenaga kerja, maka pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 54.14%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran besaran orientasi ketenagakerjaan Kota Batam, walaupun secara umum sektor industri masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja.

Sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa merupakan sektor yang mengalami kenaikan yang relatif besar selama periode 2005-2012. Bila pada tahun 2005 sektor bangunan hanya memberikan kontribusi sebesar 8,48% dari keseluruhan tenaga kerja, maka pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.08%. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di Kota Batam mengalami akselerasi yang besar, sehingga kebutuhan tenaga kerja di sektor ini pun menjadi tinggi.

Gambar II-7
Perubahan Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja
Kota Batam Tahun 2005 dan 2012



Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami peningkatan kontribusi tenaga kerja yang tinggi. Bila pada tahun 2005 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 7.27% saja, maka pada tahun 2012 telah mencapai 11,20%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran di masa depan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar lagi, terutama dikaitkan dengan perkembangan aktivitas ekonomi Kota Batam dan kepariwisataannya yang semakin tinggi. Sektor jasa pun mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2012 telah dapat memberikan kontribusi sebesar 14.41%.

Kendala dalam ketenagakerjaan Kota Batam salah satunya adalah perekrutan tenaga kerja dengan mendatangkan dari luar, padahal SDM Batam sebenarnya cukup bisa dikembangkan

untuk tenaga kerja terlatih. Hal ini menjadi tantangan kedepan untuk merekrut tenaga kerja lokal melalui peningkatan pelatihan dan peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK). Berkenaan hal tersebut, peningkatan sarana dan parasarana serta kualitas BLK menjadi mutlak keberadaannya, apalagi saat ini aturan mengenai *outsourcing* telah diterbitkan sehingga penyiapan tenaga kerja lokal berkualitas sangat penting. Kondisi ini yang menjadi strategi dalam menekan migrasi ke Kota Batam.

Permasalahan lain yang ditemui dibidang ketenagakerjaan oleh para investor baik PMA maupun PMDN yang menanamkan modalnya di Batam adalah permasalahan perburuhan dan tenaga kerja *outsourcing*. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Permenakertrans No 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, diharapkan permasalahan perburuhan dan *outsourcing* di Kota Batam dapat diminimalisir.

M Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan anak tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, selain itu juga terlihat dari perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan.

Selama ini peningkatan peran perempuan telah dilakukan melalui peningkatan kelembagaan masyarakat terutama di organisasi-organisasi perempuan, salah satunya adalah peningkatan keterlibatan dalam proses politik. Selain itu juga dilakukan melalui peningkatan peran kelembagaan perempuan dan jaringan pengarusutamaan gender. Hal ini sangat berguna mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dalam menjaga komitmen terhadap pemberdayaan perempuan di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam serius mengimplementasikan secara konsisten Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Dalam hal ini telah disusun strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Sebagai tindaklanjut dari Permendagri ini Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Batam dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kota Batam melalui sisi perencanaan anggaran dengan Anggaran yang Responsive Gender (ARG).

Dalam hal gender tantangan yang dihadapi ke depan adalah menekan kegiatan *trafficking* dengan memanfaatkan posisi strategis wilayah Kota Batam yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Di samping itu meminimalisir permasalahan umum gender yang sering dihadapi selama ini yaitu kesenjangan gender dalam hal diskriminasi perempuan terhadap akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan. Selain itu permasalahan pengetahuan dan wawasan budaya terkait dengan membentuk pola pikir dan perilaku perempuan dihambat untuk tidak maju.

N Perhubungan

Secara umum sistem pelayanan transportasi di Batam diarahkan kepada *integrated* moda, dimana perpaduan antar moda udara dengan moda darat dan antar moda laut dengan moda darat harus dikembangkan, sehingga aksesibilitas pelayanan transportasi akan menjadi lebih nyaman dan aman.

Untuk transportasi darat, dengan perkembangan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya meningkat. Sementara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengangkutan belum memadai yang terlihat dari sering terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu terutama pada jam kerja. Kendala dalam transportasi darat Kota Batam lainnya ialah belum optimalnya penanganan sistem angkutan umum, kondisi jalan yang kurang baik, manajemen lalu lintas dan fasilitas lalu lintas jalan yang belum memadai. Ke depan pembangunan sarana transportasi darat, khususnya pengangkutan di Kota Batam sebaiknya fokus pada pembangunan sistem angkutan umum masal yang handal dan cepat (*Mass Rapid Transportation*), pengelolaan dan pengendalian sistem yang baik, yang akhirnya dapat menekan kemacetan lalu lintas.

Sedangkan untuk transportasi laut, kendala kondisi saat ini ialah minimnya, baik aksesibilitas maupun sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat menjangkau kehidupan masyarakat nelayan, khususnya di pulau-pulau kecil diperairan Kota Batam. Peran armada laut sebagai penghubung *mainland* dengan *hinterland*, maupun dengan daerah luar Kota Batam mempunyai peran yang penting, baik untuk pengangkutan domestik maupun internasional. Ini terlihat dari betapa pesatnya aktivitas transportasi laut di sekitar pelabuhan, mulai dari pelabuhan rakyat, pelabuhan domestik, maupun pelabuhan internasional. Mengingat Batam merupakan wilayah kepulauan, maka sangat diperlukan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat menjawab tuntutan akan jasa transportasi, termasuk didalamnya adalah penataan dan manajemen pengelolaan kepelabuhanan yang profesional.

Pengembangan dan peningkatan fasilitas lalu lintas laut yang moderen berupa pembangunan pelabuhan dan fasilitas penunjang keselamatan pelayaran berguna untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi laut, baik yang melayani pelayaran internasional, antar propinsi, maupun antar pulau. Di samping

itu, upaya untuk meningkatkan mobilitas masyarakat *hinterland* perlu di fasilitasi dengan pembangunan pelabuhan rakyat dan pengembangan pelayaran perintis dan peningkatan keselamatan di jalur lalu lintas laut dengan membangun fasilitas navigasi, sehingga dapat tercipta percepatan perekonomian di daerah tersebut.

Sarana dan prasarana laut tetap menjadi ciri khas Kota Batam karena kota ini merupakan kota yang berada di jalur laut internasional. Disamping letak yang strategis, Batam yang terdiri dari berbagai pulau, sudah selayaknya transportasi laut memegang peranan penting demi meningkatkan mobilitas masyarakat dan membangun aksesibilitas antar wilayah kepulauan. Oleh karena itu, pembangunan transportasi laut diarahkan pada peningkatan dan penambahan prasarana pelabuhan termasuk pembangunan pelabuhan rakyat, sekaligus perbaikan manajemen kepelabuhanan. Disamping untuk percepatan pembangunan, dikembangkan juga pelayaran perintis dan peningkatan keselamatan di jalur lalu lintas laut dengan membangun fasilitas navigasi.

Untuk angkutan udara, perusahaan udara relatif mampu menyediakan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya frekuensi penerbangan, jumlah pesawat udara dan penumpang yang datang/berangkat yang terus mengalami peningkatan.

Tantangan yang dihadapi di bidang transportasi di masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi efisien dan efektif, terjangkau dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya, serta mendukung kesatuan transportasi antara kawasan mainland dan hinterland.

O Komunikasi dan Informatika

Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing daerah. Perkembangan sarana dan prasarana telekomunikasi telah berkembang cukup baik di Kota Batam. Namun, masalah yang masih ditemui adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan serta kualitas yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Batam yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi terutama di daerah pesisir dan *hinterland*, sehingga kondisi ini menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital antara wilayah mainland dan hinterland.

Di sisi lain penyelenggara layanan sarana dan prasarana telematika dan kesenjangan digital dihadapkan kepada masih terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang baru terbatas. Di samping itu kemampuan masyarakat memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika masih rendah disebabkan oleh terbatasnya daya beli masyarakat,

masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi atau sebagai nilai tambah ekonomi.

Fasilitas yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika yang ada di Kota Batam saat ini dilayani oleh penyedia menara sebanyak 459 menara dari berbagai operator yang berada di wilayah mainland dan sebanyak 39 menara di wilayah hinterland. Dalam rangka penataan menara telekomunikasi telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam dengan maksud pembangunan menara ke depan disinergikan dengan ketersediaan ruang di Kota Batam serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi sehingga tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pembangunan menara telekomunikasi.

Sampai saat ini tantangan yang dihadapi adalah pada beberapa wilayah masih belum terjangkau oleh fasilitas pelayanan operator telekomunikasi dan bahkan pada wilayah-wilayah tertentu yang sudah mendapat jangkauan telekomunikasi tetapi masih mengalami gangguan/*roaming* dari operator luar negeri yaitu dari Singapura dan Malaysia. Pada masa mendatang tantangan utama yang dihadapi dalam sektor ini adalah meningkatnya penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral.

P Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Batam merupakan kota yang memiliki komposisi masyarakat yang sangat komplis dari Etnis Aceh sampai Etnis Papua. Secara teoritis, masyarakat yang multikultur seperti ini membuat Kota Batam memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang lebih mudah menerima pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang cenderung homogen. Sifat keterbukaan dan penerimaan atas perbedaan serta nilai toleransi akan cenderung semakin baik. Namun demikian, kenyataan akan kemungkinan terjadinya konflik antar suku tetap saja terbuka, terutama apabila terjadi kesenjangan ekonomi.

Kerukunan umat beragama merupakan syarat penting dalam menilai sejauh mana kehidupan masyarakat Kota Batam memahami perbedaan. Salah satu indikator terciptanya kerukunan beragama adalah terciptanya toleransi antar umat beragama. Hal ini akan terwujud apabila setiap pemeluk agama menyadari bahwa agama adalah sebuah faktor vital yang mencerminkan egoisme tertinggi seorang manusia sehingga tidak bisa diganggu (merupakan hak individu seseorang).

Kebebasan beragama dan beribadah harus dihormati oleh setiap pemeluk agama yang berbeda-beda. Di sisi lain, ketegasan

Pemerintah terhadap ancaman keharmonisan beragama juga harus diperhatikan. Perkembangan aliran-aliran kepercayaan yang sesat atau menyesatkan umat harus diantisipasi oleh sikap tegas pemerintah untuk mengatur keharmonisan tersebut.

Pluralitas masyarakat ini telah ikut mewarnai dinamika kehidupan dalam memajukan pembangunan di Kota Batam. Hal ini perlu tetap dijaga dalam tantangan kehidupan sosial untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Kondisi ini juga sangat diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif dalam berinvestasi di Kota Batam.

Dalam hal politik, reformasi telah memberikan manfaat positif bagi pemerintah daerah karena wewenang pemerintah daerah menjadi lebih luas untuk meningkatkan sisi penerimaan daerah seperti pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah semakin memiliki kewenangan untuk merancang anggaran dan mengalokasikannya. Di dalam menunaikan tugas ini dengan benar, pemerintah daerah mendapat pengawasan dari masyarakat lewat lembaga perwakilannya sementara DPRD diawasi oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Proses perkembangan kehidupan berpolitik di Batam semakin berkembang menjadi lebih demokratis. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya perubahan kehidupan berpolitik itu sendiri di tanah air. Saat ini sistem politik yang tercipta adalah sistem politik dengan asas demokrasi langsung. Sedangkan pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil di Kota Batam merupakan komponen strategis dalam rangka memobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian-bagiannya, dan untuk menyampaikan kepada para pemegang kekuasaan atau wakil wakil partai politik. Sistem politik seperti ini menempatkan rakyat Batam semakin berdaulat di daerahnya sendiri untuk menentukan kepala daerah yang berkualitas dan bermoral.

Q Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

• Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa serangkaian perubahan dalam sistem, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang juga membawa akibat pada desentralisasi fiskal telah membuka kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penyusunan APBD, pelaksanaan pembangunan hingga pengawasan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

Otonomi telah memberikan manfaat positif seperti perluasan kapasitas pendapatan asli daerah dan kewenangan pemerintah dalam merancang anggaran dan mengalokasikannya. Namun disisi lain, otonomi daerah juga dapat berdampak negatif yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Batam dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik minat investor berinvestasi di Kota Batam.

- **Birokrasi**

Globalisasi menciptakan revolusi teknologi dan sistem informasi yang secara langsung akan mempengaruhi dan menuntut peningkatan kinerja aparat negara dan sistem informasi pelayanan publik dari pemerintah. Salah satu tuntutan globalisasi adalah penguasaan atas Informasi dan Teknologi (IPTEK) yang didukung oleh SDM berkualitas.

Aparatur pemerintah perlu mempersiapkan sistem pelayanan pemerintah yang profesional melalui peningkatan sistem informasi dan *database* yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sistem tersebut harus memiliki karakter akurat, handal (*reliable*) dan variatif, serta mampu memenuhi kepentingan masyarakat dan pengusaha. Permasalahan di Kota Batam sampai dengan saat ini adalah perlunya peningkatan penguasaan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan yang berorientasi pada *Clean Government and Good Governance*.

Tantangan birokrasi ke depan adalah kesiapan aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Di samping itu dalam menyikapi era globalisasi dan revolusi teknologi dan informasi memerlukan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dalam *bentuk e-government, e-procurement, e-business* dan *cyber law*. Hal ini diperlukan dalam rangka menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah selain itu juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.

- **Manajemen Pemerintah**

Manajemen pemerintah di dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara kualitas. Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun masih terbatas. Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai mandat UUD 1945, belum dapat diberikan secara penuh. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah Batam di dalam memberikan pelayanan publik yang profesional untuk masyarakat dan pihak swasta mutlak diperlukan, salah satu ukuran profesionalitas adalah kemampuan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, akurat dan murah.

- **Dualisme Kewenangan**

Adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (Otorita Batam) yang terjadi sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; penyelenggaraan sebagian tugas, kewenangan dan fungsi yang selama ini dilakukan Badan Pengusahaan Batam telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam. Fenomena ini di lapangan menimbulkan kesan dualisme kewenangan. Dampak dari kondisi ini memberikan efek ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Kota Batam.

Untuk itu sosialisasi, publikasi kepada masyarakat dan dunia usaha perlu dilakukan agar tafsiran dualisme kewenangan ini menjadi motor penggerak pembangunan di Kota Batam. Namun demikian koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara konsisten perlu dilakukan dengan pola komunikasi yang kondusif, sehingga diharapkan sinergisitas antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dapat terjalin dengan baik agar pembangunan di Batam dapat berjalan lebih optimal.

R Sosial

Pesatnya proses industrialisasi yang terjadi di Kota Batam di samping memberikan manfaat kemajuan dalam pembangunan, juga berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial antara lain adalah adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan prostitusi. Di samping itu, letak Kota Batam secara geografis yang berdekatan dengan negara tetangga juga menimbulkan permasalahan antara lain dijadikannya Kota Batam sebagai salah satu daerah transit kegiatan *trafficking*, transaksi narkoba, penyelundupan dan lain-lain.

Untuk itu peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batam yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya antara lain upaya pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pecandu narkoba dan obat-obat terlarang. Namun demikian tantangan ke depan yang menjadi perhatian adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, menurunkan akses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam, dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.

2.3.2. Fokus Urusan Pelayanan Pilihan

A Kelautan dan Perikanan

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah sumber daya kelautan dan perikanan. Bidang kelautan dan perikanan harus dipersiapkan sebagai tumpuan masa depan, karena Kota Batam merupakan salah satu daerah pesisir dan laut dengan jumlah pulau sekitar 400 pulau dimana 329 pulau telah bernama dan luas wilayah laut berkisar 295.156,78 Ha. Ini merupakan potensi sumber daya laut dan perikanan yang besar dan perlu dikembangkan.

Dari aspek potensi sumber daya perikanan tangkap, terdapat kecenderungan mengalami proses kelebihan tangkap (*overfishing*). Namun demikian, daerah penangkapan (*fishing ground*), utama yang menjadi basis utama penangkapan ikan telah diarahkan pada perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, sekaligus sebagai pintu gerbang pemasaran hasil produksi tangkapan. Dari sisi perikanan budidaya laut, perikanan payau, industri perikanan dan jasa perikanan lainnya, lokasi Kota Batam masih cukup layak untuk dikembangkan secara potensial, karena mampu mengakses peluang pasar internasional dan sekaligus lumbung perikanan budidaya internasional.

Potensi lahan dan jenis budidaya laut dan payau sudah cukup berkembang di sekitar wilayah *hinterlands*, namun identifikasi luas lahan peruntukan dan kesesuaian jenis komoditas budidaya, belum tepat tempat, tepat jenis dan tepat teknologi. Biaya budidaya ikan laut masih sangat tinggi karena adanya penggunaan teknologi yang tidak sederhana, sedangkan budidaya rumput laut diperkirakan lokasi yang masih cocok cukup jauh jarak aksesibilitasnya. Jenis komoditas budidaya laut yang telah diusahakan adalah jenis ikan kerapu, kakap putih, kakap merah, bawal bintang, udang, kepiting, dan rumput laut, meskipun masih sering ditemui kendala pengembangannya. Kendala yang umum dihadapi adalah kuantitas benih dan bibit yang harus didatangkan dari luar daerah, ketersediaan pakan segar dan pakan pelet yang cukup mahal. Untuk pemasaran hasil produksi cenderung diekspor ke luar negeri, sedangkan untuk kebutuhan dan pasokan pasar lokal hanya dalam bentuk jenis ikan karang (*demersal*) dan ikan hasil tangkapan segar lainnya.³

Beberapa permasalahan terkait dengan kelautan dan perikanan berkaitan erat dengan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain yaitu:

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan.
- Potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemangku kepentingan.
- Rendahnya tingkat kesejahteraan serta pencaharian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

³Laporan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Batam

- Keterbatasan pemanfaatan potensi sumber daya kemaritiman.
- Lemahnya penegakkan hukum dalam pengelolaan SDA
- Kenaikan muka air laut (*seawater level rise*) akibat pemanasan global.
- Ancaman kehilangan luasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Tingkat kerusakan biofisik lingkungan wilayah pesisir yang semakin mengkhawatirkan.
- Belum banyaknya dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

B Pertanian

Berbagai kendala di sektor pertanian antara lain, mahalnya biaya pengelolaan lahan, rendahnya tingkat kesuburan lahan, rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan, terbatasnya modal usaha petani, serta ketidakpastian status lahan yang diusahakan di daerah *bounded*.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan di Kota Batam relatif sedikit. Tercatat pada tahun 2009 hanya terdapat 5.083 penduduk (kurang dari 2% dari total keseluruhan tenaga kerja) yang menggantungkan mata pencaharian di sektor ini. Jenis tanaman yang ditanami di wilayah Kota Batam antara lain tanaman palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Disisi lain, kegiatan peternakan Kota Batam juga masih menghadapi beberapa kendala antara lain; masih rendahnya tingkat keterampilan, terbatasnya tenaga profesional seperti dokter hewan, tidak tersedianya bibit unggul yang tahan terhadap penyakit, tingginya harga pakan ternak, terbatasnya lahan peternakan. Walaupun begitu, saat ini terdapat banyak hewan ternak yang ada di Kota Batam akibat dari peluang yang ditangkap oleh pelaku-pelaku usaha di bidang peternakan yang melihat kebutuhan Kota Batam di bidang penyediaan daging hewan potong cukup prospektif di mana setiap tahunnya semakin meningkat.

Di sisi lain, mengingat letak strategis Kota Batam yang berdekatan dengan negara tetangga sangat mudah dimasuki oleh berbagai produk impor dan ini menuntut pentingnya fungsi kontrol dan pengawasan terhadap produk impor tersebut.

C Kehutanan

Sejak awal pembangunan Batam telah disusun Rencana Tata Ruang, yang pada masa itu dikenal dengan sebutan *Master Plan* sebagai pedoman arahan peruntukan ruang dalam pembangunan yang memuat pengaturan peruntukan ruang bagi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Salah satu peruntukan kawasan lindung adalah kawasan hutan.

Ketentuan yang mengatur tentang kawasan hutan di Kota Batam, dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang

Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau, dimana pada saat itu Kota Batam masih merupakan bagian dari Provinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Riau tersebut kawasan hutan yang ada di Kota Batam adalah seluas 75.340 Ha atau 73% dari luas daratan Kota Batam yang terdiri dari 44.803 Ha berupa Kawasan Hutan Tetap dan 30.537 Ha Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).

Dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan Pulau Batam, maka pada Tahun 1987 dilakukan penunjukan kawasan hutan di Pulau Batam dengan SK Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kodya Batam. Untuk memperjelas dan mempertegas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau, sejak tahun 2009 telah dilakukan proses paduserasi kawasan hutan antara kawasan hutan yang ditetapkan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Kawasan Hutan yang ada dalam Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Terpadu maka usulan perubahan kawasan hutan di Kota Batam, menjadi seluas 38.338 Ha atau 37,24% dari luas daratan Kota Batam yang terdiri dari 34.207 Ha berupa Kawasan Hutan Tetap dan 4.131 Ha HPK. Namun demikian penetapan luasan definitif kawasan Hutan Kota Batam masih menunggu ketetapan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Permasalahan yang terjadi dalam kawasan hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktek perambahan hutan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas kehidupan antara lain untuk kegiatan pertanian, peternakan, hortikultura, rumah tempat tinggal dan perladangan. Di samping itu meningkat juga tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya. Hal ini berdampak terhadap rusaknya lingkungan kawasan hutan terutama pada daerah catchman area untuk pengamanan waduk sebagai sumber air bersih untuk masyarakat Kota Batam, selain itu rusaknya keaslian lingkungan kota.

D Energi

Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam, Rempang dan Galang. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PLN Persero Cabang Tanjung Pinang.

Sejalan dengan perkembangan Kota Batam yang pesat sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan alih kapal tentunya kebutuhan akan tenaga listrik semakin

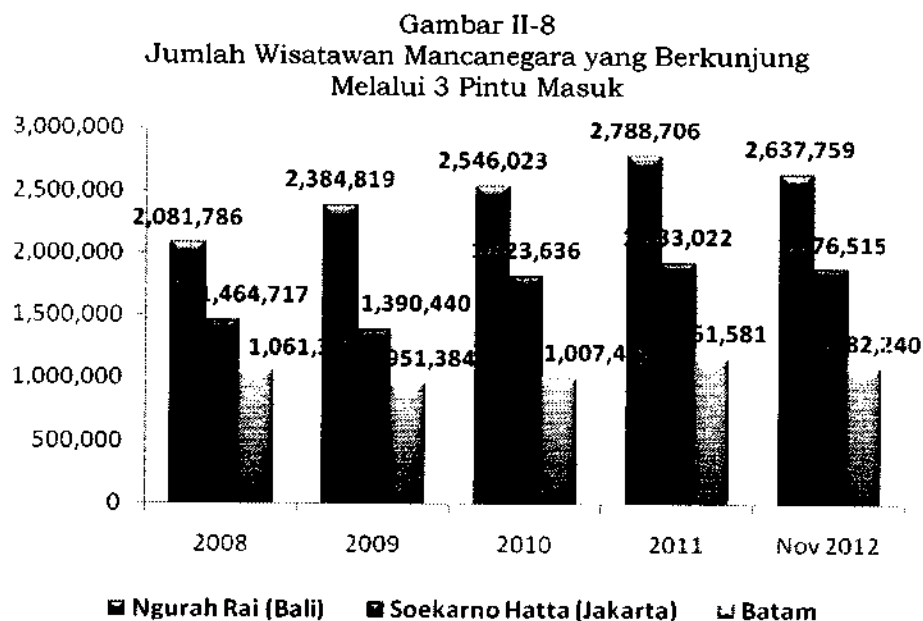
meningkat. Untuk itu, maka perlu diantisipasi kapasitas penyediaan kebutuhan listrik yang cukup bagi masyarakat.

Permasalahan pokok yang dihadapi antara lain masih adanya kesenjangan antara daerah mainland dan hinterland terhadap ketersediaan ketenagalistrikan. Sampai saat ini pemenuhan kelistrikan di daerah hinterland melalui bantuan *Solar Home System (SHS)* dan bantuan genset diesel yang dikelola oleh koperasi.

Pada masa mendatang tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pasokan energi, sarana dan prasarana serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik termasuk masalah kebijakan tarif lokal. Di samping itu lokasi sumber daya energi yang potensial berada di luar Kota Batam, sehingga pengembangannya terbatas hanya untuk menyalurkan energi dari lokasi sumber daya ke pusat permintaan energi.

E Pariwisata

Perkembangan Kota Batam sebagai sebuah daerah industri telah memberikan efek mutiplier bagi sektor lainnya. Salah satu sektor yang berkembang ini adalah sektor pariwisata. Hingga saat ini, Kota Batam mampu secara kontinyu menjadi kota ke 3 penyumbang wisatawan asing terbesar di Indonesia. Penyumbang wisatawan terbesar pertama ialah Bandara Ngurah Rai Bali dan yang kedua ialah Bandara Soekarno-Hatta. Gambaran wisatawan mancanegara yang berkunjung melalui 3 pintu masuk termasuk Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Kantor Imigrasi Kota Batam

Saat ini Kota Batam sudah menjadi salah satu Kota Wisata Konvensi atau *Meeting Intensive Tour Conference Exhibition (MICE)* di Indonesia. Selain itu, Kota Batam juga berpotensi sebagai Kota Wisata Budaya karena selama ini telah mempunyai

agenda tahunan *event-event* Kebudayaan antara lain seperti Kenduri Seni Melayu, Parade Tari Daerah, Lomba *Sea Eagle Boat*, Pesta Budaya Masyarakat Pesisir, dan lain-lain.

Sebagai upaya menjadikan Kota Batam sebagai tujuan wisata maka pada tahun 2010 telah dicanangkan program *Visit Batam 2010*. Melalui *Visit Batam 2010* diharapkan terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Batam. Hal ini didukung dengan misi Kota Batam ingin menjadikan Batam sebagai pintu gerbang destinasi wisman di Indonesia bagian barat. Fasilitas Batam sebagai kota pariwisata antara lain, menyajikan aneka bentuk sarana wisata yaitu wisata laut dan pantai, wisata seni dan budaya, wisata belanja, wisata ekonomi dan konferensi, serta wisata kemanusiaan. Di samping itu didukung dengan tersedianya fasilitas hotel dan resort dengan standar kelas internasional serta aneka peristiwa yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisata Kota Batam, sehingga diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berkunjung ke Kota Batam. Untuk itu agar kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan maka sangat diperlukan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif serta peningkatan kualitas pelayanan baik di bidang jasa maupun pelayanan publik.

Kedekatan wilayah Kota Batam dengan Negara Singapura dan Malaysia merupakan salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisman yang datang ke daerah ini, di mana sebagian besar wisman yang datang berasal dari warga Singapura dan Malaysia. Perbandingan jumlah wisman yang berkunjung ke Kota Batam menurut kebangsaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-5
Perbandingan Jumlah Wisman yang Berkunjung ke Kota Batam
Menurut Kebangsaan, Tahun 2009-2012

No	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	2009	2010	2011	2012
1	Singapura	645.033	646.106	611.270	606.3126
2	Jepang	26.209	24.015	17.627	19.306
3	Malaysia	148.967	153.172	137.484	148.167
4	Australia	11.274	10.601	8.766	9.417
5	Taiwan	3.86	3.63	3.286	3.521
6	Korea Selatan	28.41	42.865	44.527	48.843
7	Amerika Serikat	11.713	11.057	9.291	10.430
8	Inggris	18.009	17.393	12.657	13.413
9	Lainnya	126.665	131.126	186.515	222.817
	Jumlah	1.020.140	1.039.965	1,031,423	1,082,240

Sumber : Kantor Imigrasi Kota Batam

F Industri

Industri manufaktur merupakan sektor yang paling dominan di dalam struktur ekonomi Kota Batam. Tercatat pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja perusahaan besar dan sedang industri pengolahan ialah sebanyak 174,084 orang. Hal ini tidak terlepas dari status Kota Batam sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*). Keberadaan kegiatan industri di Batam

pada umumnya berada pada suatu kawasan industri, dimana saat ini berjumlah sekitar 22 kawasan industri.

Namun demikian tantangan ke depan yang dihadapi adalah masih adanya beberapa kawasan industri belum optimal pemanfaatannya untuk kegiatan investasi, sehingga ke depan harus perlu dilakukan promosi investasi bagi kawasan-kawasan industri untuk menarik minat investor menanamkan investasinya pada kawasan industri. Disamping itu yang harus diperhatikan adalah menjaga suasana kondusif sehingga para investor yang sudah berada di kawasan industri merasa nyaman dan kondusif sehingga melakukan relokasi investasi di luar kawasan industri Batam.

Adapun kegiatan industri di Batam meliputi industri manufaktur, industri elektronika, industri garment, industri plastik dan lainnya. Di samping itu ada juga kegiatan industri perkapalan dimana saat ini sangat signifikan perkembangannya dalam memberikan kontribusi pembangunan di Kota Batam terutama dalam hal ketenagakerjaan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan pembuatan kapal, reparasi kapal yang sebagian besar merupakan order dari luar negeri.

Kontribusi sektor industri dalam total perekonomian Kota Batam pada tahun 2011 mencapai 54.57%. Hal yang patut menjadi perhatian penting dalam dominasi industri pengolahan Kota Batam ialah bahwa pada umumnya industri pengolahan ini berada di area khusus (bukan industri rakyat kebanyakan) dan cenderung bersifat eksklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak positif keberadaan perusahaan industri pengolahan, tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, keterkaitan/hubungan antara industri kecil/lokal dan menengah/besar harus dioptimalkan agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Tantangan terhadap kegiatan-kegiatan industri dimasa depan yang harus jadi perhatian semua pihak adalah pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan industri yang dapat mengancam kehidupan flora dan fauna sebagai sumber kehidupan. Untuk itu ke depan orientasi pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum terbangun khususnya di Pulau Rempang dan di pulau lainnya sudah harus diarahkan kepada kegiatan *ecoindustri* dan *high-tech industry*.

G Perdagangan

Peranan sektor perdagangan di Kota Batam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun masih menempati urutan kedua terbesarnya setelah sektor industri dalam struktur perekonomian daerah Kota Batam, dimana pada tahun 2011 memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam sebesar 24,57%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pembangunan dilaksanakan telah sejalan dengan arah pengembangan Kota Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata.

Meningkatnya peranan sektor ini juga didukung oleh letak Kota Batam yang sangat strategis yaitu berada di jalur pelayaran internasional yang sibuk di dunia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Potensi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga sektor perdagangan ini di masa depan diharapkan menjadi sektor sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Batam.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kegiatan ekspor Kota Batam. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan nilai ekspor Batam pada tahun 2010 meningkat sebesar 47,40% di banding tahun 2009. Selama periode Januari - Desember 2011 neraca perdagangan luar negeri Kota Batam mengalami surplus sebesar US\$ 1.950,45 juta, sedangkan periode Januari-September 2012 surplus perdagangan luar negeri Batam baru mencapai US\$ 255,78 juta.

Untuk meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri Kota Batam di masa mendatang perlu ditingkatkan kerjasama yang bersinergi antara instansi yang terkait dalam memberikan pelayanan yang prima kepada investor maupun masyarakat pengusaha di daerah. Tantangan ke depan yang dihadapi adalah konsistensi peraturan dari Pemerintah Pusat terhadap kegiatan sektor perdagangan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, selain itu menghindari beda penafsiran antar instansi terkait terhadap peraturan pada kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Batam.

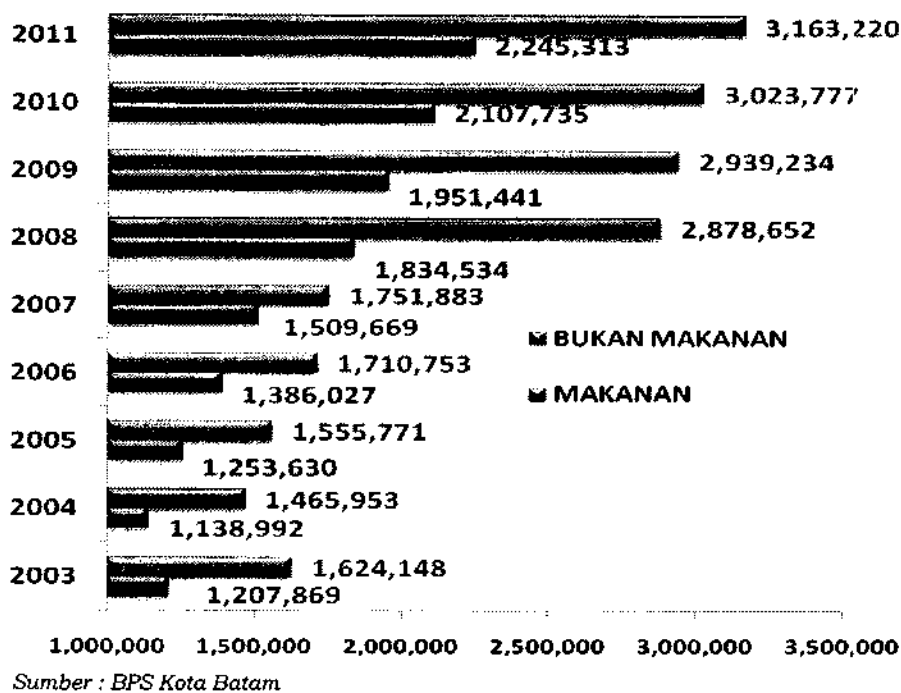
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

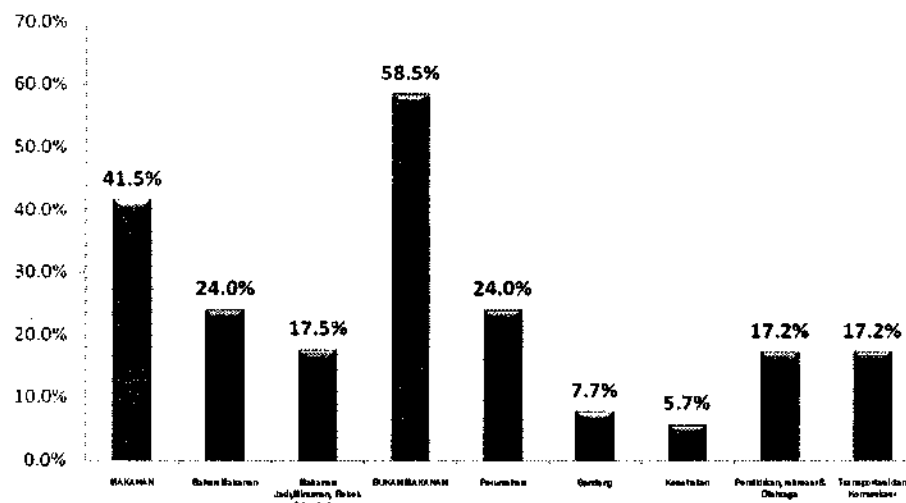
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT, maka mengindikasikan semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Rerata pengeluaran rumah tangga Kota Batam selama periode 2003-2011 makin meningkat. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi Kota Batam. Selain itu, komposisi pengeluaran bukan makanan juga makin besar, yang dapat menjadi indikasi kesejahteraan meningkat.

Gambar II-9
Perkembangan Rerata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan



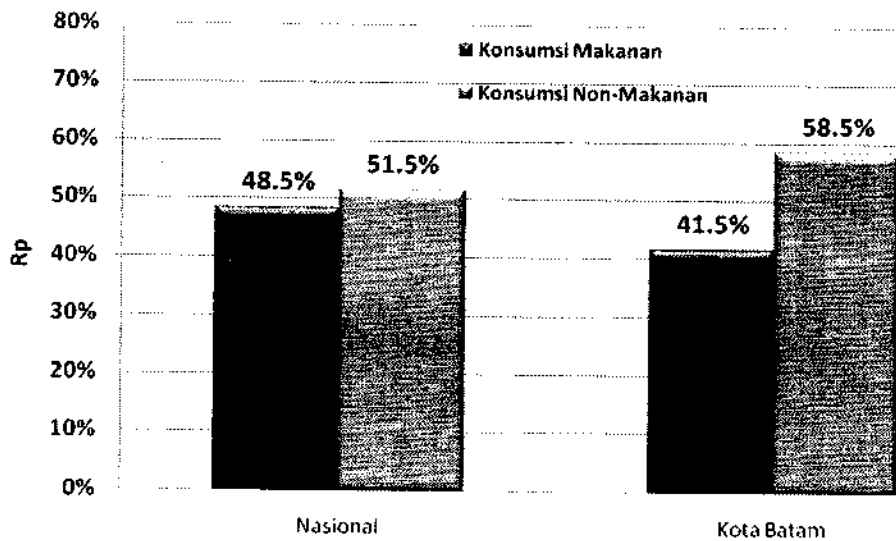
Berdasarkan fakta, jika dilihat proporsinya bahwa konsumsi untuk makanan pada tahun 2011 hanya mencapai 41,5% dari keseluruhan konsumsi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Batam telah relatif sejahtera karena sebagai besar konsumsi yang ada dialokasikan bagi konsumsi non-makanan (58,5%). Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Gambar II-10
Komposisi Rerata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam Tahun 2011



Dalam hal pola konsumsi, pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tingkat nasional maka pola proporsi konsumsi Kota Batam jauh lebih baik. Pada tingkat nasional konsumsi makanan dari masyarakat ialah sebesar 48,5% dari keseluruhan pengeluaran konsumsi yang ada dan sisanya sebesar 51,5% diperuntukkan bagi konsumsi non-makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Batam lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat nasional.

Gambar II-11
Perbandingan Komposisi Konsumsi di Kota Batam
dan Tingkat Nasional Tahun 2011



Sumber : BPS Kota Batam & BPS Pusat (Buku Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Agustus 2012)

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi kemajuan suatu daerah dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktifitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan wilayah. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama antar wilayah dan daerah. Sejak lama linfrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik terutama dengan perekonomian dunia (global). Faktor keempat elemen tersebut merupakan rangkaian sistem kebijakan yang harus saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Kota Batam memiliki berbagai macam fasilitas infrastuktur dalam menunjang aktivitas sosial ekonomi. Sampai dengan keadaan akhir tahun 2011 tercatat panjang jalan yang ada 1.089,46 km. Prasarana jalan yang ada pada tahun 2011 tercatat 899,45 km (82,6%) dalam keadaan baik dan 156,51 km (14,4%) dalam kondisi sedang dan 33,50 km dalam kondisi rusak ringan sampai berat. Pembangunan infrastruktur jalan sebagian besar sudah mampu membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian Kota Batam.

Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara menjadi sangat penting untuk disediakan mengingat kondisi geografis Kota Batam yang terdiri dari kawasan *mainland* dan *hinterland* dengan disparitas ekonomi yang beragam. Ketersediaan infrastruktur ini akan menciptakan konektifitas antar daerah *mainland* dan *hinterland* dan antar wilayah pulau dengan pusat kegiatan ekonomi. Selain itu ketersediaan infrastruktur transportasi akan memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya peran infrastruktur transportasi akan membawa positif bagi produktifitas industri, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.

Kondisi infrastruktur transportasi yang dimiliki Kota Batam sebagai daya tarik investasi antara lain adalah Bandara Internasional Hang Nadim Batam dimana bandara ini mampu melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat. Pergerakan penumpang pada Bandara Hang Nadim pada tahun 2011 berjumlah 3.380.628 orang sedangkan pergerakan pesawat udara tahun 2011 berjumlah 28.595 kali. Untuk perkembangan kargo dalam kegiatan bongkar pada tahun 2011 berjumlah 20.958 ton sedangkan untuk muat berjumlah 9.175 ton. Kapasitas ultimate Bandara Hang Nadim dapat dikembangkan untuk fasilitas apron menjadi 170.000 km², 12 garbarata dengan luas terminal 88.000 m², kapasitas penumpang 8.300.000 orang per tahun, sedangkan kargo 700.000 ton per tahun.

Dalam hal sarana perhubungan laut telah tersedia lima pelabuhan penumpang internasional dengan tujuan Singapura dan Malaysia, dua pelabuhan penumpang domestik dan tiga pelabuhan angkutan barang baik untuk tujuan domestik maupun internasional dengan kapasitas sandar kapal maksimum 35.000 DWT dan kontainer sebanyak 90.000 TEUs.

Dalam penyediaan air bersih, Kota Batam memiliki 10 waduk, sementara yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini 6 waduk yang dapat memberikan kebutuhan pelayanan air bagi masyarakat dengan kapasitas produksi 2.693,32 lt/detik dari kapasitas desain

Dalam pengelolaan limbah, telah terdapat Fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas domestik sebesar 33 lt/detik di Batam Centre dengan jumlah satuan sambungan berjumlah 209.501 sambungan. Untuk masa datang direncanakan kapasitas pengelolaan air limbah di Batam Centre akan ditingkatkan menjadi 300 lt/detik dan pengembangan 6 lokasi pengolahan air limbah dengan sistem terpusat sehingga mencapai kapasitas 3.350 lt/detik. Sedangkan penanganan sampah domestik saat ini dilakukan di TPA Telaga Punggur dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill*, sedangkan di masa depan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan teknologi maju ramah lingkungan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Untuk kebutuhan energi telah terdapat jaringan distribusi gas dan ketersediaan kelistrikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Sistem terinterkoneksi 150 KV
- DMN 324 MW, BP 264 MW
- Pertumbuhan Beban Puncak 13%
- Populasi 1 juta
- Konsumsi Mayoritas Industri dan Bisnis

Ket :
Existing 150 KV : ————
20 KV : - - - - -

55

Dalam aspek telekomunikasi sebagai sarana memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat sangat diperlukan untuk daya saing daerah. Fasilitas jaringan yang tersedia di Kota Batam oleh penyedia jasa telekomunikasi seluler dan penyedia jasa telekomunikasi adalah fasilitas jaringan *fixed line*, jaringan serat optik dan *broadband*. Ketersediaan telepon tetap memudahkan komunikasi antar daerah dan wilayah. Sementara itu, keberadaan teknologi serat optik semakin mampu memperluas lebar jalur (*bandwidth*), sehingga komunikasi data dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi. Ketersediaan serat optik dan *broadband* akan meningkatkan produktifitas dalam berbagai bidang karena akan mempermudah penyampaian informasi dan proses data.

Selain itu fasilitas lainnya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah adalah fasilitas hotel, bank (pemerintah dan swasta), perusahaan asuransi, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU) dan pelayanan jasa lainnya telah cukup tersedia di Kota Batam. Di samping itu terdapat juga fasilitas sosial seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat peribadatan dan fasilitas olah raga sebagai dukungan kelengkapan infrastruktur daerah untuk kelengkapan sarana kesejahteraan masyarakat.

Tantangan ke depan untuk fasilitas wilayah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dibutuhkan (1) pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, membuka isolasi wilayah antara daerah *hinterland* ke *mainland* melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pelantar kayu menjadi pelantar beton, penyehatan lingkungan seperti semenisasi, (2) meminimalisasi titik-titik banjir/genangan air melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase sesuai dengan kapasitasnya karena banjir menyebabkan terganggunya aksesibilitas yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, (3) pada kawasan-kawasan *hinterland* sering terjadi abrasi laut maka perlu penanganan pembangunan dan pemeliharaan tebing pantai, selain itu penyiapan sarana transportasi laut yang representative dari daerah *hinterland* ke *mainland*, (4) penyiapan pembangunan sarana transportasi angkutan massal yang handal dan peningkatan manajemen serta pengoperasian Bandara Hang Nadim mengarah kepada optimalisasi operasional 24 jam sehari sehari, selain itu juga pembangunan transportasi laut diarahkan pada peningkatan dan penambahan prasarana pelabuhan sekaligus perbaikan manajemen pelabuhan.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

2.4.3.1 Proses Perizinan

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di daerah sebaiknya difokuskan pada: (i) penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dan non

perizinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah; serta (iii) kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan.

Regulasi yang jelas dan proses yang lebih sederhana akan memudahkan investor dan pengusaha dalam melaksanakan regulasi tersebut, karena tidak akan menimbulkan salah persepsi dan dapat mengurangi biaya ekonomi tinggi. Sementara itu, penyelenggaraan PTSP yang baik akan memberikan kepastian berusaha, memudahkan investor dan pengusaha dalam memproses perizinan, serta meningkatkan efisiensi proses pengurusan perizinan karena perizinan dapat diproses dengan lebih cepat dengan biaya yang lebih transparan. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya kenyamanan berusaha dan berinvestasi; yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Batam yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas dalam rangka memberikan kemudahan proses perizinan sebagai daya tarik investasi dan daya saing daerah, maka Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan Batam telah melakukan proses pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Adapun maksud dan tujuan proses perizinan pada PTSP adalah (1) mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan, (2) memudahkan dalam memonitor kinerja pemrosesan perizinan terutama yang bersifat lintas sektor, (3) mengantisipasi terjadinya keterlambatan proses perizinan yang berlarut-larut dan (4) mengurangi adanya pungutan pada perizinan sektor tertentu. Untuk menunjang fasilitas pelayanan perizinan di Kota Batam, Pemerintah Pusat menetapkan Kota Batam sebagai kota pertama yang melaksanakan *Pilot Project National Single Window* dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPPISE) yaitu perangkat lunak yang diluncurkan pada akhir tahun 2006. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi biaya serta penanganan proses ekspor impor bea cukai dan pajak & prosedur di pelabuhan Batam.

Pada masa mendatang strategi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Batam pada PTSP adalah mengoptimalkan penyelenggaraan peran dan fungsi PTSP melalui peningkatan (1) SDM yang profesional dan memiliki kompetensi, (2) sarana, prasarana dan media informasi yang memadai, (3) mekanisme kerja yang jelas, transparan, mudah dipahami dan diakses, dan (4) disediakan layanan pengaduan. Di samping itu dilakukan juga strategi melalui harmonisasi regulasi antar daerah dan antar pusat dan daerah yang mendukung investasi. Untuk mendukung hal ini perlu didorong langkah-langkah: (1) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi, (2) pemantauan dan evaluasi atas peraturan-peraturan daerah yang menghambat investasi dan perdagangan, (3) mekanisme pembatalan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah.

2.4.3.2. Angka Kriminalitas

Kondisi lingkungan Kota Batam yang aman dari berbagai macam kejahatan akan memiliki dampak positif bagi perkembangan investasi. Kondusifnya aktivitas kehidupan akan mempengaruhi secara riil dan persepsi investor dalam menanamkan modalnya. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Batam.

Perkembangan angka kriminalitas Kota Batam selama periode 2005-2011 cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari fakta kriminalitas yang terjadi pada tahun 2005 berjumlah 4597 kejahatan menurun menjadi 2265 jumlah kejahatan. Jenis kriminalitas yang cukup banyak terjadi di Kota Batam ialah pencurian, penipuan dan lain sebagainya.

Banyak aspek yang melatarbelakangi tindakan kriminalitas, namun hal ini dapat diantisipasi. Hal penting yang harus disikapi dalam mencegah potensi kriminalitas dimasa depan agar tidak terjadi diantaranya adalah pembenahan disparitas/kesenjangan kualitas kehidupan masyarakat dan perbedaan kesejahteraan masyarakat antara yang bermukim di *hinterland* dan *mainland*.

Selain itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai, maka upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat di Kota Batam, peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan lebih optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan forum MUSPIDA dengan mengikutsertakan paguyuban-paguyuban, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi agama dan kemasyarakatan lainnya bersama dengan masyarakat yang ada di Kota Batam.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN DAN POTENSI PEMBANGUNAN

Penduduk dan Kesejahteraan

Permasalahan:

1. *Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.* Fakta menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Batam cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat selama periode tahun 2005-2012 yaitu laju pertumbuhan penduduk mencapai 9,0% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini berasal dari migrasi dimana sebagian besar dari pendatang tersebut merupakan usia produktif yang tidak didukung dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai (*unskill*). Di samping itu tingkat kelahiran yang tinggi juga menjadi faktor meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.
2. *Penyebaran penduduk tidak merata dan mobilitas penduduk yang belum optimal.* Banyaknya jumlah penduduk di Kota Batam hanya terkonsentrasi pada kecamatan yang berada di wilayah Pulau Batam (*mainland*), sebagai akibat terlalu teragglomerasinya aktivitas perekonomian di Pulau Batam. Dampak dari kondisi ini menciptakan *penyebaran penduduk* di Kota Batam tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk di Pulau Batam pada tahun 2011 sebesar 95,4%. Di samping itu jumlah penduduk yang cukup besar dan mobilitas yang tergolong tinggi belum didayagunakan secara optimal sebagai asset dan potensi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Batam.
3. *Tenaga kerja lokal relatif belum kompetitif.* Sebagian besar jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah (pendatang). Hal ini disebabkan masih rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal dalam memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
4. *Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.* Tingkat kemiskinan mikro Kota Batam 16,34% lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan mikro nasional 12,49% dan rencana target MDG's sebesar 12,1%. Tingginya tingkat kemiskinan ini antara lain disebabkan oleh migrasi yang tinggi yang tidak terserap pada lapangan kerja termasuk juga tingginya tingkat kemiskinan di wilayah *hinterland*. Khusus di wilayah *hinterland* tingkat kemiskinan pada tahun 2011 dari jumlah penduduk sebesar 52.534 jiwa hampir 52% penduduknya masuk dalam kategori miskin. Hal ini disebabkan aktivitas penduduk di wilayah *hinterland* umumnya bergerak di bidang perikanan, pertanian yang masih bersifat tradisional. Selain itu wilayah ini kurang didukung sarana dan prasarana aksesibilitas dengan pusat kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan tingginya harga-harga komoditas. Kondisi ini berakibat tingginya tingkat

kemiskinan di wilayah *hinterland* serta makin melebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara wilayah *hinterland* dan *mainland*.

5. *Permasalahan gender*. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih relatif rendah hal ini antara lain ditandai oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan, menurunkan tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kesejahteraan perlindungan anak.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kependudukan dan kesejahteraan yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia pada usia produktif dengan keanekaragaman budaya dan latar belakang etnis (*heterogen*) agar dapat didayagunakan secara optimal.
2. Tingkat IPM Kota Batam yang relatif lebih tinggi dibanding dengan tingkat IPM di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.
3. Letak geografis yang strategis dalam mobilisasi penduduk dan kegiatan perekonomian.

Fisik Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1. *Kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat*. Seiring dengan dijadikannya Batam sebagai Kawasan investasi di bidang industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan alih kapal berimplikasi terhadap tingginya kebutuhan ruang untuk pemenuhan aktivitas ekonomi pada sektor tersebut yang akhirnya dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan hidup antara lain kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, kawasan tangkapan air (*catchment area*) dan kerusakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.
2. *Meningkatnya volume tonase sampah dan limbah*. Sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian di Kota Batam berdampak kepada meningkatnya volume tonase sampah domestik, limbah industri dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk itu diperlukan perhatian khusus dengan memberikan peningkatan tatakelola penanganan yang maksimal, peningkatan sarana dan prasarana berbasis teknologi terkini dan didukung dengan Sumber Daya Manusia yang profesional. Hal ini sangat penting karena apabila terabaikan berakibat pada penurunan derajat

kebersihan kota dan kualitas kehidupan flora dan fauna serta kehidupan manusia.

3. *Penurunan kualitas maupun kuantitas kawasan lindung.* Adanya ancaman terhadap penurunan kualitas maupun kuantitas kawasan lindung Kota Batam yang disebabkan semakin berkembangnya aktivitas sosial ekonomi sehingga membutuhkan ruang untuk aktivitas tersebut.
4. *Meningkatnya potensi abrasi pantai dan pesisir.* Tingginya intensitas gelombang pasang dan angin puting beliung yang terjadi di wilayah pesisir dan hinterland di Kota Batam sering dihadapi oleh ancaman terjadinya abrasi pantai yang mengakibatkan erosi pada tebing pantai yang dapat merusak sumber daya alam dan lingkungan serta mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat.
5. *Pencemaran laut akibat tumpahan minyak.* Sebagai wilayah yang berada di jalur pelayaran internasional mengakibatkan Kota Batam sering mengalami pencemaran laut dan wilayah pesisir akibat tumpahan minyak. Ada beberapa penyebab terjadinya tumpahan minyak di wilayah laut Kota Batam antara lain, yaitu: Tumpahan minyak akibat dari kegiatan transportasi laut, pembersihan lambung kapal oleh *shipyard/Tank Cleaning*, kegiatan perbaikan kapal, dan kecelakaan/tabrakan kapal tanker di perairan Kota Batam.
6. *Pemanfaatan hutan mangrove belum optimal.* Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam ditetapkan adanya peruntukan kawasan hutan mangrove yang berfungsi sebagai ekosistem utama wilayah pesisir dalam melindungi dan menjaga keberlangsungan biota laut dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Di samping itu potensi hutan bakau ini jika ditata dan dikelola dengan baik dapat dikembangkan sebagai destinasi objek wisata (*ecotourism*). Namun demikian potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang perekonomian Kota Batam.
7. *Terbatasnya sarana dan prasarana serta teknologi lingkungan hidup.* Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, diperlukan komitmen penuh tidak hanya dari pemerintah tapi juga dibutuhkan komitmen dari semua *stake holder* yang melakukan aktivitas kehidupan di Kota Batam. Di samping perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan guna meminimalisir kerusakan lingkungan yang dapat mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat di Kota Batam.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Fisik Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi yang mengamanatkan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, antara lain: Perpres No. 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun.
2. Alokasi kawasan hutan di Kota Batam lebih dari batas minimum yaitu di atas 30%.
3. Posisi Kota Batam sebagai daerah perbatasan dan memiliki pulau-pulau terluar mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dalam hal pengamanan wilayah dan pengembangan kawasan yang berdaya saing tinggi.

Infrastruktur

Permasalahan:

1. *Ketersediaan infrastruktur jalan belum optimal.* Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah diperlukan ketersediaan sarana infrastruktur jalan yang berstandar tinggi. Fakta menggambarkan bahwa infrastruktur jalan berada pada kondisi rusak ringan sampai berat 18%. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas perekonomian, distribusi baik barang maupun orang dan mobilitas penduduk di Kota Batam. Di samping itu juga berdampak terhambatnya pengembangan wilayah untuk menciptakan kawasan pertumbuhan yang baru, menghambat aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah.

2. *Belum optimalnya pengelolaan transportasi publik.* Ketersediaan infrastruktur darat, laut dan udara merupakan salah satu faktor penting dalam aspek peningkatan daya saing daerah, apalagi dikaitkan dengan kondisi geografis Kota Batam yang terdiri dari daerah *mainland* dan *hinterland* serta dijadikannya Batam sebagai kawasan destinasi investasi di bidang industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan alih kapal. Permasalahan yang dihadapi pada infrastruktur transportasi darat adalah pada terbatasnya ketersediaan sistem angkutan umum, manajemen lalu lintas dan fasilitas lalu lintas jalan yang memadai dan keterbatasan transportasi publik yang representatif dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam hal transportasi laut masih dihadapkan pada kurangnya fasilitas sarana transportasi laut yang menghubungkan wilayah *hinterland* ke pusat perekonomian di *mainland* dan antar wilayah pulau-pulau di kawasan *hinterland*. Sedangkan untuk sarana pelabuhan bongkar muat barang/ kargo masih terbatas termasuk manajemen pengelolaan pelabuhan. Untuk Bandara Hang Nadim, masih diperlukan peningkatan dalam hal fasilitas penunjang kebandaraan agar mampu bersaing dengan fasilitas yang ada di bandara internasional terkemuka.

3. *Belum optimalnya penanganan banjir.* Penanganan banjir di Kota Batam masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya titik-titik banjir atau genangan air karena kekurangan sarana dan prasarana drainase pada jalur-jalur jalan utama, jalan kolektor dan jalan lingkungan maupun pada kawasan pusat kota dan permukiman serta pelaksanaan penyiapan lahan dengan *cut and fill* tanpa memperhatikan

dampak lingkungan. Di samping itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan masalah banjir karena masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai/saluran sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat pembuangan sampah.

4. *Masih terbatasnya fasilitas infrastruktur di wilayah hinterland.* Ketersediaan fasilitas infrastruktur di kawasan hinterland belum mampu merespon segala kebutuhan aktivitas kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, sehingga kondisi ini menciptakan ketimpangan pembangunan yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pelantar beton, air bersih, listrik, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi antara wilayah *hinterland* dan *mainland*, serta keterhubungan dengan pulau-pulau kecil.
5. *Keterbatasan ketersediaan air baku.* Dalam rangka mengantisipasi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas perekonomian di masa datang di Kota Batam membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup sehingga daya saing dasar. Permasalahan yang dihadapi adalah sumber air bersih di Kota Batam hanya tergantung pada curah hujan yang ditampung dalam waduk-waduk. Di samping itu pada wilayah *hinterland* masih dihadapkan dengan keterbatasan air bersih karena selama ini sumber air bersih hanya mengandalkan potensi-potensi sumber air baku yang ada dan mendatangkan air dari Pulau Batam melalui transportasi laut.
6. *Terbatasnya ketersediaan listrik dan sarana telekomunikasi.* Ketersediaan tenaga listrik merupakan kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktivitas masyarakat dan untuk mendorong peningkatan dan penguatan kegiatan ekonomi di daerah. Permasalahan energi listrik yang dihadapi saat ini di Kota Batam adalah masih tergantung penggunaannya pada bahan bakar minyak dan gas dimana ketahanan sumber ini sangat tergantung pada kondisi harga pasar dan ketersediaan pasokan. Sedangkan di wilayah *hinterland* sumber energi masih mengandalkan bantuan dari pemerintah melalui program *Solar Home System (SHS)* dan bantuan genset yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan 24 jam.
7. *Permasalahan Perumahan dan Permukiman.* Permintaan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) akan kebutuhan hunian belum diimbangi dengan ketersediaan rumah yang memadai (*backlog*), selain itu juga belum didukung dengan sistem pembiayaan dan pasar perumahan yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat sehingga mencari alternatif dengan membangun rumah pada lahan yang tidak pada tempatnya (rumah bermasalah). Permasalahan lain yang ditemui adalah terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan murah, dan masih banyaknya perumahan yang belum dilengkapi dengan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang memadai untuk mendukung kawasan permukiman.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Infrastruktur yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Aksesibiliti dan konektiviti menuju Batam sangat beragam, dimana dapat memanfaatkan sarana pintu masuk transportasi laut dan udara baik keperluan domestik maupun internasional.
2. Batam memiliki fasilitas sarana perhubungan yang mudah untuk melakukan kegiatan distribusi baik barang maupun penumpang dan mobilitas orang keluar masuk Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadim dan lima pelabuhan fery internasional yang menghubungkan ke negara Singapura dan Malaysia.
3. Memiliki fasilitas tiga pelabuhan berstatus pelabuhan bebas dan perdagangan bebas untuk bongkar muat barang/ kargo sebagai hub berpotensi setara dengan pelabuhan internasional hub di Singapura dan Johor Bahru – Malaysia.
4. Ketersediaan ruang daerah milik jalan untuk ekspansi sarana transportasi darat dalam rangka mempercepat jarak tempuh distribusi barang dari pusat-pusat kawasan perekonomian menuju pelabuhan. Di samping itu juga ruang untuk fasilitas umum percepatan pembangunan infrastruktur di bidang energi, telekomunikasi, dan sanitasi.
5. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan Batam agar dapat berkompetensi dengan kawasan sejenis dilingkup regional Asia Pasifik.

Ekonomi

Permasalahan:

1. *Pengembangan kawasan industri masih bersifat industri footloose dan padat karya.* Pembangunan ekonomi di bidang Industri sebagian besar aktivitasnya berada di kawasan industri yang tersebar di Kota Batam. Namun penyiapan kawasan industri yang berkembang saat ini umumnya adalah industri “*footloose*” (kurang memanfaatkan input lokal dan produknya tidak diolah oleh industri lokal) dan padat karya, sehingga industri tersebut rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal (global), nilai tambah (*added values*) dan efek penggandanya (*multiplier effects*) bagi perekonomian wilayah Kota Batam relatif tidak sebesar yang diharapkan. Di samping itu aktivitas jenis industri masih berorientasi industri padat karya dan belum berorientasi pada pengembangan industri berbasis *high tech* dan *ecoindustry* yang bersifat padat modal.
2. *Belum optimalnya perkembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).* Peranan koperasi, UKM dan UMKM berbasis ekonomi lokal yang diharapkan sebagai salah satu tulang punggung atau menjadi tiang penting pembangunan ekonomi Kota Batam masih dihadapkan kepada permasalahan

pembiayaan, SDM yang tangguh dan profesional, sarana teknologi tepat guna, akses informasi pasar dan lainnya.

3. *Batam rentan kepada ketersediaan pangan (ketahanan pangan) untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.* Salah satu langkah dalam peningkatan daya tahan ekonomi untuk memperkuat ekonomi domestik adalah melalui peningkatan ketahanan pangan terutama yang berbasis sumber daya lokal. Peningkatan ketahanan pangan harus terus didorong untuk mampu menggerakkan perekonomian daerah. Sampai saat ini kebutuhan pangan untuk masyarakat Kota Batam umumnya diimpor dari luar negeri melalui Negara Malaysia dan Singapura, sedangkan produksi lokal hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan sayur-sayuran, buah-buahan yang kontribusinya jauh dari kebutuhan masyarakat. Di samping itu kebutuhan pangan Batam juga didatangkan dari daerah-daerah wilayah Indonesia. Kondisi ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat karena harga pangan di Kota Batam lebih tinggi dari harga pangan di luar Batam. Dampak dari kondisi ini berpengaruh kepada inflasi Kota Batam, daya beli masyarakat, aktivitas UKM dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menentukan besar Upah Minimum Kota (UMK) bagi tenaga kerja. Dalam hal UMK dapat berimplikasi pada kegiatan ekonomi bagi investor terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK).
4. *Kemitraan dan kerjasama antara industri kecil menengah dengan industri besar belum berkembang.* Perkembangan kemitraan yang dilakukan antara industri kecil, menengah dengan industri besar seyogyanya harus saling bersinergi terkait untuk menghasilkan sebuah produk yang mempunyai nilai tambah dalam membangun perekonomian daerah.

Namun permasalahan yang ditemui dalam kemitraan yang terjadi adalah bersifat saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan produk yang dihasilkan oleh kegiatan industri besar, sebab komponen pendukung sebuah produk industri besar umumnya bukan merupakan kandungan lokal tetapi kandungan impor dari luar negeri maupun didatangkan dari luar daerah Batam. Kemitraan yang terjadi selama ini adalah kemitraan pemenuhan kebutuhan pada tataran dukungan kebutuhan industri besar seperti logistik, tenaga kerja, transportasi, katering, bahan bakar, keamanan, kebutuhan meubeler dan dukungan lainnya.

5. *Aktivitas usaha informal yang kurang tertata dan terbina dengan baik.* Dampak dari kemajuan ekonomi suatu daerah adalah munculnya berbagai aktivitas kegiatan ekonomi baik skala menengah, skala kecil dan bahkan aktivitas sektor informal, dimana sektor ini juga menciptakan lapangan kerja dan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Pada umumnya kegiatan usaha informal ini berdekatan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas umum yang mudah

diakses oleh masyarakat sehingga penempatan usaha kegiatan ini sebagian besar bertentangan dengan peruntukan ruangnya. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan yang menonjol di Kota Batam karena aktivitas usaha informal berdampak pada kerusakan lingkungan, estetika kota dan mengganggu fasilitas umum masyarakat. Permasalahan lain yang ditemui adalah terbatasnya ruang untuk kegiatan ini yang disediakan oleh pemerintah di samping kurangnya kesadaran masyarakat yang bergerak di sektor ini untuk tertibkan dan ditata ulang pada kawasan yang sudah disediakan.

6. *Belum optimalnya promosi kepariwisataan dalam meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian daerah.* Meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Kota Batam sebagian besar bertujuan untuk wisata belanja, kuliner, dan hiburan terutama bagi wisatawan mancanegara, selain mendatangi kawasan-kawasan resort dan olah raga golf. Sedangkan wisatawan domestik sebagian besar dalam kunjungan wisata *Meeting Incentive Tour Conference Exhibition (MICE)*. Permasalahan yang ditemui adalah bahwa potensi wisata alam dan wisata budaya belum optimal dipromosikan untuk dijadikan sebagai aset kepariwisataan yang baru.
7. *Sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum didayagunakan secara optimal.* Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kota Batam belum dapat dijadikan sebagai andalan distribusi persentase PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha. Sumber daya ini merupakan bagian dari komponen sektor pertanian kontribusinya masuk kategori rendah terhadap PDRB Kota Batam karena peranan sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di Kota Batam pada tahun 2011, sektor pertanian baru memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Batam sebesar 1,18%. Permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, permodalan, dan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dalam sektor ini.
8. *Pulau-pulau kecil belum dimanfaatkan atau didayagunakan secara optimal.* Aktivitas di kawasan pulau-pulau kecil sebagian besar masih di bidang perikanan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional yang belum didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan yang ditemui terhadap pengembangan pulau-pulau kecil adalah kurangnya orientasi pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai kawasan ekonomi berbasis lingkungan. Di samping itu minat investasi untuk wilayah pulau-pulau kecil aturan regulasinya cukup ketat sehingga belum menjadi daya tarik investasi bagi investor di samping permasalahan pembebasan lahan.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Ekonomi yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan potensi yang dapat didayagunakan secara optimal dan Batam telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Kota Batam dengan luas perairan dan nelayan yang tersebar di pulau-pulau memiliki potensi sumber daya laut.
4. Batam memiliki kemudahan (insentif) dalam berinvestasi.
5. Sektor perdagangan, hotel dan restoran semakin berkembang dan di masa depan dapat menjadi motor penggerak utama ekonomi Kota Batam.
6. Sektor pariwisata sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak perekonomian ke depan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Kota Batam juga sangat berpotensi menjadi Kota Wisata Konvensi atau *Meeting Incentive Tour Conference Exhibition (MICE)* dan Kota Wisata Budaya.
7. Potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan, karena memiliki lokasi strategis dan sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia bagian barat.

Sosial Budaya

Permasalahan:

1. *Masih ditemuinya masyarakat yang berstatus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).* Sebagai akibat tingginya migrasi penduduk yang datang ke Kota Batam memberikan berbagai konsekuensi dalam penyediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja selama ini hanya dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja yang mempunyai kompetensi, sedangkan yang tidak mempunyai kompetensi mencari alternatif lapangan kerja di sektor informal dan bahkan masuk ke dalam kelompok masyarakat berstatus PMKS. Kondisi ini sangat banyak ditemui di Kota Batam seperti gelandangan, pengemis dan prostitusi sehingga ini menimbulkan permasalahan di Kota Batam dalam menciptakan Batam sebagai kota berstandar internasional.
2. *Masih adanya aktivitas kegiatan trafficking, transaksi narkoba dan penyelundupan di Kota Batam.* Posisi Batam yang strategis tidak selamanya memberikan prospek positif bagi Kota Batam tetapi juga Kota Batam dihadapkan oleh permasalahan kegiatan yang merugikan kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan posisi Kota Batam sebagai daerah transit kegiatan *trafficking*, transaksi narkoba, serta kegiatan penyelundupan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan

sosial ekonomi masyarakat di Kota Batam dan masyarakat lainnya di luar Kota Batam.

3. *Belum optimalnya akses masyarakat terhadap dunia pendidikan dan kesehatan.* Kondisi wilayah Batam yang terdiri dari *mainland* dan *hinterland* dihadapkan pada ketidakseimbangan pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain menyediakan pelayanan pendidikan berkualitas terutama untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan di bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi antara lain mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
4. *Keheterogenan penduduk Batam terhadap mempertahankan ciri khas Batam berbasis Budaya Melayu sebagai.* Pada saat sekarang komposisi penduduk di Kota Batam terdiri multietnis yang berasal dari semua wilayah provinsi di Indonesia. Di satu sisi keberadaan masyarakat melayu sebagian besar masih bermukim di kawasan *hinterland* dan pesisir dengan pola kehidupan sebagai nelayan. Permasalahan ke depan yang dihadapi di era globalisasi yang sarat dengan kemajuan informasi dan teknologi dapat menembus ke semua wilayah dan negara tanpa adanya batas administrasi suatu wilayah. Sehingga kondisi ini ke depan akan semakin sulit mempertahankan ciri khas Batam sebagai daerah berbasis Budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat.
5. *Kecenderungan terjadinya degradasi pergaulan sosial dalam kehidupan masyarakat.* Dampak dari kemajuan dari kegiatan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemantapan moral dan akhlak sejak usia dini akan berpengaruh terhadap degradasi kehidupan sosial masyarakat, seperti terjadinya pergaulan bebas, menipisnya nilai budaya dan agama yang pada akhirnya dapat menyebabkan bencana sosial. Hal ini juga berlaku bagi kehidupan masyarakat di Kota Batam, jika dilihat dari strategisnya lokasi Batam dan meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat maju. Permasalahan ini dibutuhkan peningkatan pendidikan yang berkarakter moral dan peningkatan *nilai-nilai demokratisasi*.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Sosial Budaya yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Penduduk yang multi etnis memiliki keunggulan terbiasa dengan perbedaan dan terbuka dengan hal-hal yang baru.
2. Kedekatan dengan salah satu pusat perdagangan internasional (Singapura) dapat membantu perkembangan pergaulan internasional di Batam.

3. Kerukunan Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan serta LSM yang kuat, keterbukaan dunia pers, dan keharmonisan kerukunan umat diantara penduduk.

Perbatasan (Regional)

Permasalahan:

1. *Belum optimalnya pemanfaatan kedekatan Kota Batam dengan Singapura dan Malaysia dalam mendukung perkembangan ekonomi.* Dalam kerangka kerja sama segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Singapura (IMS-GT) telah disepakati pembagian peran antar negara dalam memajukan kawasan IMS-GT. Kota Batam sebagai wilayah yang masuk dalam kerangka kerjasama tersebut ditopang dengan kelebihan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, seyogyanya harus dapat mengambil keuntungan dari keunggulan yang dimiliki oleh Singapura dan Malaysia di bidang permodalan, teknologi, tenaga kerja trampil, dan akses ke pasar dunia. Permasalahan yang dihadapi dalam kondisi ini adalah belum konsistennya aturan hukum yang berkaitan dengan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/*Free Trade Zone (FTZ)*, selain itu belum tuntasnya status lahan di kawasan pengembangan baru di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru.
2. *Belum optimalnya pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan pulau-pulau terluar.* Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau kecil terluar, Kota Batam memiliki 4 (empat) pulau terluar yaitu: Pulau Nipah, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti, dan Pulau Putri/ Pulau Nongsa. Permasalahan yang dihadapi belum optimalnya pengawasan pada wilayah perbatasan dikarenakan belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan di lapangan dan cenderung kegiatan di lapangan berdasarkan tugas dan fungsi masih bersifat sektoral serta belum didukung sarana dan prasarana armada pengawasan yang memadai. Namun sampai saat ini keamanan dan kedaulatan NKRI masih terjaga. Hal ini juga ditemui masih lemahnya pengawasan dan pengamanan kegiatan perdagangan lintas batas ilegal oleh sekelompok pelaku ekonomi yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kota Batam.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Perbatasan yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Keberadaan Batam sebagai kawasan yang masuk dalam kerangka kerjasama ekonomi dengan Singapura dan Malaysia.
2. Memanfaatkan dampak dari aktivitas kegiatan ekonomi Singapura sebagai salah satu Negara tujuan wisata dan bisnis internasional di dunia (*Split Over*).

Kelembagaan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat)

Permasalahan:

1. *Aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya profesional dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.* Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, percepatan pembangunan Kota Batam menuntut perlunya ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional dan yang menguasai IPTEK sebagai daya saing daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Batam sebagai kawasan investasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini masih belum sepenuhnya Aparatur pemerintahan di Kota Batam mampu mengemban misi percepatan pembangunan Kota Batam dalam berkompetisi dengan kawasan sejenis di Regional Asia.
2. *Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam belum bersinergi secara optimal.* Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam sampai saat ini dilakukan oleh dua institusi dengan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kota Batam. Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sinergisitas yang dilakukan pada kewenangan tertentu belum optimal, antara lain dalam hal penertiban rumah-rumah bermasalah, pengamanan fasilitas umum, stabilitas harga, pengawasan dan pengamanan pada daerah rawan kegiatan ilegal seperti penyeludupan, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja percepatan pembangunan Kota Batam.
3. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal.* Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan merupakan faktor penting dalam memajukan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat pada umumnya dapat terlibat mulai dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, menikmati hasil pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Permasalahan partisipasi yang ditemui selama ini belum optimal dimanfaatkan pada tahap perencanaan dan tahap menikmati hasil pembangunan. Pada tahap perencanaan permasalahan yang ditemui adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengakomodir hasil partisipasi masyarakat, sedangkan pada tahap menikmati hasil pembangunan dihadapkan kepada kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga hasil-hasil pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum kehidupan masyarakat. Di samping itu partisipasi dunia usaha pada pembangunan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* belum optimal dan kurang tepat sasaran.

Potensi:

Potensi yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Kelembagaan

(Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) yang harus dimanfaatkan secara maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat banyak perusahaan besar beroperasi di Batam dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu disinergikan dalam upaya pembangunan daerah.
2. Keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan adalah keunggulan khas di Batam yang akan sangat bermanfaat bagi pembangunan.

3.2. ISU STRATEGIS

1. Laju migrasi penduduk, tingkat kelahiran yang tinggi, ketimpangan sebaran dan kesejahteraan penduduk merupakan permasalahan demografi yang dapat mempengaruhi pembangunan di Kota Batam. Di samping itu permasalahan kependudukan yang harus disikapi adalah tingginya kesenjangan kesejahteraan penduduk antar wilayah *hinterland* dan *mainland*, daya saing tenaga kerja lokal serta permasalahan gender.
2. Perkembangan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas membutuhkan ruang untuk kegiatan investasi di bidang industri, pariwisata, perdagangan, jasa dan alih kapal serta perumahan berdampak kepada penataan pola ruang termasuk penataan kawasan lindung. Jika dalam pelaksanaan kegiatannya tidak taat azas peraturan yang berlaku bisa berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.
3. Kebutuhan peningkatan layanan jaringan prasarana dan sarana perkotaan yang berkualitas dan handal, sehingga mampu mendukung perkembangan jumlah penduduk beserta aktivitasnya dan kegiatan perekonomian. Keterbatasan sarana transportasi kota menyebabkan kemacetan yang dapat mengganggu mobilitas penduduk dan distribusi terutama barang dan penumpang. Peningkatan aksesibilitas intra wilayah dan eksternal wilayah kota dan keterpaduan sistem transportasi inter dan intra moda sangat penting diantisipasi pemenuhan kebutuhannya.
4. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk permukiman dan infrastruktur permukiman serta pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya Ketidakseimbangan perumahan yang memadai (*backlog*) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk tumbuhnya hunian bermasalah.
5. Perekonomian Kota Batam yang tumbuh cukup tinggi, didominasi oleh peranan sektor industri pengolahan. Pada umumnya kegiatan industri ini berada kawasan industri dan cenderung eksklusif. Jejaring dan kemitraan antara industri besar dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah relatif rendah. Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi ekonomi yang cukup tinggi. Sektor ini juga dapat menjadi penggerak ekonomi Kota Batam, karena jumlah penduduk dan pengunjung Batam yang meningkat. Kegiatan wisata alam dan buatan di Batam sudah mulai menarik wisatawan, termasuk

asing (Malaysia dan Singapura). Dengan dikelilingi wilayah laut yang luas, maka potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah perlu dimanfaatkan dengan baik.

6. Berlandaskan karakter Budaya Melayu, Kota Batam yang memiliki heterogenitas etnis yang berasal dari seluruh Indonesia dapat dijadikan modal untuk kultur kemajuan Batam di masa yang akan datang dengan tetap memiliki identitas yang kuat.
7. Sektor pendidikan dan kesehatan sebagai tulang punggung menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus pendukung bagi kemajuan, hal ini patut ditumbuhkan di Batam sebagai faktor keunggulan Batam, diantaranya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bertaraf internasional.
8. Pada posisinya yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia serta jalur padat pelayaran dunia dan penerbangan internasional, maka Batam dapat mengembangkan jalinan kerjasama dan mengoptimalkan manfaat dari keberadaan jalur tersebut. Selain itu, terkait dengan perbatasan dengan negara lain, umumnya pengawasan dan pengamanan di pulau-pulau terluar relatif minim.
9. Kelembagaan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang memiliki sumber daya dan potensi masing-masing perlu ditingkatkan tata kelolanya dengan baik serta saling bersinergi. Keberadaan Badan Pengusahaan Batam dapat dijadikan sebagai modal yang baik bagi pembangunan dan kesejahteraan penduduk Kota Batam.

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1. VISI

Berdasarkan perkembangan Kota Batam saat ini, kemungkinannya di masa yang akan datang, serta isu-isu strategis hingga tahun 2025 mendatang, maka Visi pembangunan daerah Kota Batam adalah :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA YANG MADANI”

Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Kawasan Regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi *“center of excellent”*, dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani adalah sebuah kondisi dimana masyarakat menjadi beradab. Tingkat hidup masyarakat beradab harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan yang tidak hanya diukur dari sekedar pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan kemakmuran material semata. Masyarakat beradab adalah masyarakat yang hidup di dalam suasana yang damai, aman dan bebas. Sehingga kemakmuran tanpa adanya kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, beribadah dan bersosialisasi akan kehilangan makna dan arti. Kebebasan merupakan unsur yang paling penting karena kebebasan adalah dasar dari pembentukan kehidupan demokrasi.

Masyarakat Madani yang hidup sejahtera di Kota Batam akan terwujud seiring dengan terciptanya Batam sebagai Bandar. Menurut pengertiannya Bandar mengandung arti sebagai Kota Dagang. Batam akan tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan perdagangan dan bukan lagi industri. Sektor ekonomi yang akan menarik pertumbuhannya adalah Sektor Jasa, baik Jasa Transportasi maupun Jasa Keuangan. Oleh karena itu pembangunan fasilitas jasa pelabuhan, sistem keuangan yang moderen dan pelayanan berstandar internasional merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan Batam menjadi bandar dunia yang madani seperti apa yang tertuang di dalam Visi RPJP Kota Batam 2005-2025.

4.2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Kota Batam tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kota Batam tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Misi I : Mengembangkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional

Untuk mengembangkan Batam sebagai bandar berstandar internasional, maka yang perlu dilakukan adalah mendorong pembangunan Kota Batam dengan fasilitas berstandar internasional. Fokusnya adalah pada kegiatan yang memanfaatkan keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Posisi Batam yang strategis karena berada pada jalur pelayaran terpadat, dekat dengan salah satu pusat bisnis internasional (Singapura) adalah keuntungan tersendiri bagi Kota Batam. Kebijakan-kebijakan ekonomi di Kota Batam perlu lebih berorientasi keluar (*outward looking*), terlebih perhatian pemerintah pusat dengan adanya Badan Pengusahaan Kawasan yang dapat menjadi penggerak penting.

Tujuan misi tersebut adalah agar Bandar Internasional Batam sebagai potensi alam dan posisi Kota Batam dapat menjadi andalan (*core*) bagi upaya-upaya sinergi pembangunan daerah atau menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional .

Misi II : Mengembangkan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tingkat pendapatan penduduk Kota Batam secara umum tergolong tinggi, yaitu di atas angka Kepulauan Riau maupun Nasional. Untuk mencapai keberlanjutan peningkatan pendapatan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi. Karena tingkat pendapatan penduduk relatif sudah tinggi, maka keberlanjutan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan wilayah lain dan secara umum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kota Batam sebagai salah satu simpul penting dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia.

Untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, iklim investasi dan usaha yang kondusif dan bagi lembaga-lembaga yang didalamnya diharapkan dapat lebih kooperatif dan sinergis. Proses yang mengiringi perkembangan ini adalah transformasi struktur ekonomi, yang bergerak dari sektor industri ke sektor jasa.

Sebagai penarik kegiatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi, maka perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan besar sebagai jangkar (penarik), misalnya pengembangan pariwisata bertaraf internasional, sarana pendidikan bertaraf internasional, sarana kesehatan bertaraf internasional serta kegiatan-kegiatan lain yang memanfaatkan potensi yang ada di Kota Batam.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat harus tercapai sejalan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pemerataan memiliki dua arti yaitu pemerataan pendapatan antar golongan pendapatan

maupun pemerataan antar wilayah di Kota Batam. Kebijakan memberdayakan dan memaksimalkan pulau-pulau kecil di Kota Batam merupakan langkah yang sangat tepat dalam menciptakan wilayah atau kawasan perbatasan yang strategis yang sesungguhnya merupakan aplikasi atas ciri maritim (kelautan) dari kehidupan masyarakat bahari.

Tujuan dari misi tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pendukungnya, baik yang terkait langsung atau tidak langsung dengan keberadaan Bandar Internasional dalam rangka meningkatkan pendapatan umum penduduk.

Misi III : Menciptakan Masyarakat Sejahtera

Menciptakan sejahtera adalah kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Sumber daya insani perlu diperkuat dengan percepatan dan pengembangan kualitas SDM yang sehat, beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi serta mempunyai daya saing global.

Tingkat pengetahuan penduduk perlu ditingkatkan dengan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat ditempuh dengan peningkatan cakupan layanan pendidikan, pemerataan, peningkatan relevansi pendidikan dan meningkatkan keterkaitan yang baik dengan aspek kehidupan masyarakat.

Tingkat kesehatan penduduk perlu ditingkatkan dengan layanan kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat ditempuh dengan peningkatan cakupan layanan kesehatan, pemerataan dan peningkatan kesehatan umum serta akses pada kualitas kesehatan yang lebih tinggi.

Tingkat pendapatan penduduk perlu ditingkatkan dengan dukungan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, perlindungan dan kepastian usaha bagi UMKM.

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan taraf aspek-aspek kesejahteraan penduduk agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensinya sehingga tercapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi

Misi IV : Menciptakan Kelembagaan Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang Madani

Seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan akan memberikan hasil yang efektif dan efisien apabila

didukung oleh kelembagaan yang mendukung. Kelembagaan tersebut pada pokoknya meliputi kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta yang madani.

Untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang handal, maka perlu diterapkan *clean government and good governance*, yang didalamnya ditegakkan atas azas akuntabilitas dan transparansi, didukung tata kelola organisasi yang handal serta aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan kelembagaan swasta yang handal, maka perlu diterapkan *good corporate governance*, yaitu lembaga bisnis yang kreatif dan berdasarkan pada kepatuhan bisnis serta kepedulian.

Untuk mewujudkan kelembagaan masyarakat yang partisipatif dan unggul serta kooperatif, maka perlu diterapkan masyarakat yang tertib dan tenggangrasa.

Bila seluruh kelembagaan tersebut berfungsi dengan baik, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri akan dapat bersinergi dan berdaya guna tinggi.

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kinerja dan harmoni kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerah atau untuk bersinergi.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang efisien bagi pengusaha dan akuntabel bagi penegak hukum dan transparan di dalam proses pengambilan keputusan bagi para politisi. Usaha mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan pemerintah yang efisien, akuntabel dan transparan.

Pemerintah yang efisien dan bersih adalah aparatur pemerintah yang tidak menjadi beban bagi usaha masyarakat, tidak korupsi dan melakukan kolusi. Pemerintah yang bersih juga sangat tergantung pada tegaknya hukum yang berkeadilan. Aparatur pemerintah dimasa yang akan datang diharapkan, benar benar dirasakan oleh rakyat sebagai pengayom, pelayan dan pelindung yang adil, bukan sebaliknya dirasakan sebagai penguasa yang menambah beban rakyat. Tapi satu hal yang harus diperhatikan bahwa kebebasan setiap individu harus memperhatikan kebebasan individu lainnya. Di sinilah peran penting pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa pelanggaran atas kebebasan orang lain adalah perbuatan melanggar hukum. Pembentukan sistem pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan penegakan supremasi hukum, aparatur pemerintah yang efisien, bersih dan profesional.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Batam tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Batam sebagai Bandar berstandar Internasional dan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan masyarakat yang maju dan sejahtera didukung oleh kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan swasta yang madani.

Sebagai ukuran tercapainya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani, pembangunan Kota Batam sampai tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

MISI-1 “Mengembangkan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional”, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Meningkatnya daya saing Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan menuju Bandar Berstandar Internasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
 - Penyediaan jaringan infrastruktur transportasi dan perhubungan yang saling terintegrasi.
 - Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan pelabuhan laut dan udara.
 - Pengembangan aktivitas dan sistem pendukung pelayanan transportasi dan pelabuhan laut dan udara.
 - Penyediaan pasokan tenaga listrik untuk dunia usaha dan rumah tangga yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk pemenuhan elektrifikasi wilayah *hinterland*.
 - Pelayanan pos dan telematika yang efisien dan moderen guna terciptanya masyarakat informasi Kota Batam serta pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.
 - Pemantapan konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan.
 - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
 - Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga.
 - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi serta promosi Bandar Internasional, melalui:
 - Peningkatan kualitas operasional Bandar Internasional.
 - Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan.

- Peningkatan promosi Bandar internasional Batam dalam lingkup domestik dan luar negeri.
 - Peningkatan peranan dan kontribusi Kota Batam dalam berbagai kerjasama antar daerah, kawasan regional dan internasional untuk membangun *brand image* Bandar Internasional Batam
3. Terlaksananya pembangunan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melalui:
- Peningkatan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang
 - Pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam
 - Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - Penyiapan Regulasi Zonasi Tata Ruang
4. Meningkatnya dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, melalui:
- Sanitasi limbah rumah tangga dan limbah B3.
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas daya dukung lingkungan Kota Batam.

Misi II “Mengembangkan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Meningkatnya peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menjalankan peran dan fungsi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melalui:
- Peningkatan peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang efektif dan optimal
 - Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif dengan lingkungan yang kondusif
2. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan, melalui:
- Pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*
 - Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil dan menengah di daerah *hinterland*
 - Pengembangan kemitraan usaha-usaha antara usaha-usaha di *mainland* dan *hinterland*
3. Meningkatnya pengembangan kegiatan sektor ekonomi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, melalui:
- Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri.
 - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan yang terkait langsung dengan aktivitas pelabuhan internasional.
 - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal.

- Peningkatan keterkaitan (*linkages*) sektor industri dengan hubungan intraindustri dan dengan sektor lainnya.
 - Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor perdagangan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal.
 - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan besar dan menengah.
 - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan eceran dan pasar tradisional.
 - Perlindungan hak-hak konsumen.
 - Peningkatan keterkaitan sektor perdagangan dengan pengembangan pariwisata.
 - Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pariwisata
 - Pengembangan sarana pariwisata moderen berskala besar.
 - Pengembangan wisata alam khas Batam
 - Peningkatan kerjasama pariwisata.
 - Peningkatan promosi wisata.
 - Peningkatan industri berbasis budaya
 - Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor jasa penunjang
 - Fasilitasi pengembangan sektor ekonomi jasa penunjang.
 - Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pertanian penunjang
 - Peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan lokal dan produk pertanian potensial.
 - Peningkatan keterkaitan sektor pertanian dengan pengembangan pariwisata.
4. Meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar, melalui:
- Pengembangan kekuatan dan potensi kelautan
 - Peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
 - Peningkatan keterkaitan kelautan dan perikanan dengan pengembangan pariwisata daerah.
 - Pengembangan Industri pakan & pembenihan perikanan.
 - Pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan.
 - Pengembangan keterampilan dan produktivitas usaha ekonomi kecil dan menengah.
 - Peningkatan kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan.
 - Pengembangan dan optimalisasi wilayah pulau-pulau dan pulau terluar.
5. Meningkatkan dukungan atas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam, melalui:
- Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi agen ekonomi yang berdaya saing tinggi sehingga dapat bersaing di dalam perekonomian global.
 - Pembangunan sistem pembiayaan yang efektif bagi UKM yang berdaya saing tinggi.
 - Perluasan akses permodalan dan pemberian insentif bagi UKM.

6. Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan handal, jaminan hukum, keamanan dan insentif yang menarik serta promosi daerah, melalui:
 - Penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi.
 - Pengadaan produk hukum untuk kepastian berinvestasi yang berlandaskan kepada kelestarian lingkungan dan perlindungan usaha ekonomi kerakyatan.
 - Peningkatan pengawasan dan kerjasama investasi.
 - Peningkatan pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien bagi investasi dan penanaman modal.
 - Peningkatan upaya promosi dan insentif investasi.
7. Menciptakan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM untuk mendukung kebutuhan sektor ekonomi, melalui:
 - Penciptaan lapangan kerja formal dan kesejahteraan pekerja
 - Penguatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis.
 - Pengembangan pasar tenaga kerja yang optimal.
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
 - Pengembangan hubungan industrial dan keselamatan kerja.
 - *Review* sistem pengupahan secara berkala.
8. Menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi, persampahan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas serta prasarana lainnya, melalui:
 - Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi.
 - Pengembangan kapasitas strategis sarana transportasi berbasis angkutan massal dan *Green Transportation*, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi.
 - Pengembangan dan peningkatan teknologi komunikasi serta fasilitas prasarana lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah (persampahan dan fasilitas umum lainnya).

Misi III “Menciptakan Masyarakat Sejahtera”, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah *mainland* dengan kegiatan ekonomi di wilayah *hinterland*, melalui:
 - Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah *mainland* dan *hinterland* (*backward linkage*).
 - Penyiapan produk hukum dan penegakan hukum.
2. Meningkatnya daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat, melalui:
 - Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam.
 - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

- Pengembangan sarana pendidikan berskala internasional.
3. Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan, melalui:
 - Peningkatan cakupan, kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan umum.
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan sosial.
 - Peningkatan ketersediaan obat.
 - Penanganan melalui preventif dan kuratif terhadap penyakit menular
 - Peningkatan pengawasan dan manajemen kesehatan.
 - Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat.
 - Penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan.
 - Pengembangan sarana kesehatan berskala internasional.
 4. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan, listrik, air bersih, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan, dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok (sembako) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat, melalui:
 - Peningkatan dan pengadaan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
 - Pemantapan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.
 - Penertiban dan pengendalian permukiman kumuh dan *illegal*.
 - Pengadaan dan peningkatan sarana listrik, air bersih dan angkutan baik di wilayah *mainland* dan *hinterland*.
 - Peningkatan kualitas pengelolaan sampah perkotaan dan sanitasi lingkungan.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan transportasi dan sarana prasarana angkutan.
 - Pengendalian harga dan peningkatan jaminan distribusi barang kebutuhan pokok (sembako).
 5. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran, melalui:
 - Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk.
 - Peningkatan pendapatan penduduk.
 - Peningkatan upaya distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan.
 - Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran
 6. Meningkatnya tingkat kehidupan agama, sosial dan budaya umum penduduk, melalui:
 - Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, budaya.
 - Pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event.
 - Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya melayu yang luhur sebagai payung budaya dalam proses pembangunan.

7. Meningkatnya kegiatan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, melalui:
 - Fasilitasi kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk, melalui:
 - Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
 - Peningkatan kualitas serta daya dukung lingkungan melalui pemantapan kebijakan.
 - Peningkatan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
9. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan ancaman serta bencana alam, melalui:
 - Peningkatan pengendalian, penertiban, dan perlindungan terhadap rasa aman kehidupan penduduk.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat.
 - Peningkatan mitigasi bencana alam.
 - Peningkatan tanggap dini terhadap keadaan darurat dan bencana alam.

Misi IV “Menciptakan Kelembagaan Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang Madani”, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional termasuk meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang mampu mendukung pembangunan Kota Batam, melalui:
 - Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah
 - Penciptaan sistem birokrasi dan pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip (*clean government and good governance*).
 - Penataan bidang aparatur dan pengembangan karir berdasarkan kompetensi yang berbasis kinerja.
 - Penyiapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
 - Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Kota Batam.
 - Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel.
2. Meningkatnya Kerjasama dan Koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan Instansi Vertikal dalam rangka pembangunan Kota Batam, melalui:
 - Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Instansi Vertikal dalam pembangunan daerah
 - Peningkatan Kerjasama dan koordinasi, advokasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kelembagaan pemerintah lainnya dalam rangka pembangunan Kota Batam.
3. Meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip *good corporate governance*

- Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip *good corporate governance*.
 - Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam kemitraan.
4. Terwujudnya masyarakat Kota Batam yang "MADANI", melalui:
- Penguatan karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral, berorientasi kinerja, kemajuan IPTEK serta berdisiplin sebagai perwujudan pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya yang luhur.
 - Pemeliharaan tatanan sosial masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, tenggang rasa dan kreatif serta merasa aman.
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif, kreatif dan sinergis.

5.1.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

MISI I "Mengembangkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional"

Dalam mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar berstandar Internasional dapat dibuktikan antara lain melalui tingginya daya saing Kota Batam baik untuk skala regional maupun nasional, sehingga dengan daya saing yang tinggi, Kota Batam mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan memanfaatkan setiap potensi atau peluang yang ada, yaitu meliputi potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Sosial (SDS). Di samping itu juga dibuktikan dengan adanya komitmen dalam meningkatkan jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi Bandar Internasional serta konsistensi pelaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional.

Untuk mewujudkan pengembangan Kota Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ditempuh melalui:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan yang saling terintegrasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan membuka aksesibilitas dan dikembangkan melalui pendekatan keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah *mainland* dan *hinterland*. Untuk itu, pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyelenggarakan pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif serta mendorong partisipasi *stake holder*/pemangku kepentingan dalam penyediaan pelayanan infrastruktur transportasi dan perhubungan.
2. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan kapasitas pelayanan harus memenuhi standar internasional sehingga dapat bersaing dengan kota pelabuhan lainnya yang sudah lebih maju. Pengembangan pelabuhan bertaraf

internasional akan mendorong kemajuan sektor jasa sehingga di masa mendatang Batam akan menjelma menjadi kota moderen. Di dalam periode 20 tahun mendatang perekonomian Batam diproyeksikan berkembang maju dengan mengandalkan sektor transportasi dan pengangkutan sebagai sektor penarik pembangunan dan unggulan.

3. Menyediakan pelayanan angkutan umum masal di daerah perkotaan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan. Untuk pelayanan transportasi di daerah hinterland dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah.
4. Dalam rangka mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah dalam penyediaan jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada ruas yang menghubungkan kawasan industri ke outlet pelabuhan; meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan orang dan barang melalui kereta api/monorel, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional.
5. Mengembangkan aktivitas dan sistem transportasi serta sistem pendukung pelayanan transportasi dan perhubungan yang andal yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarwilayah serta didukung dengan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
6. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha yang andal dan efisien termasuk pemenuhan elektrifikasi wilayah *hinterland*.
7. Pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dengan mengoptimalkan dalam sistem dan proses pengelolaan ketenagalistrikan yang berfungsi secara efisien, produktif, dan profesional, sehingga dapat memberikan peluang yang lebih luas dan kondusif bagi investasi dan misi sosial.
8. Pengembangan sistem ketenagalistrikan diarahkan untuk mengoptimalkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan dengan melakukan pengembangan kualitas sarana dan prasarana jaringan energi untuk memanfaatkan alternatif energi terbarukan dan tidak terbarukan serta pembangunan jaringan pipanisasi gas yang terintegrasi.

9. Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk memacu masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*) di seluruh wilayah *mainland* dan *hinterland* melalui pengembangan prasarana telekomunikasi dan mewujudkan keterpaduan jaringan telekomunikasi antar negara. Penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator; pengamanan dan pencegahan implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10. Pemantapan konservasi sumber daya air diarahkan untuk pengendalian daya rusak air dan menjaga keberlangsungan fungsi sumber daya air.
11. Pembangunan prasarana sumber daya air dan penyediaan air minum diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga fungsi air dapat menjadi sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang.
12. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keandalan layanan melalui optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah, kemitraan dengan dunia usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat, serta memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan untuk meningkatkan daya saing Kota Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional diarahkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang.
14. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
15. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter pemuda berwawasan kebangsaan dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang

ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta pembangunan olahraga melalui peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

16. Peningkatan kualitas dan kesinambungan Bandar Internasional diarahkan untuk menjamin kualitas operasionalisasi Bandar Internasional dalam rangka meningkatkan daya saing Bandar melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur, revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa pada koridor strategis, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme aparatur pemerintahan, peningkatan promosi Bandar Internasional Batam dalam lingkup domestik dan luar negeri, peningkatan peranan dan kontribusi Kota Batam dalam berbagai kerjasama antar daerah, kawasan regional dan internasional untuk membangun *brand image* Bandar Internasional Batam.
17. Kesinambungan pembangunan Bandar Berstandar Internasional diarahkan kepada pembangunan dengan tetap berpedoman kepada RTRW Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk mewujudkan Bandar Dunia Madani yang berbasis industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang produktif, aman, nyaman, maju, berkualitas, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berdaya saing yang kuat di era global, melalui peningkatan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang, penyediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), pemberian insentif dan disentif serta penyiapan regulasi zonasi tata ruang.
18. Peningkatan dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup Kota Batam sebagai Bandar Internasional diarahkan kepada peningkatan kapasitas dan daya dukung dan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan; meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan dilakukan secara terus menerus dengan cara menjaga keamanan, keselamatan dan lingkungan; mewujudkan Kota Batam yang bersih dan sehat dengan mencegah dampak eksternalitas seperti pengelolaan sampah dan sanitasi limbah rumah tangga serta limbah B3.

MISI II “Mengembangkan Batam Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional”

Pengembangan Kota Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan dengan penerapan pada usaha ekonomi yang maju, berkelanjutan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam mengembangkan sumber daya yang ada. Untuk mewujudkan hal-hal di atas, maka arah kebijakan pembangunan Kota Batam dalam jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui peningkatan peranan Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan Batam yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator percepatan pembangunan di semua sektor yang didukung dengan pelayanan publik yang efisien dan efektif dengan lingkungan yang kondusif; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor unggulan antara lain sektor industri, sektor perdagangan, pariwisata, jasa penunjang, sektor pertanian penunjang, pemberdayaan ekonomi masyarakat; penciptaan iklim investasi dan usaha pelayanan yang handal; memberikan jaminan hukum, keamanan; pemberian insentif serta promosi; penyediaan sarana transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi serta fasilitas umum lainnya.
2. Pencapaian pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam diarahkan untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan sehingga mengurangi kecemburuan sosial melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah Hinterland; pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berskala kecil dan menengah oleh masyarakat yang berada di daerah Hinterland sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam yang tersedia; mengembangkan kemitraan atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara usaha-usaha yang ada di Pulau Batam dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang berada di daerah *hinterland*. Sedangkan untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi antar golongan pendapatan dapat ditempuh melalui perluasan akses masyarakat miskin terhadap permodalan, informasi pasar, teknologi tepat guna dan aset produksi lainnya.
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, keterkaitan sektor industri dengan hubungan intra industri dan sektor lainnya dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta terkait langsung dengan aktivitas pelabuhan internasional.
4. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan dan jasa penunjang diarahkan untuk memperkuat keterkaitan kegiatan sektor perdagangan dengan potensi pasar dan kebutuhan lokal; mengembangkan kegiatan ekonomi sektor perdagangan besar dan menengah, perdagangan eceran dan pasar tradisional; mengembangkan lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan hak-hak konsumen dan persaingan usaha secara sehat; meningkatkan keterkaitan perdagangan antar wilayah/daerah, dan keterkaitan dengan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan jasa penunjang serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.

5. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor pariwisata diarahkan untuk pengembangan sarana pariwisata moderen berskala besar, wisata alam khas Batam; mengintensifkan promosi Kota Batam sebagai salah satu kota tujuan wisata dengan memanfaatkan posisi Kota Batam yang strategis berada di dekat negara tetangga yang sudah lebih maju dari Kota Batam; mengembangkan objek-objek wisata yang telah ada serta mempunyai keunggulan komperatif untuk meningkatkan nilai jual; menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sosial budaya dijadikan aset kepariwisataan yang menciptakan keterkaitan antara usaha wisata dengan usaha ekonomi masyarakat serta memberikan perluasan kesempatan kerja; peningkatan industri pariwisata berbasis budaya.
6. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor penunjang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan lokal dan peningkatan keterkaitan sektor pertanian dengan pengembangan kepariwisataan.
7. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau termasuk pulau terluar diarahkan untuk; mengembangkan kekuatan dan potensi kelautan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional serta sebagai andalan kontribusi PDRB di masa datang; meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan hingga menghasilkan keuntungan yang lestari secara biologis, ekonomis dan ekologis; meningkatkan keterkaitan sektor kelautan dan perikanan dengan pengembangan pariwisata daerah; pengembangan industri pakan dan pembenihan perikanan; pengembangan keterampilan dan produktivitas usaha ekonomi kecil dan menengah; peningkatan kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan.
8. Pengembangan, pemberdayaan dan optimalisasi wilayah pulau-pulau dan pulau terluar diarahkan untuk pemanfaatan pulau-pulau dan pulau terluar sebagai potensi strategis wilayah maupun nasional agar dapat member manfaat bagi peningkatan ekonomi daerah dan nasional serta mendukung ketahanan nasional dan benteng ketahanan integrasi nasional dan kedaulatan negara.
9. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai penyumbang kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi diarahkan dengan mendorong gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi agen ekonomi yang berdaya saing tinggi sehingga dapat bersaing di dalam perekonomian global. Pembangunan sistem pembiayaan yang efektif bagi UKM menjadi hal yang terpenting untuk menciptakan UKM yang berdaya saing

tinggi dengan melibatkan pemerintah, lembaga pembiayaan formal seperti perbankan dan semi formal seperti koperasi serta memperluas akses permodalan dan pemberian insentif bagi UKM.

10. Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing tinggi diarahkan pada mewujudkan iklim investasi yang menarik dan sehat dengan tingkat kepastian usaha yang tinggi, pelayanan efisien dan jaminan hukum yang tegas untuk memperkuat Batam di dalam bersaing di zona pasar bebas. Peningkatan kepastian usaha mencakup kepastian tersedianya infrastruktur yang memadai, kepastian dalam hal peraturan pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kepastian dalam hal perizinan dengan memberikan insentif pengurusan perizinan, kepastian dalam hal perburuhan sehingga tidak mengganggu dunia usaha, dan kepastian atas jaminan keamanan.
11. Penciptaan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM ketenagakerjaan untuk mendukung sektor ekonomi diarahkan untuk; mendorong terciptanya sebanyak - banyaknya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dan penguatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis; pengembangan pasar kerja yang optimal dan fleksibel; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan; pengembangan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan dan review sistem pengupahan secara berkala.
12. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas diarahkan pada peningkatan kualitas sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi serta fasilitas prasarana lainnya seperti persampahan, fasilitas umum lainnya yang memadai dan handal dalam meningkatkan daya saing daerah di iklim persaingan pasar bebas yang ketat.

MISI III “Menciptakan Masyarakat Sejahtera”

Pengembangan Kota Batam dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut. Tujuan utama dari pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar yang terjangkau. Untuk itu diperlukan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di mana pada gilirannya akan berimplikasi kepada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dapat mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial. Adapun arah

kebijakan pembangunan jangka panjang yang ditempuh untuk mencapai Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berbudaya, berkeadilan dan berdemokratis adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah *mainland* dengan kegiatan ekonomi di wilayah *hinterland* didorong secara sinergis hasil produksi wilayah *hinterland* merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah *mainland* dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' serta didukung dengan penyiapan peraturan yang lebih memberi jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum untuk kepentingan pengembangan investasi dengan orientasi kepada kepentingan nasional dan daerah.
2. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global; pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, budi pekerti, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan.
3. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan diarahkan pada peningkatan daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dalam rangka pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan sarana pendidikan yang mudah dan murah tanpa mengabaikan mutu; penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup dan guna memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud; peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan;

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan untuk perhatian khusus pada penduduk rentan sosial antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.

5. Pembangunan kesehatan diarahkan pula pada peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Di samping itu pembangunan kesehatan diarahkan juga untuk memberi penguatan dan penekanan pada perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif serta pembangunan dan perbaikan gizi secara lintas sektor dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
6. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar baik listrik, air bersih, perumahan, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar listrik diarahkan pada peningkatan daya mampu pembangkit listrik termasuk peningkatan jaringan dan jangkauan pelayanan serta pencarian tenaga listrik alternatif. Untuk kebutuhan berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam penyediaan air minum dan sanitasi termasuk mencari sumber air baru; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
8. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memerhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
9. Pemenuhan kebutuhan angkutan diarahkan melalui

peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana angkutan dan meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi yang merata bagi masyarakat baik frekuensi maupun jarak jangkauan pelayanan bagi masyarakat dengan fasilitas sarana angkutan yang aman, nyaman, dan bersih. Sedangkan penanganan persampahan perkotaan diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana angkutan sampah, kualitas jangkauan pelayanan, peningkatan pelayanan prima penanganan sampah dari timbulan sampah baik dari rumah tangga, fasilitas umum, kawasan komersial, dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampai pengelolaan di Tempat Penampungan Akhir (TPA).

10. Pemenuhan kebutuhan bahan pokok diarahkan melalui pengendalian harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok serta jaminan ketersediaan stok sepanjang tahun termasuk jaminan lancarnya distribusi barang dan jaminan stok bagi daerah *hinterland*.
11. Pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat juga dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk; peningkatan pendapatan penduduk; peningkatan upaya distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan; peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.
12. Pembangunan agama diarahkan untuk pembangunan nilai-nilai agamis di dalam kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan beragama, ketaatan, kedisiplinan dan menunjang nilai-nilai luhur kehidupan sehingga dapat membuat manusia tumbuh menjadi individu yang sehat, berbudi pekerti dan berpikiran positif. Di samping itu juga diarahkan memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan serta meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
13. Pembangunan bidang budaya diarahkan untuk mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang Luhur sebagai payung budaya dalam proses pembangunan, memberdayakan nilai-nilai budaya Melayu untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat dan lembaga pemerintahan secara terus menerus termasuk pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event kesenian dan budaya guna mendorong berkembangnya nilai dan budaya Melayu.
14. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan keberpihakan perhatian dan komitmen terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung,

termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

15. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan mulai dari upaya pencegahan agar tidak rusak, meningkatkan kualitas lingkungan yang sudah menurun dan meningkatkan daya dukung lingkungan bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan disegala bidang. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan bagi pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya kerusakan dan degradasi lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diarahkan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
16. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan melalui penguatan dan pemantapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang didukung oleh peningkatan kualitas kelembagaan, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan.
17. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup diarahkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam menjaga kualitas lingkungan hidup terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.
18. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan dan ancaman melalui peningkatan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Di samping itu diarahkan pula untuk menciptakan hubungan harmonis antar golongan masyarakat sehingga tercapai kehidupan yang damai, sejahtera dan tenteram. Keseimbangan hidup antara satu etnis dengan etnis lainnya sebagai sesama pendatang perlu dipertahankan, dipupuk dan dipelihara agar tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan pembangunan.
19. Penanganan bencana alam diarahkan untuk meningkatkan mitigasi bencana alam; mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi tanggap dini terhadap keadaan darurat dan bencana alam serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana

agar dapat diantisipasi secara dini sehingga hal ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda.

MISI IV “Menciptakan Kelembagaan Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang Madani”

Menciptakan kondisi di mana kelembagaan pemerintahan, masyarakat dan swasta yang madani adalah sangat penting sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan Batam menuju Bandar Dunia yang Madani. Dalam kaitan itu, arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan aparatur kelembagaan pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang profesional untuk masyarakat; menciptakan sistem birokrasi yang akuntabel, transparan dan terbuka terhadap kritik sehingga tercapai prinsip-prinsip *good governance*; mempersiapkan sistem pelayanan pemerintah yang profesional dan transparan melalui peningkatan sistem informasi dan database yang berkaitan dengan pelayanan publik di mana sistem tersebut harus memiliki karakter akurat, reliabel dan variatif serta mampu memenuhi kepentingan masyarakat dan pengusaha. Di samping itu diarahkan pula untuk menata bidang aparatur berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya dengan didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja; menyiapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); pengembangan karir berbasis kinerja; serta menciptakan standar kinerja dengan sistem pengawasan internal yang mampu melahirkan budaya disiplin diantara aparatur pemerintah dengan sistem reward dan punishment yang jelas dan tegas.
2. Penguatan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran peningkatan penerimaan asli daerah terus ditingkatkan efektivitasnya.
3. Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat, Badan Pengusahaan Batam dan Instansi Vertikal dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Batam menuju Bandar Dunia yang Madani. Di samping itu diarahkan pula untuk meningkatkan advokasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kelembagaan dengan pemerintah lainnya; mengoptimalkan koordinasi antara sesama Dinas/Instansi dengan masyarakat sehingga perencanaan yang dibuat oleh

aparatur pemerintah sesuai dengan permasalahan riil di dalam masyarakat; serta menciptakan hubungan yang harmonis antara tiga pilar pemerintah yaitu eksekutif (Pemerintah Kota Batam), legislatif (DPRD Kota Batam) dan yudikatif.

4. Peran serta dunia usaha dalam pembangunan Kota Batam terus dikembangkan untuk meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip *good corporate governance* dan penguatan dunia usaha dalam kemitraan dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok dunia usaha sehingga tercipta suasana kegiatan usaha yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
5. Pembangunan dan pemantapan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Batam yang Madani diarahkan melalui penguatan karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral, berorientasi kinerja, kemajuan IPTEK serta berdisiplin sebagai perwujudan pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya yang luhur. Di samping itu diarahkan pula pada pemeliharaan tatanan sosial masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, tenggang rasa, kreatif dan merasa aman serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif, kreatif dan sinergis.

5.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang merupakan pedoman agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Penetapan tahapan dan skala prioritas menggambarkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, namun tidak mengabaikan permasalahan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan pembangunan akan berbeda-beda, tetapi semuanya harus berkesinambungan dalam setiap periode tahap pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dijelaskan berdasarkan misi pembangunan jangka panjang dan kemudian dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini diuraikan tahapan sasaran pokok dan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kota Batam tahun 2005-2025 untuk masing-masing misi sebagai berikut:

5.2.1 Tahapan Lima Tahun Pertama (2006-2011)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
1 Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	Meningkatnya daya saing Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan menuju Bandar Berstandar Internasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.	• Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan maju. - Penyediaan jaringan infrastruktur transportasi dan perhubungan yang saling terintegrasi. - Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pelabuhan laut dan udara. - Pengembangan aktivitas dan sistem pendukung pelayanan transportasi, pelabuhan laut dan udara. - Penyediaan pasokan tenaga listrik untuk dunia usaha dan rumah tangga termasuk pemenuhan elektrifikasi wilayah <i>hinterland</i> dengan tenaga diesel/genset - Pengadaan pelayanan pos dan telematika yang efisien dan moderen. - Pemantapan konservasi sumber daya air untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan. - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
	Meningkatnya jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi serta promosi Bandar Internasional.	• Peningkatan kualitas operasional Bandar Internasional. • Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan • Peningkatan promosi Bandar Internasional Batam dalam lingkup domestik dan luar negeri. • Peningkatan peranan dan kontribusi Kota Batam dalam berbagai kerjasama

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
		antar daerah, kawasan regional dan internasional.
	Terlaksananya pembangunan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang • Pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam
	Meningkatnya dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.	• Penyiapan dokumen kajian sanitasi limbah rumah tangga dan limbah B3 • Peningkatan kapasitas dan kualitas daya dukung lingkungan Kota Batam
2 Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Meningkatnya peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menjalankan peran dan fungsi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan peranan Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang efektif dan optimal. • Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan.	• Identifikasi potensi kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil dan menengah di daerah <i>hinterland</i> • Penyiapan kemitraan usaha-usaha antara usaha-usaha di <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i>
	Meningkatnya pengembangan kegiatan sektor ekonomi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.	• Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri. - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan yang terkait langsung dengan aktivitas pelabuhan internasional. - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal. • Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor perdagangan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal. - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan besar dan menengah.

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
		- Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan eceran dan pasar tradisional. - Perlindungan hak-hak konsumen. - Peningkatan keterkaitan sektor perdagangan dengan pengembangan pariwisata. • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pariwisata - Pengembangan sarana pariwisata moderen berskala besar. - Peningkatan kerjasama pariwisata. - Peningkatan promosi wisata. - Pengadaan industri berbasis budaya • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor jasa penunjang - Fasilitasi pengembangan sektor ekonomi jasa penunjang. • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pertanian penunjang - Peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan lokal. - Pengadaan keterkaitan sektor pertanian dengan pengembangan pariwisata skala kecil.
	Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar.	• Peningkatan kekuatan dan potensi kelautan • Peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan • Peningkatan keterkaitan kelautan dan perikanan dengan pengembangan pariwisata daerah • Pengembangan pembenihan perikanan. • Pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan. • Pengembangan keterampilan dan produktivitas usaha ekonomi kecil dan menengah. • Peningkatan kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
		pembinaan. • Pengembangan dan optimalisasi wilayah pulau-pulau dan pulau terluar.
	Meningkatnya dukungan atas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam.	• Pengembangan UKM dan Koperasi sebagai agen ekonomi yang berdaya saing tinggi sehingga dapat bersaing di dalam perekonomian lokal dan regional • Penyiapan sistem pembiayaan yang efektif bagi UKM • Pengadaan akses permodalan bagi UKM
	Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan handal, jaminan hukum, keamanan dan insentif yang menarik serta promosi daerah.	• Penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi. • Pengadaan produk hukum untuk kepastian berinvestasi. • Peningkatan pengawasan dan kerjasama investasi. • Pengadaan pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien bagi investasi. • Peningkatan upaya promosi dan insentif investasi.
	Menciptakan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM untuk mendukung kebutuhan sektor ekonomi.	• Penciptaan lapangan kerja formal dan kesejahteraan pekerja • Penguatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis. • Pengembangan pasar tenaga kerja yang optimal. • Review sistem pengupahan secara berkala.
	Menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi, persampahan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas serta prasarana lainnya.	• Penyediaan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi. • Pengadaan teknologi komunikasi serta fasilitas prasarana lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah (persampahan dan fasilitas umum lainnya)
3 Menciptakan Masyarakat Sejahtera	Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah <i>mainland</i> dengan kegiatan ekonomi di wilayah <i>hinterland</i> .	• Penyiapan produk hukum

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
	Meningkatkan daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat.	• Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan bidang pendidikan. • Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi • Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. • Pembangunan sarana pendidikan berskala internasional.
	Meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan.	• Perluasan cakupan, kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan umum serta pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan sosial • Peningkatan ketersediaan obat • Pengobatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas dan Polindes • Penanganan melalui preventif dan kuratif terhadap penyakit menular • Peningkatan pengawasan dan manajemen kesehatan • Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat • Penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan. • Pengembangan sarana kesehatan berskala internasional.
	Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan, listrik, air bersih, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan, dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok (sembako) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.	• Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. • Penertiban dan pengendalian permukiman <i>illegal</i>. • Pengadaan dan peningkatan sarana listrik, air bersih dan angkutan baik di wilayah <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i>. • Peningkatan kualitas pengelolaan sampah perkotaan dan sanitasi

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
		lingkungan. • Peningkatan jangkauan pelayanan transportasi dan sarana prasarana angkutan • Pengendalian harga dan peningkatan jaminan distribusi barang kebutuhan pokok (sembako).
	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran.	• Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk. • Peningkatan pendapatan penduduk. • Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran
	Meningkatkan tingkat kehidupan agama, sosial dan budaya umum penduduk.	• Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, budaya. • Pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event • Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya melayu sebagai payung budaya di Kota Batam
	Meningkatkan kegiatan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Fasilitasi kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
	Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk.	• Pengendalian pencemaran lingkungan hidup. • Peningkatan kualitas serta daya dukung lingkungan melalui pemantapan kebijakan • Pemulihan dan rehabilitasi lingkungan • Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan ancaman serta bencana alam.	• Peningkatan pengendalian, penertiban, dan perlindungan terhadap rasa aman kehidupan penduduk. • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kermitraan antara pihak keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat. • Peningkatan mitigasi bencana alam.

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2006-2011
		• Peningkatan tanggap dini terhadap keadaan darurat dan bencana alam.
4 Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional termasuk meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang mampu mendukung pembangunan Kota Batam	• Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah • Penciptaan sistem birokrasi dan pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip (<i>clean government and good governance</i>). • Penataan bidang aparatur dan pengembangan karir berdasarkan kompetensi yang berbasis kinerja • Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Kota Batam • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Pengusahaan Batam dan Instansi Vertikal dalam rangka pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Instansi Vertikal • Peningkatan kerjasama dan koordinasi, advokasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kelembagaan pemerintah lainnya.
	Meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i>	• Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i>. • Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam kemitraan.
	Terwujudnya masyarakat Kota Batam yang "MADANI".	• Penguatan karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral, berorientasi kinerja, kemajuan IPTEK serta pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya. • Pemeliharaan tatanan sosial masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, tenggang rasa dan kreatif. • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif, kreatif dan sinergis.

5.2.2 Tahapan Lima Tahun Kedua (2011-2016)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
1 Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	Meningkatnya daya saing Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan menuju Bandar Berstandar Internasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.	• Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan maju. - Penyediaan (lanjutan) dan pengembangan serta peningkatan kualitas jaringan infrastruktur transportasi dan perhubungan. - Pengembangan dan peningkatan serta pembenahan sarana dan prasarana transportasi dan pelabuhan laut dan udara (lanjutan) - Pengembangan (lanjutan) dan peningkatan aktivitas dan sistem pendukung pelayanan transportasi dan pelabuhan laut dan udara - Peningkatan pasokan tenaga listrik tenaga gas untuk dunia usaha dan rumah tangga, peningkatan pemenuhan elektrifikasi wilayah <i>hinterland</i> dengan <i>Solar Home System</i> (SHS) - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pos dan telematika yang efisien dan moderen. - Pemantapan (lanjutan) dan peningkatan konservasi sumber daya air untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air • Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan. - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Peningkatan Indeks Pembangunan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
		Gender (IPG) - Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga berskala menengah - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk (lanjutan)
	Meningkatkan jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi serta promosi Bandar Internasional.	• Peningkatan kualitas operasional Bandar Internasional (lanjutan) • Peningkatan kualitas dan kapasitas profesionalisme aparaturnya pemerintahan • Peningkatan promosi Bandar Internasional Batam dalam lingkup domestik dan luar negeri (lanjutan) • Peningkatan peranan dan kontribusi Kota Batam dalam berbagai kerjasama antar daerah, kawasan regional dan internasional untuk membangun <i>brand image</i> Bandar Internasional Batam (lanjutan)
	Terlaksananya pembangunan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang (lanjutan) • Percepatan Perda RTRW Kota Batam • Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) • Penyiapan Regulasi Zonasi Tata Ruang
	Meningkatkan dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.	• Penyiapan (lanjutan) pengelolaan Sanitasi limbah rumah tangga dan limbah B3 dengan pola KPS • Peningkatan kapasitas dan kualitas daya dukung lingkungan Kota Batam (lanjutan)
2 Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menjalankan peran dan fungsi Batam sebagai Kawasan Perdagangan	• Peningkatan peranan Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang efektif dan optimal (lanjutan)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
Nasional	Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif didukung dengan ICT
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan.	• Identifikasi (lanjutan) dan pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil dan menengah di daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan kemitraan usaha-usaha antara usaha-usaha di <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> (lanjutan)
	Meningkatnya pengembangan kegiatan sektor ekonomi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.	• Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri. - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan yang terkait langsung dengan aktivitas pelabuhan internasional (lanjutan) - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan local (lanjutan) - Peningkatan keterkaitan (<i>linkages</i>) sektor industri dengan hubungan intraindustri dan dengan sektor lainnya. • Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor perdagangan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal. - Peningkatan dan pengembangar kegiatan ekonomi sektor perdagangan besar dan menengah (lanjutan)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
		- Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan eceran dan pasar tradisional yang tertata dan (lanjutan) - Perlindungan hak-hak konsumen (lanjutan) - Peningkatan keterkaitan sektor perdagangan dengan pengembangan pariwisata (lanjutan) • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pariwisata - Pengembangan sarana pariwisata moderen berskala besar (lanjutan) - Pengembangan wisata alam khas Batam - Peningkatan kerjasama pariwisata (lanjutan) - Peningkatan promosi wisata (lanjutan) - Pengadaan (lanjutan) dan peningkatan industri berbasis budaya • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor jasa penunjang - Fasilitasi pengembangan sektor ekonomi jasa penunjang (lanjutan) • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pertanian penunjang - Peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan lokal (lanjutan) dan peningkatan produk pertanian potensial. - Peningkatan keterkaitan sektor pertanian dengan pengembangan pariwisata skala kecil (lanjutan)
	Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar.	• Peningkatan (lanjutan) dan Pengembangan kekuatan dan potensi kelautan • Peningkatan (lanjutan) dan pengembangan pemanfaatan sumber

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
		daya kelautan dan perikanan • Peningkatan (lanjutan) dan pengembangan keterkaitan kelautan dan perikanan dengan pengembang pariwisata daerah • Pengembangan pembenihan perikanan (lanjutan) dan penyiapan industri pakan ikan • Pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan (lanjutan) • Pengembangan (lanjutan) dan peningkatan keterampilan dan produktivitas usaha ekonomi kecil dan menengah. • Peningkatan kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan (lanjutan) • Pengembangan dan optimalisasi wilayah pulau-pulau dan pulau terluar berbasis ekonomi dan pertahanan
	Meningkatnya dukungan atas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam.	• Pengembangan UKM dan Koperasi untuk menjadi agen ekonomi yang berdaya saing tinggi dalam perekonomian skala regional dan nasional • Pembangunan sistem pembiayaan yang efektif bagi UKM • Pengadaan (lanjutan) dan perluasan akses permodalan bagi UKM
	Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan handal, jaminan hukum, keamanan dan insentif yang menarik serta promosi daerah.	• Penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi (lanjutan) • Implementasi produk hukum untuk kepastian berinvestasi. • Peningkatan kualitas pengawasan dan kerjasama investasi. • Peningkatan pelayanan birokrasi yang efektif

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
		dan efisien bagi investasi dan penanaman modal didukung IT • Peningkatan upaya promosi dan insentif investasi (lanjutan)
	Menciptakan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM untuk mendukung kebutuhan sektor ekonomi.	• Penciptaan lapangan kerja formal dan kesejahteraan pekerja (lanjutan) • Peningkatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis. • Pengembangan dan peningkatan pasar tenaga kerja yang optimal. • Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) • <i>Review</i> sistem pengupahan secara berkala (lanjutan)
	Menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi, persampahan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas serta prasarana lainnya.	• Penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi. • Penyiapan pengembangan kapasitas strategis sarana transportasi berbasis angkutan massal dan <i>Green Transportation</i>, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi. • Pengembangan dan peningkatan teknologi komunikasi serta fasilitas prasarana lainnya (persampahan dan fasilitas umum lainnya)
3	Menciptakan Masyarakat Sejahtera	• Penciptaan keterkaitan ekonomi wilayah <i>mainland</i> dengan kegiatan ekonomi di wilayah <i>hinterland</i> • Pelaksanaan produk hukum dan penegakan hukum
	Meningkatkan daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang	• Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
	relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat	Kota Batam (lanjutan) • Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (lanjutan) • Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan (lanjutan) • Pengembangan sarana pendidikan berskala internasional (lanjutan)
	Meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan.	• Perluasan cakupan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan umum dan peningkatan tipe RSUD menjadi tipe B • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan social (lanjutan) • Peningkatan ketersediaan obat yang berkualitas dan dengan stok yang cukup • Pengobatan gratis selektif khusus untuk masyarakat terdolog tidak mampu • Penanganan melalui preventif dan kuratif terhadap penyakit menular (lanjutan) • Peningkatan pengawasan dan manajemen kesehatan (lanjutan) • Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat (lanjutan) • Penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan (lanjutan) • Pengembangan sarana kesehatan berskala internasional (lanjutan)
	Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan, listrik, air bersih, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan, dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok (sembako) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan	• Peningkatan dan pengadaan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang berkualitas • Pemantapan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
	masyarakat.	• Penertiban dan pengendalian permukiman <i>illegal</i> (lanjutan) • Pengadaan dan peningkatan sarana listrik, air bersih dan angkutan baik di wilayah <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> (lanjutan) • Peningkatan kualitas pengelolaan sampah perkotaan dan sanitasi lingkungan yang ramah lingkungan • Peningkatan jangkauan pelayanan transportasi dan sarana prasarana angkutan yang terjangkau, bersih dan aman serta nyaman • Pengendalian harga dan peningkatan jaminan distribusi barang kebutuhan pokok (lanjutan)
	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran.	• Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk terutama penduduk lokal • Peningkatan pendapatan penduduk. • Peningkatan upaya distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. • Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran
	Meningkatkan tingkat kehidupan agama, sosial dan budaya umum penduduk.	• Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, budaya (lanjutan) • Pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event (lanjutan) • Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya melayu sebagai payung budaya di Kota Batam (lanjutan)
	Meningkatkan kegiatan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Fasilitasi, peningkatan sarana dan prasarana serta pembinaan kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
	Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi	• Peningkatan pengendalian

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
	kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk.	pencemaran lingkungan hidup. • Peningkatan kualitas serta daya dukung lingkungan melalui pemantapan kebijakan • Peningkatan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan • Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan ancaman serta bencana alam.	• Peningkatan pengendalian, penertiban, dan perlindungan terhadap rasa aman kehidupan penduduk (lanjutan) • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat (lanjutan) • Peningkatan mitigasi bencana alam (lanjutan) • Peningkatan tanggap dini terhadap keadaan darurat dan bencana alam (lanjutan)
4 Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional termasuk meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang mampu mendukung pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah (lanjutan) • Penciptaan sistem birokrasi dan pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip (<i>clean government and good governance</i>) (lanjutan) • Penataan bidang aparatur dan pengembangan karir berdasarkan kompetensi yang berbasis kinerja (lanjutan) • Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) • Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Kota

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2011-2016
		Batam(lanjutan) • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (lanjutan)
	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Pengusahaan Batam dan Instansi Vertikal dalam rangka pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan dan penguatan kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Instansi Vertikal • Peningkatan kerjasama dan koordinasi, advokasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kelembagaan pemerintah lainnya dalam rangka pembangunan Kota Batam (lanjutan)
	Meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> .	• Pengembangan dan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i>. • Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam kemitraan.
	Terwujudnya masyarakat Kota Batam yang "MADANI".	• Penguatan karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral, berorientasi kinerja, kemajuan IPTEK serta pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya • Pemeliharaan tatanan sosial masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, tenggang rasa dan kreatif serta merasa aman (lanjutan) • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif, kreatif dan sinergis (lanjutan)

5.2.3. Tahapan Lima Tahun Ketiga (2016-2021)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
1 Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	Meningkatnya daya saing Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan menuju Bandar Berstandar Internasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.	• Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan maju. - Penyediaan (lanjutan) dan pengembangan serta peningkatan kualitas jaringan infrastruktur transportasi bebas hambatan dan bersifat <i>mass transportation</i> dan peningkatan infrastruktur perhubungan yang saling terintegrasi interwilayah dan antarwilayah/ regional - Pengembangan dan peningkatan serta pembenahan sarana dan prasarana transportasi dan ekspansi pelabuhan laut dan udara. - Pengembangan (lanjutan) dan peningkatan aktivitas dan sistem pendukung pelayanan transportasi dan pelabuhan laut dan udara yang moderen, profesional, cepat, akurat, nyaman - Peningkatan pasokan listrik tenaga gas atau sumber alternatif lainnya untuk dunia usaha dan rumah tangga serta peningkatan pemenuhan elektrifikasi wilayah <i>hinterland</i> - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pos dan telematika yang efisien dan moderen serta memiliki jangkauan luas sampai ke wilayah <i>hinterland</i> - Pemantapan dan peningkatan konservasi sumber daya air untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air (lanjutan)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		• Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan. - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga berskala moderen - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk (lanjutan)
	Meningkatnya jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi serta promosi Bandar Internasional.	• Pemutakhiran otomatisasi perangkat keras operasional Bandar Internasional. • Peningkatan kualitas dan kapasitas profesionalisme aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan dan pengadaan tenaga ahli pengelola bandar • Peningkatan promosi dan menarik kegiatan dengan memanfaatkan Bandar Internasional • Pengembangan jaringan kerjasama lanjutan dengan bandar-bandar Asia, Afrika, Eropa dan Amerika.
	Terlaksananya pembangunan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang (lanjutan) • Revisi Perda RTRW Kota Batam • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Regulasi Zonasi Tata Ruang

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
	Meningkatnya dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.	• Pelaksanaan pengelolaan Sanitasi limbah rumah tangga dan limbah B3 dengan pola KPS • Peningkatan kapasitas dan kualitas daya dukung lingkungan Kota Batam (lanjutan)
2 Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Meningkatnya peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menjalankan peran dan fungsi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan peranan Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang efektif dan optimal didukung oleh sarana ICT • Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif didukung dengan ICT
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan.	• Pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil, menengah dan besar di daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan kemitraan usaha-usaha antara usaha-usaha di <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> secara adil dan berkesinambungan
	Meningkatnya pengembangan kegiatan sektor ekonomi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.	• Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri. - Program lanjutan dengan pola ekspansi, pembangunan kawasan industri baru yang ramah lingkungan dan promosi serta peningkatan pelayanan. • Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor perdagangan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal. - Program lanjutan dengan pengembangan perniagaan kelas dunia yang didukung

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		dengan infrastruktur dan sistem informasi yang prima - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan eceran dan pasar tradisional yang tertata, ramah lingkungan dan berstandar kelas dunia - Perlindungan hak-hak konsumen (lanjutan) • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pariwisata - Pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam, bahari, pusat budaya dan kesenian, pusat hiburan berkeknologi dan kuliner. - Pengembangan objek wisata dalam satu kawasan terpadu berstandar internasional. - Peningkatan kerjasama pariwisata (lanjutan) - Peningkatan promosi wisata (lanjutan) - Peningkatan dan pengembangan industri berbasis budaya • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor jasa penunjang - Program lanjutan dengan penyederhanaan izin dan pemberian insentif usaha ekonomi untuk penunjang sektor ekonomi riil. • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pertanian penunjang - Peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan lokal (lanjutan) dan peningkatan produk pertanian potensial. - Peningkatan keterkaitan sektor

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		pertanian dengan pengembangan pariwisata skala internasional
	Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar.	• Intensifikasi budi daya perikanan laut pada pulau-pulau berbasis masyarakat dan sebagai objek wisata kuliner dalam upaya pengamanan laut dari pencemaran • Peningkatan produksi pembenihan perikanan dan pembangunan industri pakan ikan • Pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan moderen • Peningkatan kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan (lanjutan) • Pembangunan dan optimalisasi wilayah pulau-pulau dan pulau terluar berbasis ekonomi dan pertahanan
	Meningkatnya dukungan atas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam.	• Pengembangan UKM dan Koperasi dalam perekonomian skala nasional dan internasional • Perluasan akses permodalan bagi UKM
	Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan handal, jaminan hukum, keamanan dan insentif yang menarik serta promosi daerah.	• Program lanjutan diperkuat dengan penguatan penataan ruang yang seimbang, penurunan angka kriminalitas dan pengembangan insentif dasar investasi
	Menciptakan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM untuk mendukung kebutuhan sektor ekonomi.	• Penciptaan lapangan kerja formal dan kesejahteraan pekerja (lanjutan) • Peningkatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis (lanjutan) • Pengembangan kesempatan lapangan kerja

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		• Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang berstandar internasional sebagai BLK rujukan wilayah Sumatera • <i>Review</i> sistem pengupahan secara berkala (lanjutan)
	Menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi, persampahan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas serta prasarana lainnya.	• Program lanjutan dalam penjaminan sarana dan prasarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi yang memadai dan moderen termasuk sumber energi alternatif dan sarana prasarana fasilitas umum lainnya
3 Menciptakan Masyarakat Sejahtera	Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah <i>mainland</i> dengan kegiatan ekonomi di wilayah <i>hinterland</i> .	• Penciptaan keterkaitan ekonomi wilayah <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> (<i>backward linkage</i>) (lanjutan) • Pelaksanaan produk hukum dan penegakan hukum (lanjutan)
	Meningkatkan daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat	• Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam berskala internasional termasuk pengembangan kerjasama untuk pendirian perguruan tinggi • Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (lanjutan) • Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan (lanjutan) • Pengembangan sarana pendidikan berskala internasional (lanjutan)
	Meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan.	• Perluasan cakupan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan umum puskesmas yang didukung oleh tenaga spesialis peralatan moderen dan peningkatan tipe RSUD menjadi tipe A

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan sosial (lanjutan) • Peningkatan ketersediaan obat yang berkualitas dan dengan stok yang cukup • Pengobatan gratis selektif khusus untuk masyarakat tergolong tidak mampu • Penanganan melalui preventif dan kuratif terhadap penyakit menular (lanjutan) • Peningkatan pengawasan dan manajemen kesehatan (lanjutan) • Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat (lanjutan) • Penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan (lanjutan)
	Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan, listrik, air bersih, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan, dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok (sembako) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.	• Peningkatan dan pengadaan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang berkualitas dan terpadu • Pemantapan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. • Penertiban dan pengendalian permukiman <i>illegal</i> (lanjutan) • Pengadaan dan peningkatan sarana listrik, air bersih dan angkutan baik di wilayah <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> (lanjutan) • Peningkatan kualitas pengelolaan sampah perkotaan dan sanitasi lingkungan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi • Peningkatan jangkauan pelayanan transportasi dan sarana prasarana

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		angkutan yang terjangkau, bersih dan aman serta nyaman • Pengendalian harga dan peningkatan jaminan distribusi barang kebutuhan pokok (lanjutan)
	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran.	• Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk terutama penduduk lokal • Peningkatan pendapatan penduduk melalui pengembangan produk ekonomi kreatif • Peningkatan upaya distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan di bawah 10 persen • Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di bawah 7 persen
	Meningkatkan tingkat kehidupan agama, sosial dan budaya umum penduduk.	• Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, budaya (lanjutan) • Pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event (lanjutan) • Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya melayu sebagai payung budaya di Kota Batam (lanjutan)
	Meningkatkan kegiatan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Fasilitasi, peningkatan sarana dan prasarana serta pembinaan kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tingkat yang lebih tinggi • Peningkatan kemampuan PMKS ke arah mandiri secara ekonomi
	Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk.	• Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. • Peningkatan kualitas serta daya dukung lingkungan melalui pemantapan kebijakan • Peningkatan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
		• Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan ancaman serta bencana alam.	• Peningkatan pengendalian, penertiban, dan perlindungan terhadap rasa aman kehidupan penduduk (lanjutan) • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat (lanjutan) • Peningkatan mitigasi bencana alam (lanjutan) • Sosialisasi peningkatan tanggap dini terhadap keadaan darurat dan bencana alam (lanjutan)
4 Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional termasuk meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang mampu mendukung pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah (lanjutan) • Penciptaan sistem birokrasi dan pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip <i>(clean government ang good governance)</i> (lanjutan) • Penataan bidang aparatur dan pengembangan karir berdasarkan kompetensi yang berbasis kinerja (lanjutan) • Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) • Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Kota Batam(lanjutan) • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan (lanjutan)
	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Pengusahaan Batam dan	• Peningkatan dan penguatan kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Instansi Vertikal

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
	Instansi Vertikal dalam rangka pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan kerjasama dan koordinasi, advokasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kelembagaan pemerintah lainnya dalam rangka pembangunan Kota Batam (lanjutan)
	Meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> .	• Pengembangan dan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i>. • Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam kemitraan.
	Terwujudnya masyarakat Kota Batam yang "MADANI".	• Penguatan karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral, berorientasi kinerja, kemajuan IPTEK serta pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya • Pemeliharaan tatanan sosial masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, tenggang rasa dan kreatif serta merasa aman (lanjutan) • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif, kreatif dan sinergis (lanjutan)

5.2.4.Tahapan Lima Tahun Keempat (2021-2025)

MISI		SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
1	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	Meningkatnya daya saing Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan menuju Bandar Berstandar Internasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.	• Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan maju. - Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur transportasi bebas hambatan dan bersifat <i>mass transportation</i> dan peningkatan infrastruktur perhubungan yang saling terintegrasi interwilayah dan antarwilayah/ regional - Pengembangan dan peningkatan serta pembenahan sarana dan prasarana transportasi dan ekspansi pelabuhan laut dan udara termasuk ekspansi di luar Pulau Batam - Program lanjutan dengan peningkatan aktivitas dan sistem pendukung pelayanan transportasi dan pelabuhan laut dan udara yang moderen, profesional, cepat, akurat, nyaman - Peningkatan pasokan listrik tenaga gas atau sumber alternatif lainnya untuk dunia usaha dan rumah tangga serta peningkatan pemenuhan elektrifikasi wilayah <i>hinterland</i> - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pos dan telematika yang efisien dan moderen serta memiliki jangkauan luas sampai ke wilayah <i>hinterland</i> - Pemantapan dan peningkatan konservasi sumber daya air untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air (lanjutan) • Peningkatan kualitas

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan. - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga berskala moderen - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk (lanjutan)
	Meningkatnya jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi serta promosi Bandar Internasional.	• Peningkatan nilai strategis perangkat keras dan lunak sarana Bandar Internasional yang kompetitif. • Peningkatan kualitas dan kapasitas profesionalisme aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan dan pengadaan tenaga ahli pengelola bandar serta peningkatan kepastian pelayanan bandar, keamanan, ketertiban • Peningkatan promosi dan menarik kegiatan dengan memanfaatkan Bandar Internasional • Pengembangan jaringan kerjasama lanjutan dengan bandar-bandar Asia, Afrika, Eropa dan Amerika.
	Terlaksananya pembangunan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang (lanjutan) • Pemantapan pelaksanaan Perda RTRW Kota Batam • Penjaminan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Regulasi Zonasi Tata Ruang

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
	Meningkatnya dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.	• Pelaksanaan pengelolaan Sanitasi limbah rumah tangga dan limbah B3 dengan pola KPS • Peningkatan kapasitas dan kualitas daya dukung lingkungan Kota Batam (lanjutan)
2 Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Meningkatnya peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menjalankan peran dan fungsi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	• Peningkatan peranan Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang efektif dan optimal didukung oleh sarana ICT (lanjutan) • Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif didukung dengan ICT (lanjutan)
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan.	• Pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil, menengah dan besar di daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan kemitraan usaha-usaha antara usaha-usaha di <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> secara adil dan berkesinambungan
	Meningkatnya pengembangan kegiatan sektor ekonomi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.	• Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri. - Program lanjutan dengan pola ekspansi, pembangunan kawasan industri baru yang ramah lingkungan dan promosi serta peningkatan pelayanan (lanjutan) • Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sektor perdagangan yang terkait potensi pasar dan kebutuhan lokal. - Program lanjutan dengan pengembangan perniagaan kelas dunia yang didukung dengan infrastruktur

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		dan sistem informasi yang prima - Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi sektor perdagangan eceran dan pasar tradisional yang tertata, ramah lingkungan dan berstandar kelas dunia - Perlindungan hak-hak konsumen (lanjutan) • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pariwisata - Penataan, dan pemeliharaan serta promosi kawasan pariwisata berbasis alam, pusat budaya dan kesenian, pusat hiburan berteknologi dan kuliner. - Pengembangan dan promosi objek wisata dalam satu kawasan terpadu berstandar internasional. - Peningkatan kerjasama pariwisata (lanjutan) - Peningkatan promosi wisata (lanjutan) - Peningkatan dan pengembangan industri berbasis budaya • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor jasa penunjang - Program lanjutan dengan penyederhanaan izin dan pemberian insentif usaha ekonomi untuk penunjang sektor ekonomi riil. • Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor pertanian penunjang - Peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan lokal (lanjutan) dan peningkatan produk pertanian potensial. - Peningkatan keterkaitan sektor pertanian dengan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		pengembangan pariwisata skala internasional
	Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar.	• Intensifikasi budi daya perikanan laut pada pulau-pulau berbasis masyarakat dar sebagai objek wisata kuliner dalam upaya pengamanan laut dari pencemaran • Peningkatan produksi pembenihan perikanan dan pembangunan industri pakan ikan • Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan moderen • Peningkatan kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan (lanjutan) • Pembangunan dan optimalisasi wilayah pulau-pulau dan pulau terluar berbasis ekonomi dan pertahanan dan pariwisata
	Meningkatnya dukungan atas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam.	• Pengembangan UKM dan Koperasi dalam perekonomian skala nasional dan internasional • Perluasan akses permodalan bagi UKM termasuk permodalan sumber dana internasional
	Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan handal, jaminan hukum, keamanan dan insentif yang menarik serta promosi daerah.	• Program lanjutan pengembangan kesempatan lapangan kerja, pengembangan insentif investasi yang kompetitif.
	Menciptakan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM untuk mendukung kebutuhan sektor ekonomi.	• Program lanjutan pengembangan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja formal dan kesejahteraan pekerja • Peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai BLK akreditasi, berstandar internasional dan sebagai BLK rujukan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		wilayah Indonesia Barat • <i>Review</i> sistem pengupahan secara berkala (lanjutan)
	Menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi, persampahan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas serta prasarana lainnya.	• Program lanjutan dalam penjaminan sarana dan prasarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi yang memadai dan moderen termasuk sumber energi alternatif dan sarana prasarana fasilitas umum lainnya
3 Menciptakan Masyarakat Sejahtera	Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah <i>mainland</i> dengan kegiatan ekonomi di wilayah <i>hinterland</i> .	• Program lanjutan yang didukung dengan pemantapan dan pengembangan keterkaitan ekonomi wilayah <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> (<i>backward linkage</i>) • Pelaksanaan produk hukum dan penegakan hukum (lanjutan)
	Meningkatkan daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat	• Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam berskala internasional termasuk program lanjutan pengembangan kerjasama bidang-bidang unggul pendidikan tinggi
	Meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan.	• Peningkatan kualitas dan variabilitas pelayanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah dan pelayanan kesehatan kompetitif bertaraf internasional • Program lanjutan perluasan cakupan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan umum puskesmas yang didukung oleh tenaga spesialis peralatan moderen dan peningkatan tipe RSUD menjadi tipe A • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan sosial (lanjutan) • Program lanjutan peningkatan ketersediaan obat yang berkualitas, pengobatan gratis selektif khusus untuk masyarakat terdampak tidak mampu • Program lanjutan penanganan melalui preventif dan kuratif terhadap penyakit menular • Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat (lanjutan) • Penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan (lanjutan)
	Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan, listrik, air bersih, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan, dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok (sembako) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.	• Peningkatan dan pengadaan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang berkualitas dan terpadu pada tingkat yang lebih tinggi (lanjutan) • Pemantapan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel (Lanjutan) • Penertiban dan pengendalian permukiman <i>illegal</i> (lanjutan) • Peningkatan dan pemeliharaan sarana listrik, air bersih dan angkutan baik di wilayah <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i> (lanjutan) • Peningkatan kualitas pengelolaan sampah perkotaan dan sanitasi lingkungan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi (lanjutan) • Peningkatan jangkauan pelayanan transportasi dan sarana prasarana angkutan yang terjangkau, bersih dan aman serta nyaman

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		(lanjutan) • Pengendalian harga dan peningkatan jaminan distribusi barang kebutuhan pokok (lanjutan)
	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran.	• Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk terutama penduduk lokal • Peningkatan pendapatan penduduk melalui pengembangan produk ekonomi kreatif dan penguatan kaitan pemasaran • Peningkatan upaya distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan di bawah 10 persen • Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di bawah 7 persen
	Meningkatkan tingkat kehidupan agama, sosial dan budaya umum penduduk.	• Pembinaan kehidupan bermasyarakat dan beragama serta menumbuhkannya • Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, budaya (lanjutan) • Pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event (lanjutan) • Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya melayu sebagai payung budaya di Kota Batam (lanjutan)
	Meningkatkan kegiatan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Peningkatan pelayanan social bagi PMKS dan inklusi yang produktif • Fasilitasi, peningkatan sarana dan prasarana serta pembinaan kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tingkat yang lebih tinggi • Peningkatan kemampuan PMKS ke arah mandiri secara ekonomi
	Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk.	• Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (lanjutan)

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		• Peningkatan kualitas serta daya dukung lingkungan melalui pemantapan kebijakan (lanjutan) • Peningkatan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan (lanjutan) • Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup (lanjutan)
	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan ancaman serta bencana alam.	• Peningkatan pengendalian, penertiban, dan perlindungan terhadap rasa aman kehidupan penduduk (lanjutan) • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat (lanjutan) • Peningkatan mitigasi bencana alam (lanjutan) • Sosialisasi peningkatan tanggap dini terhadap keadaan darurat dan bencana alam (lanjutan)
4 Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional termasuk meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang mampu mendukung pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah (lanjutan) • Penciptaan sistem birokrasi dan pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip (<i>clean government and good governance</i>) (lanjutan) • Penataan bidang aparatur dan pengembangan karir berdasarkan kompetensi yang berbasis kinerja (lanjutan) • Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) • Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Kota Batam (lanjutan) • Peningkatan pengelolaan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2021-2025
		keuangan daerah yang akuntabel dan transparan (lanjutan)
	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Pengusahaan Batam dan Instansi Vertikal dalam rangka pembangunan Kota Batam.	• Peningkatan dan penguatan kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Instansi Vertikal dan kelembagaan pemerintah lainnya dalam rangka pembangunan Kota Batam untuk menjadi sentra kerjasama dengan daerah lain • Peningkatan kerjasama dan koordinasi, advokasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kelembagaan pemerintah lainnya dalam rangka pembangunan Kota Batam (lanjutan)
	Meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> .	• Pengembangan dan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i>. • Penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam kemitraan.
	Terwujudnya masyarakat Kota Batam yang "MADANI".	• Penguatan karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral, berorientasi kinerja, kemajuan IPTEK serta pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya • Pemeliharaan tatanan sosial masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, tenggang rasa dan kreatif serta merasa aman (lanjutan) • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif, kreatif dan sinergis (lanjutan)

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Pemerintah Kota Batam wajib menerapkan 3 pilar dari tata kelola yang baik (*good governance*) yang meliputi (i) transparansi, (ii) akuntabilitas dan (iii) partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Batam Tahun 2005 - 2025 ini.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan untuk pembangunan terhadap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya sesuai, seperti informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber dayayang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan penanggungjawab, pertanggungjawaban dan substansinya. Akuntabilitas juga berkaitan dengan penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan umum maupun pemerintah. Akuntabilitas membutuhkan kepastian hukum serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Kepastian hukum adalah indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (*subject*) yang mempunyai peran penting.

Pelaksanaan semua kegiatan, dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, pada satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/ tugas yang melekat pada pemerintah kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program, maka dapat ditempuh antara lain melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha,

sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

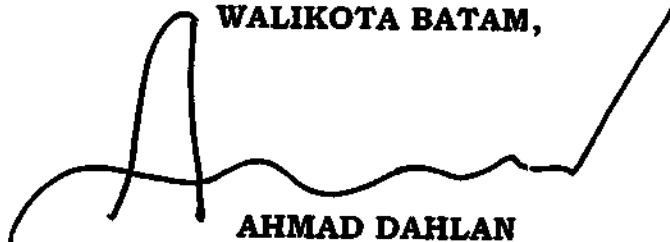
1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota Batam Tahun 2005 -2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota Batam berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kota Batam Tahun 2005-2025 ke dalam RPJM Daerah Kota Batam yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Batam berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Batam, Walikota Batam, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, Badan-Badan, Kantor-Kantor, dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kota Batam, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Batam Tahun 2005 - 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Batam, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Batam, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kota Batam, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Batam.

BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan milik daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 tahun ke depan. Visi, misi dan arah pembangunan tersebut dibuat dalam kerangka berfikir yang berkesinambungan dan saling mendukung antara satu dan lainnya. Kota Batam secara garis besar memiliki visi dan misi yang menaungi pembangunan dalam 20 tahun mendatang.

Dokumen RPJPD akan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen lain dibawahnya. Setiap calon kepala daerah hendaknya memperhatikan arah pembangunan RPJPD sehingga setiap RPJMD yang merupakan tahapan pencapaian RPJPD akan menjadi alat kesinambungan pelaksanaan dokumen RPJPD dalam 4 tahapan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Perhatian khusus dititikberatkan pada bidang ekonomi untuk menjadikannya sebagai lokomotif pembangunan. Hal ini penting di dalam proses perencanaan karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

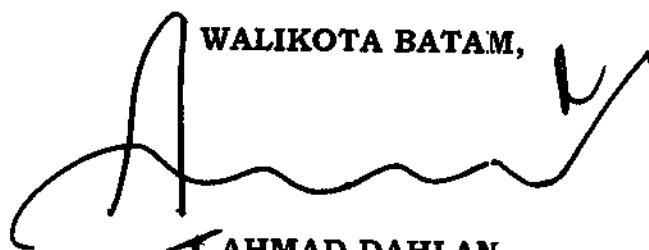
WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan milik daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 tahun ke depan. Visi, misi dan arah pembangunan tersebut dibuat dalam kerangka berfikir yang berkesinambungan dan saling mendukung antara satu dan lainnya. Kota Batam secara garis besar memiliki visi dan misi yang menaungi pembangunan dalam 20 tahun mendatang.

Dokumen RPJPD akan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen lain dibawahnya. Setiap calon kepala daerah hendaknya memperhatikan arah pembangunan RPJPD sehingga setiap RPJMD yang merupakan tahapan pencapaian RPJPD akan menjadi alat kesinambungan pelaksanaan dokumen RPJPD dalam 4 tahapan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Perhatian khusus dititikberatkan pada bidang ekonomi untuk menjadikannya sebagai lokomotif pembangunan. Hal ini penting di dalam proses perencanaan karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.


WALIKOTA BATAM,
AHMAD DAHLAN

- (3) Dalam hal akhir periode RPJPD dan belum tersusun RPJPD periode berikutnya, maka RPJPD Tahun 2005-2025 ini dapat menjadi dasar, khususnya pada program pembangunan RPJMD yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJPD untuk periode berikutnya.

BAB V

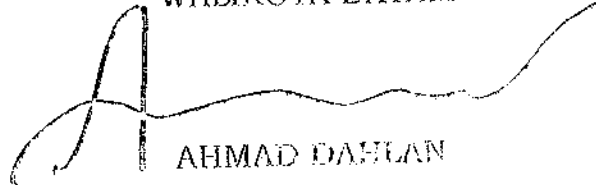
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 2